

Laporan Perekonomian

Provinsi Kepulauan Riau



FEBRUARI

2023



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Februari 2023

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

Dewan Redaksi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Februari 2023

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada stakeholders di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan KEKDA Provinsi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam - Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode Februari 2023 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan stakeholder eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

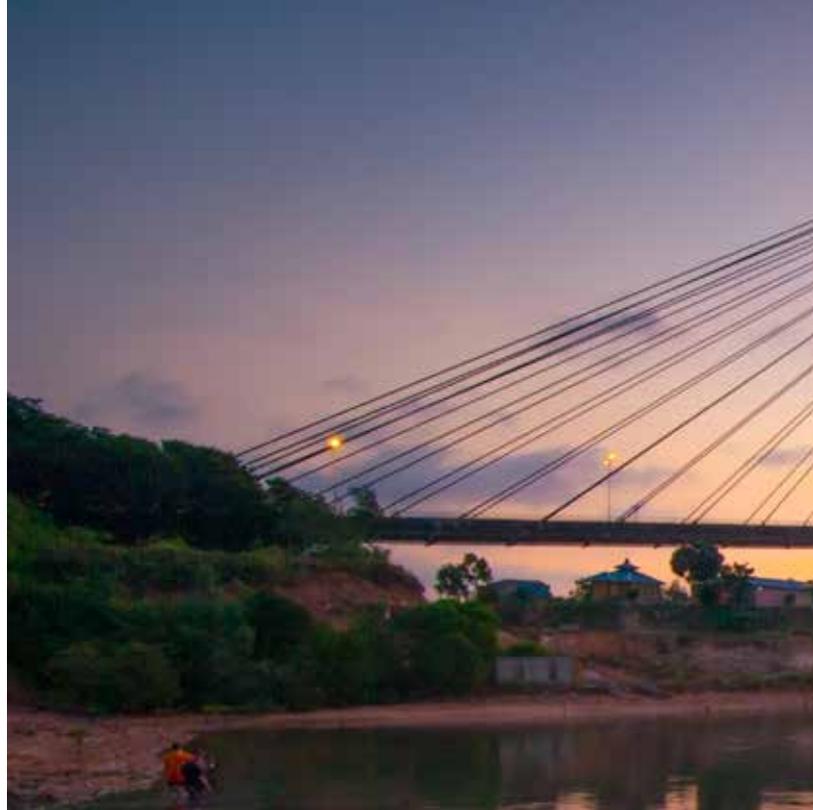
Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, Februari 2023
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Suryono
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Dewan Redaksi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	XI
Tabel Indikator	XIV



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	5
1.1.3 Investasi	6
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	6
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	7
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	8
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	9
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	9
BOKS 1	
Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lingga Pasca Pandemi Covid-19	11

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	15
2.1 REALISASI PENDAPATAN	17
2.2 REALISASI BELANJA	18
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	19

Bab III	
Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau	21
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	23
3.1.1 Inflasi Tahunan	23
3.1.2 Inflasi Triwulanan	24
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA	24
3.2.1 Inflasi Kota Batam	25
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	25
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	25
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	26

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	29
4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN KEPRI	31
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	32
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	32
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	32
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	34
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	34
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	34
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	34
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	36
BOKS 2	
Sektor UMKM dan Ekonomi Syariah Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Nasional	37



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	41
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	41
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	41
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	41
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	42
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)	42
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	42
5.2.3	Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	42
5.2.4	Perkembangan QRIS	43
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	43
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	44
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	45
5.3	TRANSAKSI KUPVA DAN PTD	45
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank	45
5.3.2	Perkembangan Transaksi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB)	45

BOKS 3

Perkembangan Kupva Bb dan PJP Layanan Remitansi di Provinsi Kepulauan Riau	47
--	----

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

6.1	KETENAGAKERJAAN	51
6.1.1	Ketenagakerjaan	51
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	52
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	52
6.2.2	Kemiskinan	52
6.2.3	Gini Ratio (GR)	53
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah

7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	55
7.2	PROSPEK INFLASI	57
7.3	REKOMENDASI	58
		59

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (dalam %, yoy)	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha (dalam %, yoy)	8
Tabel B1.1	Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Lingga s.d. Triwulan IV 2022	13
Tabel B1.2	Belanja APBD Kabupaten Lingga s.d. Triwulan IV 2022	13
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2022	17
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2022	18
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	20
Tabel 2.4	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	20
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam	23
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri Desember 2022 (% , yoy)	23
Tabel 3.3	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	24
Tabel 3.4	Inflasi Triwulanan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa	25
Tabel 3.5	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	26
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	31
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	34
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	36
Tabel 5.1	Penyaluran PKH Tahap 1-4 di Wilayah Provinsi Kepri	44
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	51
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 6.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	52
Tabel 6.5	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja Per Minggu	52
Tabel 6.6	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	53
Tabel 6.7	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	53
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	54
Tabel 6.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	54
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023	58
Tabel 7.2	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023	58

Daftar Gambar

Gambar B1.1	Peta Kabupaten Lingga	11
Gambar B1.2	Program Pendampingan oleh Bank Indonesia Bersama IPD	12
Gambar B1.3	Program Pendampingan oleh Bank Indonesia Bersama IPD	12

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3	Grafik B1.2	Pangsa Kredit Perbankan di Kabupaten Lingga	14
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3	Grafik B1.3	Pertumbuhan Kredit Perbankan di Kabupaten Lingga	14
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4	Grafik B1.4	Pertumbuhan Kredit UMKM di Kabupaten Lingga	14
Grafik 1.4	Mobilitas Masyarakat pada Area Perumahan pada Periode Triwulan IV 2021 & 2022	4	Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2022	17
Grafik 1.5	Mobilitas Masyarakat pada Area Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Periode Triwulan IV 2021 & 2022	5	Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2022	17
Grafik 1.6	Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	18
Grafik 1.7	Ekspektasi Konsumen	5	Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2022	19
Grafik 1.8	Realisasi Belanja APBD	5	Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2022	19
Grafik 1.9	Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri	5	Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	19
Grafik 1.10	Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan	5	Grafik 3.1	Inflasi Triwulan IV 2022 Regional Sumatera (yoy)	23
Grafik 1.11	Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	6	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2022	23
Grafik 1.12	Realisasi Investasi PMA	6	Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (yoy)	24
Grafik 1.13	Perkembangan Ekspor Total	6	Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	31
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	6	Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	31
Grafik 1.15	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Mesin Triwulan IV 2022	7	Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	32
Grafik 1.16	Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik	7	Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	32
Grafik 1.17	Perkembangan Impor Nonmigas	7	Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	32
Grafik 1.18	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	7	Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	32
Grafik 1.19	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	8	Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	33
Grafik 1.20	Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik dan Produk Mesin	8	Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	33
Grafik 1.21	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	9	Grafik 4.9	Kredit Sektor Real Estate, Sewa dan Jasa PT	33
Grafik 1.22	Perkembangan Kredit Konstruksi	9	Grafik 4.10	Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	33
Grafik 1.23	Kredit Perorangan Multiguna	9	Grafik 4.11	Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air	33
Grafik 1.24	Kredit Perdagangan Besar dan Eceran	9	Grafik 4.12	Kredit Sektor Industri Pengolahan	33
Grafik 1.25	Perkembangan Harga Gas Alam Indonesia	9	Grafik 4.13	Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri	34
Grafik 1.26	Perkembangan Harga Minyak Dunia	9	Grafik 4.14	Perkembangan Kredit Korporasi	34
Grafik B1.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga	11	Grafik 4.15	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	34
			Grafik 4.16	Survei Konsumen	35
			Grafik 4.17	Survei Konsumen	35

Daftar Grafik

Grafik 4.18	Kredit Rumah Tangga	35	Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	57
Grafik 4.19	Kredit Konsumsi	35	Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	57
Grafik 4.20	DPK Perseorangan	35	Grafik 7.3	Likert Scale Perkiraan Investasi	57
Grafik 4.21	Pangsa DPK Perseorangan	35			
Grafik 4.22	Perkembangan Kredit UMKM	36			
Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Kepri	41			
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	41			
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	41			
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	41			
Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	42			
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	42			
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	42			
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	42			
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	43			
Grafik 5.10	Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri	43			
Grafik 5.11	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kelompok Usaha	43			
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	43			
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	44			
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi KUPVA	45			
Grafik 5.15	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	45			
Grafik 5.16	Perkembangan Transaksi Pada PTD	46			
Grafik B3.1	Pertumbuhan Transaksi KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri	47			
Grafik B3.2	Pertumbuhan Transaksi KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri	48			
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	52			
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	52			
Grafik 6.3	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Kepri	54			
Grafik 6.4	<i>Gini Ratio</i> Provinsi di Wilayah Sumatera	54			
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	54			

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan IV 2022 tumbuh 6,40% (yoy), meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 6,03% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, akselerasi terutama didorong oleh komponen investasi dan konsumsi.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), meningkatnya kinerja didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan IV 2022 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 meningkat didorong oleh penyesuaian harga.

Perbaikan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berlanjut pada triwulan IV 2022, ditandai dengan pertumbuhan sebesar 6,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy). Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, meningkatnya kunjungan wisatawan yang mendorong sektor transportasi dan horeca (hotel, restoran, *cafe*), serta kinerja industri pengolahan yang masih cukup tinggi.

Perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 didominasi oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/ investasi dengan pangsa sebesar 41,87%, diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 40,43% dari PDRB. Tingginya kontribusi komponen investasi sejalan dengan upaya pelaku usaha pada sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah barang modal maupun investasi aset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan pengerjaan proyek pembangunan yang masif dilakukan pada triwulan akhir 2022 telah mendorong kinerja sektor terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dari sisi lapangan usaha utamanya didorong meningkatnya kinerja pada LU konstruksi, LU industri pengolahan, LU penyediaan akomodasi dan makan minum, serta LU informasi dan komunikasi. Namun demikian, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri untuk tumbuh lebih tinggi.

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2022 tercatat sebesar 100,07%, dan realisasi belanja mencapai 93,27% dari total anggaran. Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu didorong oleh realisasi penerimaan pada pos pajak daerah. Sementara itu peningkatan realisasi belanja pemerintah terjadi pada pos belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Sementara itu, realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2022 mencapai 91,67% dari pagu atau sebesar Rp6,64 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang mencapai 92,60% dari pagu.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 5,83% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,79% (yoy). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan dan kebijakan penyesuaian alokasi subsidi BBM.

Ringkasan Eksekutif

Peningkatan inflasi pangan terutama didorong oleh kenaikan harga rokok kretek filter, kangkung, dan daging ayam ras. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh komoditi bensin dan transportasi khususnya tarif angkutan udara. Penyesuaian harga Bahan Bahan Bakar (BBM) juga turut mendorong tekanan inflasi pada komoditas lainnya. Dengan demikian, inflasi pada triwulan IV 2022 melampaui target kisaran sasaran inflasi tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah sebesar $3\% \pm 1\%$ (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan IV 2022 masih terjaga sejalan dengan tren perbaikan kondisi perekonomian yang terus berlanjut. Perbaikan perekonomian Kepri tercermin dari laju penyaluran kredit dan DPK, disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, UMKM, maupun kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%). Penyaluran kredit oleh bank yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 11,77% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara DPK yang dihimpun oleh perbankan di Kepri tumbuh sebesar 10,05% (yoy), lebih tinggi 6,91% poin dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Kepri mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022. Selain itu, transaksi pembayaran non tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya QRIS. Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2022 mencatatkan net outflow sebesar Rp2,36 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat Rp579,9 miliar. Perkembangan tersebut sejalan dengan pola musiman kebutuhan uang tunai memasuki periode akhir tahun khususnya realisasi belanja Pemerintah dan kebutuhan transaksi masyarakat selama liburan akhir tahun. Aktivitas pembayaran non tunai juga tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

Perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat namun lebih baik dari estimasi sebelumnya sejalan dengan penghapusan kebijakan *Zero Covid* di Tiongkok dan perbaikan gangguan rantai

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan IV 2022 masih terjaga.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing dan pembayaran non tunai di Kepulauan Riau mengalami peningkatan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan dari tahun lalu di tengah peningkatan risiko geopolitik.

Menurunnya tekanan inflasi pada tahun 2023 direspons TPID dengan menjalankan GNPIP.

pasokan. Kondisi perbaikan rantai pasokan global yang membaik tersebut turut mendorong tekanan inflasi juga turut menurun. Perekonomian global yang terus membaik, turut mendorong perekonomian domestik untuk tumbuh tetap kuat dan berpotensi lebih tinggi didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan ekspor. Perekonomian Provinsi Kepri yang secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan perkembangan inflasi di daerah.

Tekanan inflasi global yang berkurang menyebabkan tekanan inflasi domestik diperkirakan berkurang sehingga inflasi domestik dan Provinsi Kepri diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy). Penurunan tekanan inflasi disebabkan oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global yang berdampak tekanan inflasi Kepri yang menurun. Upaya pengendalian inflasi di daerah terus diupayakan melalui sinergi dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) salah satunya melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



Halaman ini sengaja dikosongkan

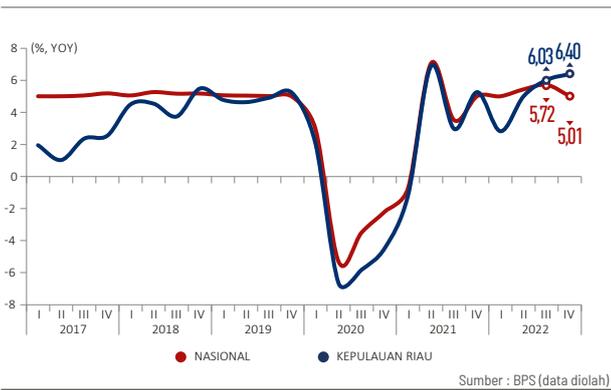
BAB I

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

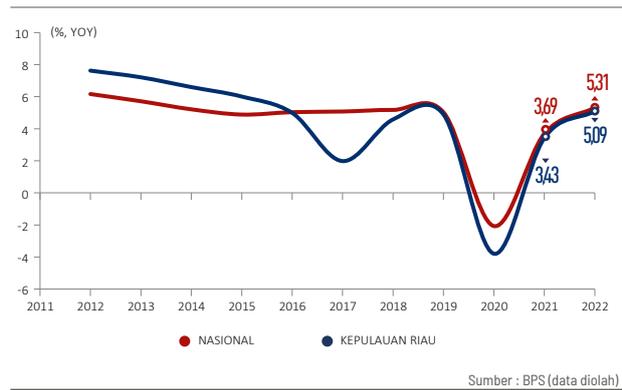


Perbaikan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berlanjut pada triwulan IV 2022 ditandai dengan pertumbuhan sebesar 6,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy). Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, meningkatnya kunjungan wisatawan yang mendorong sektor transportasi dan horeca (hotel, restoran, cafe), serta kinerja industri pengolahan yang masih cukup tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan bersumber dari akselerasi komponen PMTB, konsumsi RT, konsumsi pemerintah sejalan kinerja sektor industri yang lebih baik, mobilitas masyarakat yang lebih baik di akhir tahun dan realisasi belanja Pemerintah di akhir tahun.





Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

Perekonomian Kepri mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2022, lebih tinggi di antara pertumbuhan ekonomi triwulanan sejak pandemi tahun 2020 hingga saat ini. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan IV 2022 tercatat Rp50.475,37 miliar atau tumbuh 6,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy) serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,98% maupun Nasional sebesar 5,01% (yoy). Sejalan dengan capaian tersebut, secara akumulatif sampai dengan triwulan IV 2022 perekonomian Kepri tumbuh sebesar 5,09% (ctc). Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, meningkatnya kunjungan wisatawan yang mendorong sektor transportasi dan horeca, serta kinerja industri pengolahan yang masih cukup tinggi.

Secara spasial di wilayah Sumatera, perekonomian Kepri mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara provinsi lainnya dan pertumbuhan wilayah Sumatera pada triwulan IV 2022. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2022 tersebut, didorong oleh peningkatan kinerja investasi utamanya sektor bangunan sejalan dengan tingginya kinerja sektor konstruksi. Dengan perkembangan tersebut, Kepri memberikan andil pertumbuhan pada tahun 2022

sebesar 0,39% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera dengan pangsa ekonomi sebesar 7,32% dari total PDRB Sumatera.

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2022 didominasi oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) / investasi dengan pangsa sebesar 41,87% diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 40,43% dari PDRB. Tingginya kontribusi komponen investasi sejalan dengan upaya pelaku usaha pada sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah barang modal maupun investasi aset pembangunan bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan belanja pemerintah yang meningkat pada akhir tahun. Sementara itu, komponen konsumsi rumah tangga juga masih memiliki pangsa yang tertinggi kedua masih tumbuh tinggi namun mengalami normalisasi pertumbuhan. Demikian halnya dengan kinerja net ekspor, yakni aktivitas terkait perdagangan dengan luar daerah dan luar negeri, mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan tingginya pertumbuhan impor dan memiliki pangsa sebesar 9,96%. Hal tersebut sejalan dengan tinggi kandungan impor bahan baku industri

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Iii 2022 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Iv 2022 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Tahun Triwulan Iii 2022 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Tahun Triwulan Iv 2022 (% , qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 (% , yoy)	Andil Pertumbuhan 2022 (%yoy)	Pangsa Ekonomi 2022 (%)
1	Riau	4,58	4,10	4,30	0,10	3,36	4,55	0,97	23,50
2	Sumatera Utara	4,97	5,26	2,24	0,46	2,61	4,73	1,09	22,63
3	Sumatera Selatan	5,32	5,23	2,53	-1,74	3,58	5,23	0,72	14,02
4	Lampung	3,94	5,05	0,81	-5,34	2,77	4,28	0,44	9,81
5	Kepulauan Riau	6,03	6,40	0,58	7,24	3,43	5,09	0,39	7,32
6	Sumatera Barat	4,56	4,15	1,64	2,30	3,29	4,36	0,32	6,76
7	Jambi	5,20	5,22	2,57	-0,38	3,69	5,13	0,33	6,55
8	Aceh	2,51	5,60	2,02	6,78	2,79	4,21	0,24	5,02
9	Kep. Bangka Belitung	4,54	4,44	1,12	2,64	5,05	4,40	0,10	2,26
10	Bengkulu	4,51	4,75	-2,24	2,26	3,27	4,31	0,09	2,14
	SUMATERA	4,73	4,98	2,28	0,48	3,18	4,69	4,69	100,00

▲ Menkuat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (dalam %, yoy)

Pdrb Sisi Pengeluaran	2020					2021					2022					Arah TW	Arah Tahunan
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
1. Konsumsi RT	4,57	-1,71	0,01	-1,19	0,39	-0,98	4,10	-1,05	0,19	0,54	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	▼	▲
2. Konsumsi LNPRT	-7,23	-11,79	-6,70	0,78	-6,33	1,87	5,90	4,73	0,31	3,14	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	▼	▼
3. Konsumsi Pemerintah	7,59	-13,73	2,35	-16,12	-8,42	-4,91	10,20	-9,28	0,75	-0,60	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	▲	▼
4. PMTB (Investasi)	4,39	-8,64	-5,42	-9,33	-4,98	0,09	6,98	4,32	1,81	3,22	1,18	1,89	4,96	7,46	3,89	▲	▲
5. Perubahan Inventori	-139,12	-66,18	109,27	-182,42	-94,46	-323,44	-198,31	1,14	-68,81	285,74	-47,94	-39,53	35,05	-1.316,70	430,88	▼	▲
6. Total Ekspor	-5,38	-9,92	-25,40	21,33	-6,89	-7,91	20,04	16,97	30,82	13,30	13,64	18,59	6,33	-5,04	7,83	▼	▼
a. Total Impor	9,17	-3,47	-9,32	-4,64	-2,44	0,67	12,85	10,19	10,94	8,56	9,90	12,88	13,34	3,45	9,80	▼	▲
b. Total Net Ekspor	11,27	-2,83	-7,58	-6,53	-1,97	1,72	12,19	9,60	9,05	8,09	9,48	12,32	13,99	4,41	10,01	▼	▲
Pertumbuhan PDRB	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	▲	▲

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

pengolahan di wilayah Kepulauan Riau dan tingginya impor peralatan mesin untuk perakitan barang elektronik sehingga mendorong kenaikan pertumbuhan impor. Secara triwulanan, net ekspor mengalami perlambatan menjadi terkontraksi sebesar 5,04%%, menurun dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,33% (yoy).

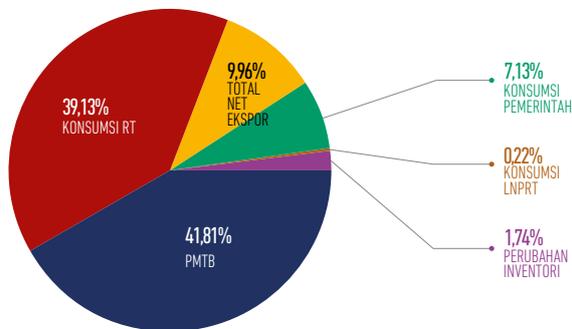
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2022 tetap tumbuh tinggi, meskipun mengalami perlambatan sejalan normalisasi pertumbuhan akibat *high-based effect* pada pertumbuhan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 6,43% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,44%. Konsumsi masyarakat yang tetap kuat tersebut didorong peningkatan mobilitas masyarakat seiring relaksasi aturan perjalanan yang mendorong aktivitas masyarakat di luar rumah. Peningkatan mobilitas masyarakat terkonfirmasi dari *Google Mobility Report* di area pusat perbelanjaan dan rekreasi (*Retail & Recreation*) yang secara rata-rata meningkat pada periode triwulan IV 2022 yaitu sebesar 30,4% AMIC¹, lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan III 2022 yang sebesar 24,1%

AMIC. Sejalan perkembangan tersebut, indeks mobilitas rata-rata di area perumahan (*Residential*) mengalami penurunan menjadi 5,9% AMIC dibandingkan pada triwulan III 2022 sebesar 8,5% (AMIC).

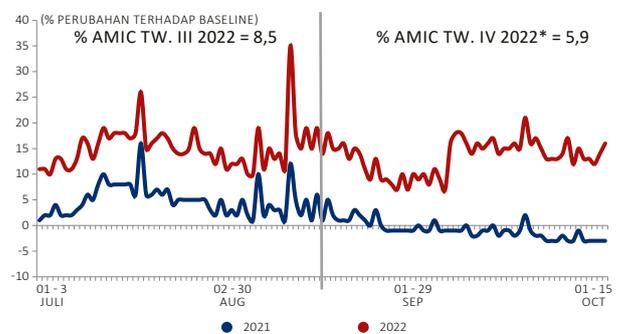
Perlambatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya terutama disebabkan oleh Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing mengalami penurunan. Hasil tersebut menunjukkan persepsi konsumen bahwa kondisi perekonomian cenderung lebih lambat tercermin dari perilaku konsumsi masyarakat. Selain itu, penurunan IKE tersebut juga sejalan dengan penurunan Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja. Masyarakat yang cenderung menahan pengeluarannya sejalan dengan penurunan Indeks Konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama.



Sumber: BPS (data diolah)

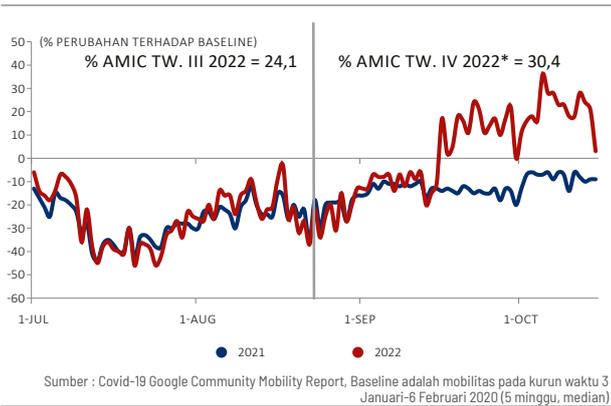
Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



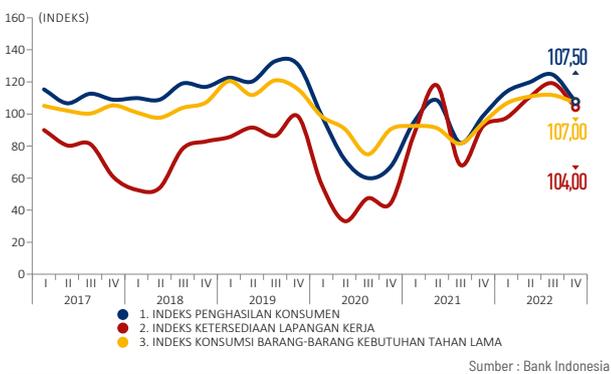
Sumber: Covid-19 Google Community Mobility Report, Baseline adalah mobilitas pada kurun waktu 3 Januari - 6 Februari 2020 (5 minggu, median)
*data terakhir per 15 Oktober 2022

Grafik 1.4 Mobilitas Masyarakat pada Area Perumahan pada Periode Triwulan IV 2021 & 2022

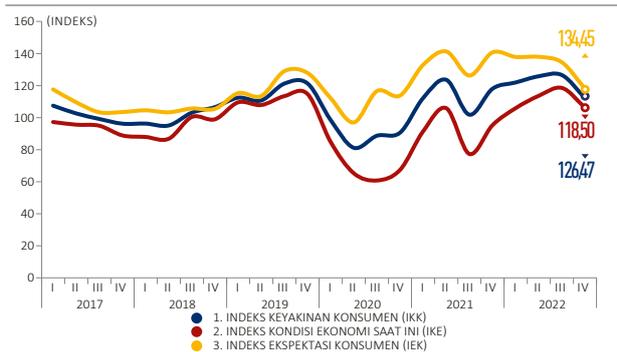
1 AMIC: Average Mobility Index Change atau rata-rata perubahan Google Mobility Index



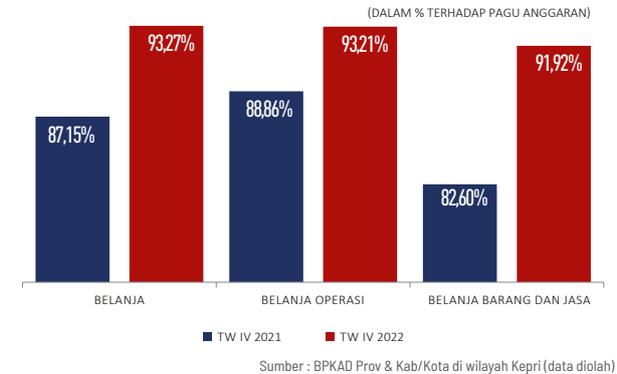
Grafik 1.5 Mobilitas Masyarakat pada Area Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Periode Triwulan IV 2021 & 2022



Grafik 1.7 Ekspektasi Konsumen



Grafik 1.6 Keyakinan Konsumen



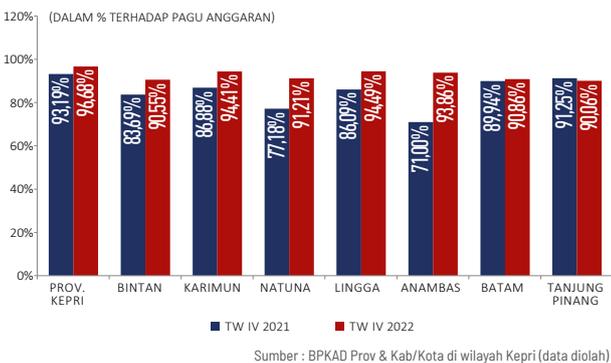
Grafik 1.8 Realisasi Belanja APBD

1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2022 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, kinerja konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 0,67% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,29% (yoy). Perbaikan tingkat konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah utamanya pada komponen belanja yang meningkat terutama pada pos belanja operasi serta belanja barang dan jasa. Realisasi pos belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2022 sebesar 93,27% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya

sebesar 87,15%. Hal ini juga tercermin dari belanja operasi yang meningkat sebesar 93,21% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 88,86%. Selain itu, belanja barang dan jasa turut mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 91,92% dari pagu anggaran jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 82,60%.

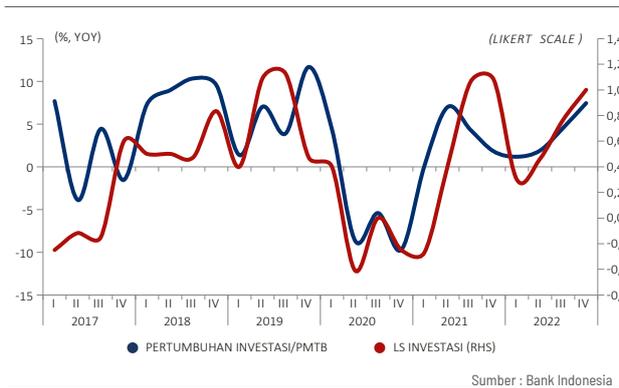
Berdasarkan realisasi belanja Kab/Kota di wilayah Kepri, terdapat 6 Kab/Kota mengalami peningkatan realisasi belanja pada periode triwulan IV 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Indikator lainnya yang mencerminkan peningkatan konsumsi pemerintah adalah jumlah simpanan pemerintah di



Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri



Grafik 1.10 Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan



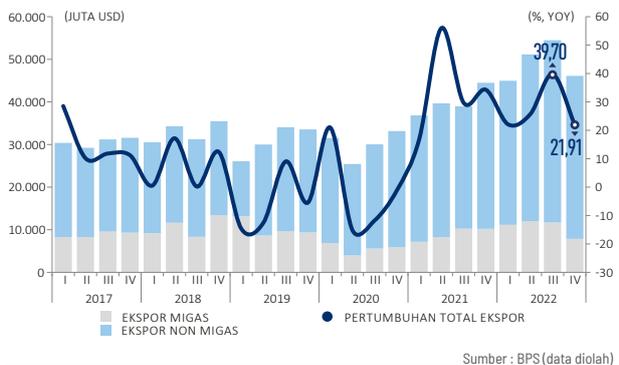
Grafik 1.11 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)

perbankan. Pada triwulan IV 2022, jumlah simpanan pemerintah di perbankan tercatat tumbuh sebesar 26,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 69,70% (yoy). Peningkatan jumlah simpanan Pemda mencerminkan adanya kenaikan belanja pemerintah yang dilakukan yang biasanya dilakukan pada akhir tahun.

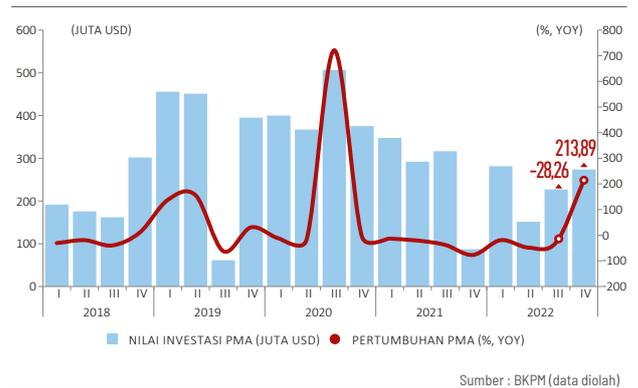
Berdasarkan struktur PDRB Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022, konsumsi pemerintah memiliki pangsa sebesar 7,13%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,93%. Pangsa konsumsi Pemerintah yang meningkat tersebut sejalan dengan adanya peningkatan belanja pada pos belanja operasi dan belanja modal yang cukup tinggi. Belanja pemerintah utamanya belanja modal dan belanja bantuan sosial mempunyai dampak lanjutan (*spillover effect*) pada pertumbuhan sektor lainnya sehingga realisasi belanja lebih awal akan menjadi pendorong bagi sektor lainnya untuk berkembang.

1.1.3 Investasi

Kinerja investasi pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. PMTB atau investasi pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 7,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,54% (yoy). Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil *liaison* yang dilakukan pada sejumlah perusahaan di Kepulauan Riau yang menunjukkan adanya peningkatan investasi. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2022 mengalami



Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Total



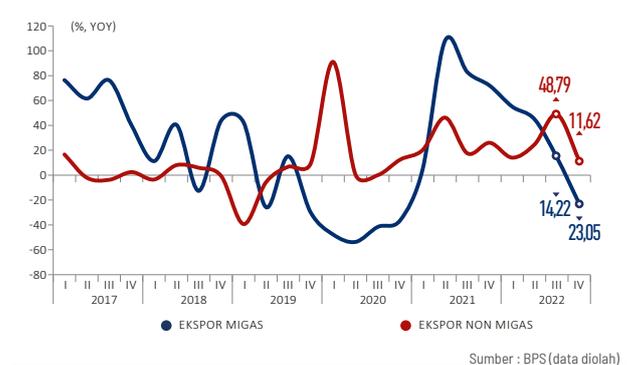
Grafik 1.12 Realisasi Investasi PMA

perbaikan dari triwulan sebelumnya. Nilai PMA mengalami kenaikan dari -28,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 213,89% (yoy).

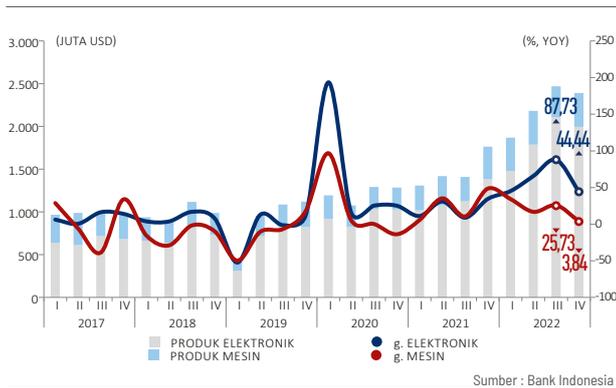
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor

Kinerja ekspor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 3,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,34% (yoy). Total ekspor luar negeri (migas dan nonmigas) dari Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh sebesar 21,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 39,70% (yoy). Penurunan ekspor bersumber dari kinerja ekspor nonmigas dan migas yang melambat dari masing-masing tumbuh sebesar 48,79% (yoy) dan 14,22% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi masing-masing sebesar tumbuh 11,62% (yoy) dan terkontraksi sebesar 23,05% (yoy). Ekspor nonmigas masih mendominasi ekspor Provinsi Kepri selama triwulan IV 2022 dengan pangsa sebesar 70,51%, sedangkan ekspor non migas memiliki pangsa sebesar 29,49%.

Penurunan kinerja ekspor nonmigas Kepri utamanya disebabkan oleh penurunan ekspor produk elektronik dan produk mesin. Kinerja ekspor produk elektronik tercatat tumbuh sebesar 44,44% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 87,73% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor ke negara mitra utama yakni Singapura dan Amerika Serikat pada triwulan IV 2022. Hal ini terkonfirmasi dari *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk peralatan listrik yang menurun



Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas



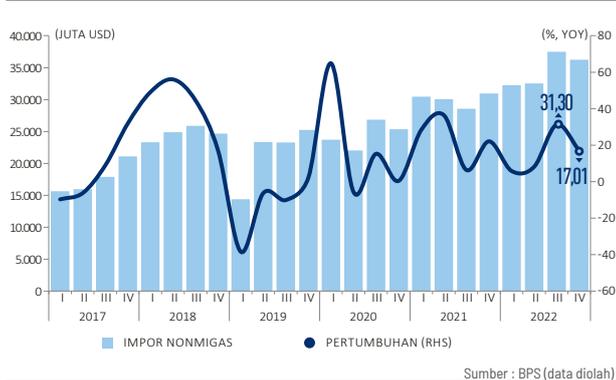
Sumber : Bank Indonesia
Grafik 1.15 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Mesin Triwulan IV 2022

pada triwulan IV 2022 menjadi 123,60, dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,43.

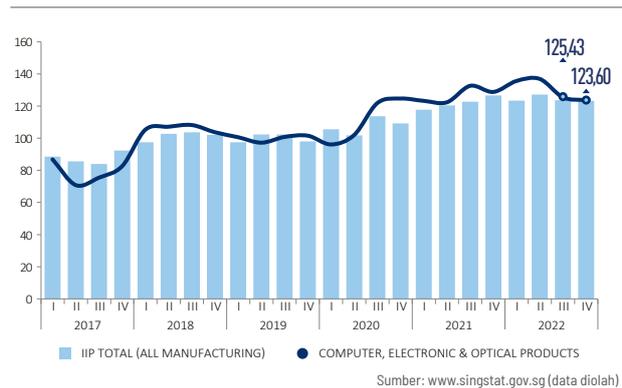
Sejalan dengan perkembangan sisi ekspor, impor Provinsi Kepri juga tercatat mengalami perlambatan. Impor Provinsi Kepulauan Riau dalam PDRB pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,99% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh penurunan impor antar daerah dan impor dari luar negeri pada komoditas migas maupun non migas. Nilai impor nonmigas luar negeri pada triwulan IV 2022 tumbuh 17,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 31,30% (yoy). Impor nonmigas pada triwulan IV 2022 masih didominasi impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi dengan pangsa masing-masing 78,53%, 17,08%, dan 4,39%.

Berdasarkan komoditasnya, impor bahan baku mengalami perlambatan yakni 15,10% (yoy) pada triwulan IV 2022, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 45,98% (yoy). Penurunan tersebut terjadi seiring permintaan ekspor produk manufaktur (elektronik dan mesin) utama dari Provinsi Kepri yang mengalami penurunan, yang disebabkan oleh tingginya komponen impor dalam komoditas ekspor Provinsi Kepri. Selain itu, impor barang modal (mesin baru dan alat angkut penunjang industri) berkontraksi sebesar 0,47% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,41% (yoy).

Sementara itu, impor barang konsumsi pada triwulan IV 2022 berkontraksi sebesar 3,34% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan



Sumber : BPS (data diolah)
Grafik 1.17 Perkembangan Impor Nonmigas



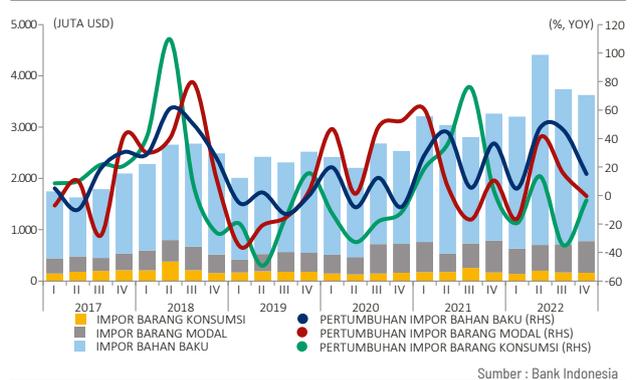
Sumber: www.singstat.gov.sg (data diolah)
Grafik 1.16 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektroniknya

triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 34,91% (yoy). Demikian halnya impor migas yang tercatat mengalami peningkatan dari 17,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 101,45% (yoy) pada triwulan IV 2022. Peningkatan impor migas terjadi pada hasil minyak yang memiliki pangsa sebesar 82,03%.

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan pengerjaan proyek pembangunan yang masif dilakukan pada triwulan akhir 2022 telah mendorong kinerja sektor terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dari sisi lapangan usaha utamanya didorong meningkatnya kinerja pada LU konstruksi, LU industri pengolahan, LU penyediaan akomodasi dan makan minum, serta LU informasi dan komunikasi. Namun demikian, perlambatan pada LU Pertambangan dan Penggalian menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri untuk tumbuh lebih tinggi.

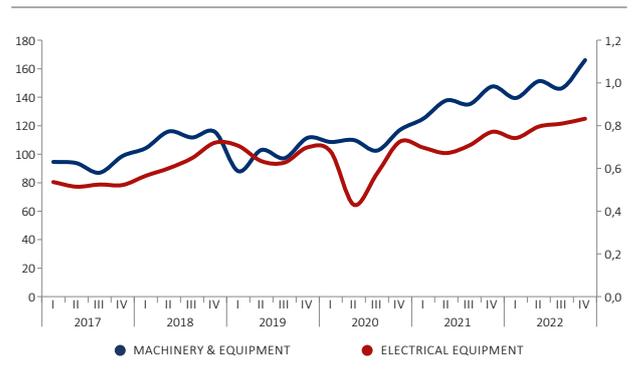
Struktur perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 40,81%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi yang memiliki kontribusi sebesar 19,21%, diikuti LU pertambangan dan penggalian serta LU perdagangan besar dan eceran masing-masing sebesar 12,58% dan 8,83%. Kinerja industri pengolahan yang tetap kuat didukung oleh permintaan industri yang tetap positif sehingga mendorong produksi tetap berjalan. Selain itu, pengerjaan proyek konstruksi sebagaimana



Sumber : Bank Indonesia
Grafik 1.18 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC



Grafik 1.19 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



Grafik 1.20 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik dan Produk Mesin

banyak dilakukan pada akhir tahun telah mendorong kinerja perekonomian Kepri untuk dapat tumbuh lebih tinggi.

1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja LU industri pengolahan pada triwulan IV 2022 tumbuh 6,73% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,87% (yoy). Akselerasi pertumbuhan sektor industri tersebut terkonfirmasi dari kinerja ekspor peralatan elektronik dan produk mesin yang mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022. Membaiknya kinerja industri pengolahan sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri manufaktur di Singapura khususnya pada industri peralatan elektronik dan produk mesin yang ditunjukkan oleh peningkatan *Index of Industrial Production* Singapura untuk Peralatan Elektronik dan Produk Mesin.

1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

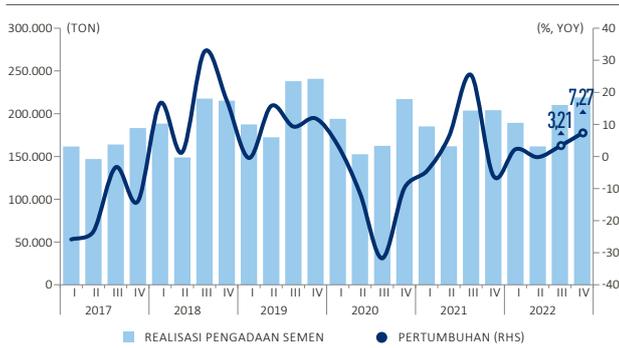
Kinerja LU konstruksi pada triwulan IV 2022 mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. LU konstruksi pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 17,95% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,89. Peningkatan pada LU konstruksi sejalan dengan realisasi PMA yang mengalami kenaikan pada triwulan IV 2022. Selain itu, pertumbuhan pada LU konstruksi terkonfirmasi dari kenaikan pertumbuhan pengadaan/penjualan semen dan meningkatnya kredit sektor konstruksi. Penjualan semen pada triwulan IV tumbuh positif sebesar 7,27% (yoy), meningkat dari sebelumnya 3,21% (yoy). Demikian halnya kredit sektor konstruksi yang mengalami peningkatan dari pertumbuhan sebesar 90,38% (yoy), menjadi sebesar 94,36% (yoy).

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha (dalam %, yoy)

PDRB SISI LAPANGAN USAHA	2020					2021					2022					ARAH TW	ARAH Tahunan
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,62	-6,16	-6,60	-6,61	-4,39	-15,45	0,79	2,78	2,82	-2,65	3,00	3,53	2,41	5,19	3,55	▲	▲
Pertambangan dan Penggalian	-0,96	-3,95	-1,75	-9,60	-4,17	-6,98	3,41	-2,20	3,80	-0,74	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	▼	▼
Industri Pengolahan	4,29	1,34	0,93	6,50	3,25	7,33	7,61	3,79	7,13	6,45	4,16	2,28	4,87	6,73	4,55	▲	▼
Pengadaan Listrik, Gas	1,92	-5,01	-7,41	-6,62	-4,38	0,61	1,76	6,31	8,61	4,32	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	▲	▲
Pengadaan Air	0,15	-11,07	-5,75	7,72	-2,78	0,68	5,09	-7,00	1,69	0,01	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	▼	▲
Konstruksi	4,70	-11,41	-8,59	-9,24	-6,40	0,05	9,42	8,75	1,40	4,74	0,69	-0,01	2,89	17,95	5,45	▲	▲
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	-11,03	-21,10	-18,89	-12,72	-17,16	-1,96	11,88	15,60	1,07	19,19	21,77	7,38	6,97	13,59	▼	▲
Transportasi dan Pergudangan	-7,21	-62,78	-45,88	-40,84	-40,23	-30,67	56,21	-16,19	14,69	-1,70	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	▼	▲
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,59	-57,37	-43,74	-40,26	-41,01	-18,27	21,64	-27,51	5,92	-6,69	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	▼	▲
Informasi dan Komunikasi	5,58	17,17	19,47	23,85	16,55	19,46	7,02	7,00	6,21	9,59	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	▲	▲
Jasa Keuangan	-1,22	-4,86	-5,07	-1,17	-3,10	-0,21	4,37	1,64	-2,74	0,73	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	▲	▲
Real Estate	2,59	-9,65	-11,22	-14,88	-8,33	-14,66	-0,62	0,88	1,95	-3,56	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	▲	▲
Jasa Perusahaan	-31,07	-52,56	-51,56	-33,68	-41,88	-11,60	41,22	36,52	7,83	14,14	0,73	3,86	18,47	18,73	10,65	▲	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	3,06	11,07	11,80	7,97	-9,24	3,89	-22,10	-6,61	-8,42	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	▼	▲
Jasa Pendidikan	2,20	-11,85	-11,06	-11,90	-8,20	-11,43	3,77	-3,85	-0,72	-3,38	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	▼	▲
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	-8,94	3,18	-3,16	-2,05	12,45	31,04	5,04	4,51	12,30	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	▲	▼
Jasa lainnya	-30,69	-96,12	-79,17	-66,95	-68,83	-45,07	637,66	16,27	-8,83	-3,40	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	▼	▲
PERTUMBUHAN PDRB	2,02	-6,81	-5,81	-4,46	-3,80	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	▲	▲

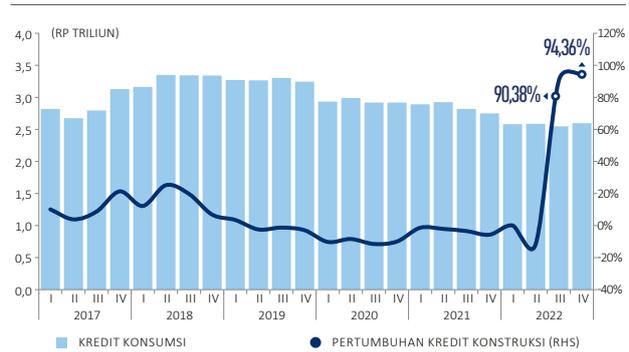
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



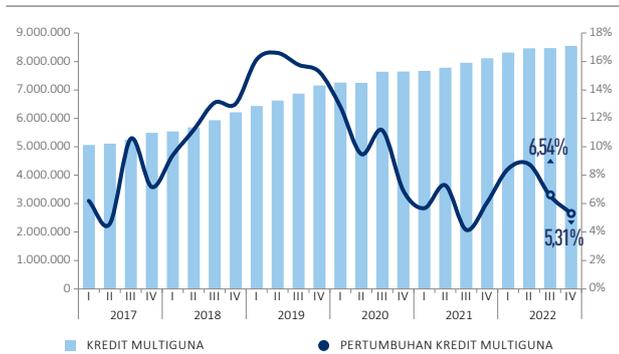
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (data diolah)

Grafik 1.21 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



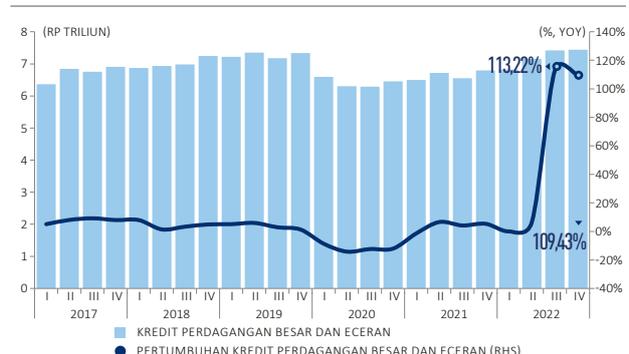
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.22 Perkembangan Kredit Konstruksi



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.23 Kredit Perorangan Multiguna



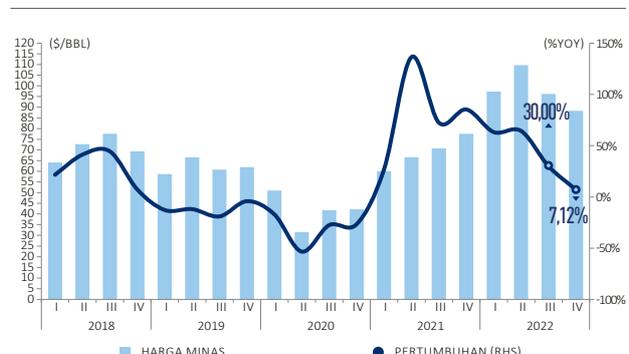
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.24 Kredit Perdagangan Besar dan Eceran



Sumber : Index Mundi (data diolah)

Grafik 1.25 Perkembangan Harga Gas Alam Indonesia



Sumber : Bloomberg (data diolah)

Grafik 1.26 Perkembangan Harga Minyak Dunia

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 6,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,38% (yoy). Perlambatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran bersumber dari penurunan daya beli masyarakat sejalan dengan moderasi pada tren pemulihan ekonomi di tengah tren penurunan inflasi. Perlambatan LU perdagangan besar dan eceran juga terkonfirmasi dari perkembangan penjualan eceran. Moderasi pertumbuhan pada LU perdagangan juga tercermin dari perlambatan kredit perseorangan terutama kredit multiguna serta kredit perdagangan besar dan eceran.

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan

Pada triwulan IV 2022 kinerja LU pertambangan dan pengalihan terkontraksi sebesar 22,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,06% (yoy). Hal tersebut terkonfirmasi dari perlambatan harga minyak dunia (WTI) Indonesia secara rata-rata dari 30,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,12% (yoy) pada triwulan IV 2022. Di sisi lain, adanya kendala teknis (*unplanned shutdown*) di lapangan turut menyebabkan penurunan produksi gas alam.



BOKS 1

Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lingga pasca Pandemi Covid-19



Gambar B1.1 Peta Kabupaten Lingga

A. SEKILAS TENTANG KABUPATEN LINGGA

Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga telah dikenal beberapa abad silam sebagai Kerajaan Melayu Lingga dan mendapat julukan "Negeri Bunda Tanah Melayu". Pada kurun waktu tahun 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga di Pulau Lingga dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

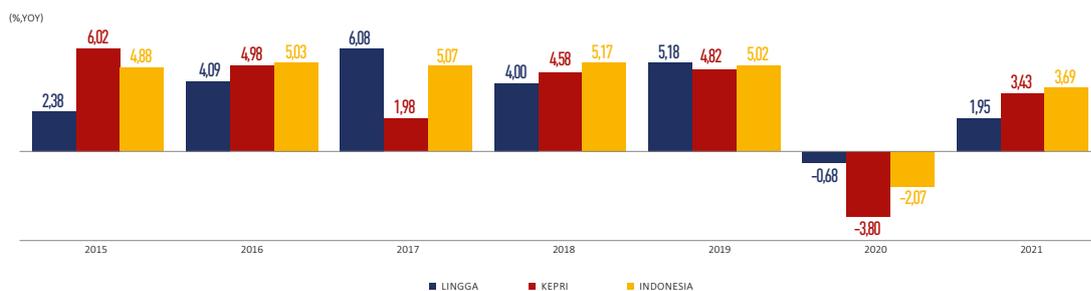
Kabupaten Lingga mempunyai jumlah pulau sebanyak 655 pulau dan total luas daratan seluas 2.203 km². Secara umum, daerah kabupaten lingga memiliki topografi berbukit dan tingkat kemiringan cukup tinggi dengan sekitar 76,92 persen merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 15 persen. Jumlah penduduk lingga berdasarkan sensus

penduduk 2020 adalah sebanyak 100.661 Jiwa dengan sebagian besar berada di kecamatan singkep.

B. PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN LINGGA

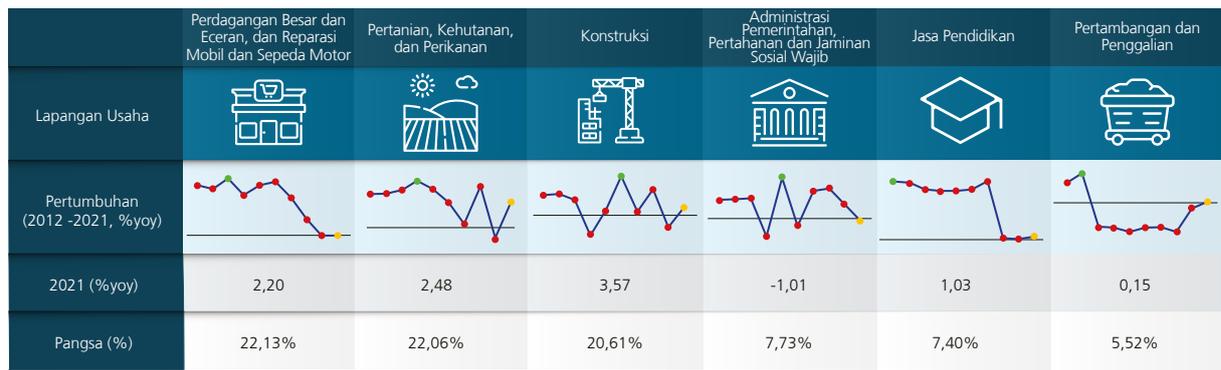
Perekonomian Kabupaten Lingga pada tahun 2021 tercatat tumbuh positif sebesar 1,95% (yoy), lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,68% (yoy). Perbaikan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan perbaikan di tingkat provinsi maupun nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi secara terbatas ditengah aktivitas masyarakat belum seluruhnya normal akibat munculnya varian Delta pada triwulan III 2021. Beberapa Lapangan Usaha (LU) utama yang mengalami peningkatan yakni (1) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (3) Konstruksi; (4) Jasa Pendidikan; dan (5) Pertambangan dan Penggalian. Sementara itu, LU Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi pertumbuhan pada 2021.

Struktur ekonomi Kabupaten Lingga pada tahun 2021 (atas dasar harga berlaku) didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa sebesar 22,13%, utamanya didorong oleh kategori perdagangan pada kelompok besar dan ritel di luar mobil maupun sepeda motor. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki pangsa sebesar 22,06% dengan komoditas pertanian unggulan antara lain perikanan, karet, kelapa, dan sagu. Kemudian, sektor Konstruksi dengan pangsa sebesar 20,61%. Sektor konstruksi memegang peran yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga yang berperan sebagai penarik pertumbuhan ekonomi di sektor pendukung seperti sektor pertambangan dan penggalian, industri bangunan, industri mesin/peralatan konstruksi, sektor jasa keuangan dan lain-lain. Sejalan dengan keberadaannya sebagai pusat pemerintahan,



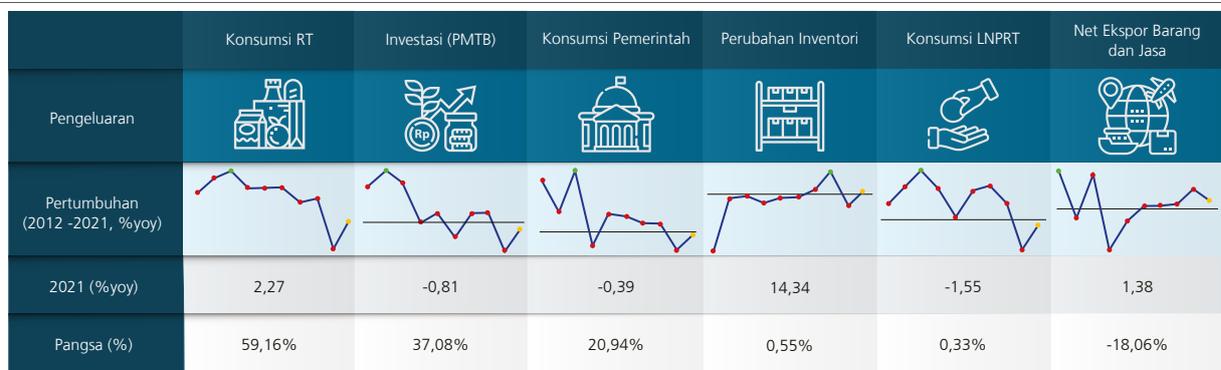
Grafik B1.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga

Sumber : BPS, diolah



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar B1.2 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Lingga Dari Sisi Lapangan Usaha



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar B1.3 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Lingga Dari Sisi Pengeluaran

sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki pangsa sebesar 7,73%. Adapun kontribusi perekonomian Kabupaten Lingga terhadap Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah sebesar 1,63% dan merupakan wilayah dengan kontribusi PDRB terendah di wilayah Kepulauan Riau.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Lingga didominasi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah dengan pangsa masing-masing sebesar 59,16%, 37,08%, dan 20,94%. Konsumsi RT sebagai besar dilakukan kelompok Makanan sebesar 55,28%, sementara kelompok Bukan Makanan sebesar 44,72%. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga didorong oleh pertumbuhan positif dari konsumsi RT sejalan mobilitas masyarakat yang terus membaik.

C. PERKEMBANGAN FISKAL

Realisasi pendapatan daerah terkini hingga triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp915,47 miliar atau 110,17% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 yang terealisasi sebesar Rp599,16 miliar atau 93,09% dari pagu. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut sejalan dengan membaik permintaan masyarakat sejalan dengan perbaikan mobilitas. Sementara itu, belanja Pemerintah Kabupaten Lingga sampai dengan triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp886,54

atau sebesar 94,49% dari pagu, lebih baik dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp572,68 miliar atau 86,90%. Peningkatan realisasi pendapatan maupun belanja pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Kabupaten Lingga termasuk daerah dengan rasio kapasitas fiskal daerah yang rendah berdasarkan nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Lingga pada tahun 2021 sebesar 1,468. Indeks kapasitas fiskal tersebut menggambarkan kemampuan keuangan Kabupaten Lingga khususnya pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Selain itu, terdapat indikator kemampuan Pemerintah Daerah lain yaitu Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD). Tingkat kemandirian fiskal selama periode 2017-2021, masih berada pada kategori "belum mandiri" atau masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

D. PERKEMBANGAN PERBANKAN

Penyaluran kredit di wilayah Kabupaten Lingga masih didominasi oleh kredit konsumtif yakni 57,70%, diikuti oleh kredit pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa 15,71%, dan Perikanan sebesar 7,15%. Sampai dengan triwulan IV 2022, jumlah kredit mencapai Rp599,76 miliar atau mengalami tumbuh sebesar 23,64% (yoy), lebih



Tabel B1.1 Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Lingga s.d. Triwulan IV 2022

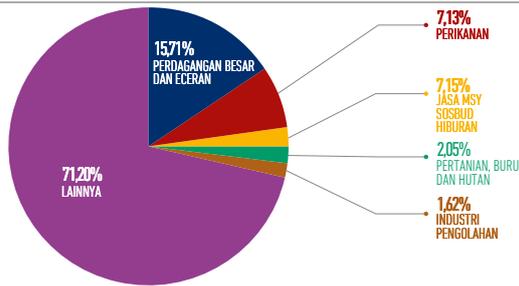
JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI	
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	46,61	5,61%	35,31	75,76%
Pajak Daerah	23,10	2,78%	14,15	61,25%
Retribusi Daerah	1,43	0,17%	1,32	92,11%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	1,70	0,20%	1,45	85,45%
Lain-lain PAD yang Sah	20,38	2,45%	18,39	90,25%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736,51	88,64%	826,46	112,21%
Dana Perimbangan	668,26	80,42%	758,75	113,54%
• Dana Bagi Hasil (DBH)	82,17	9,89%	176,46	214,76%
• Dana Alokasi Umum (DAU)	454,30	54,67%	454,30	100,00%
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59,13	7,12%	57,47	97,18%
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72,66	8,74%	70,52	97,06%
Dana Insentif Daerah (DID)	9,69	1,17%	9,69	1,17%
Dana Desa	58,56	7,05%	58,02	6,98%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	47,81	5,75%	53,54	112,00%
Pendapatan Bagi Hasil	46,54	5,60%	52,28	112,33%
Bantuan Keuangan	1,27	0,15%	1,27	0,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00%	0,15	>100%
Hibah	0,00	0,00%	0,15	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PENDAPATAN	830,93	100,00%	915,47	110,17%

Sumber: BKAD Kabupaten Lingga (data diolah)

Tabel B1.2 Belanja APBD Kabupaten Lingga s.d. Triwulan IV 2022

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI	
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)
Belanja Operasi	682,43	72,73%	639,99	93,78%
Belanja Pegawai	323,61	34,49%	305,32	94,35%
Belanja Barang dan Jasa	345,88	36,86%	324,44	93,80%
Belanja Hibah	8,29	0,884%	7,81	94,17%
Belanja Bantuan Sosial	4,64	0,49%	2,42	52,18%
Belanja Modal	136,28	14,52%	131,40	96,42%
Belanja Modal Tanah	0,50	0,05%	0,22	44,59%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,69	3,27%	29,77	97,01%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,14	5,13%	45,69	94,91%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55,52	5,92%	54,36	97,92%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,43	0,15%	1,35	94,71%
Belanja Tidak Terduga	3,97	0,42%	0,17	4,36%
Belanja Transfer	115,58	12,32%	114,97	99,48%
Belanja Bagi Hasil	2,91	0,31%	2,85	98,05%
Belanja Bantuan Keuangan	112,67	12,01%	112,12	99,51%
TOTAL BELANJA	938,26	100,00%	886,54	94,49%
SURPLUS/DEFISIT	-107,33		28,93	
Pembiayaan Neto	107,33		107,35	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	107,33		107,35	100,02%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00		0,00	0,00%
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00		136,29	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,00		1,00	
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,60		624,38	

Sumber: BKAD Kabupaten Lingga (data diolah)



Sumber: Bank Indonesia, data kredit s.d. Desember 2022

Grafik B1.2 Pangsa Kredit Perbankan di Kabupaten Lingga

tinggi dibandingkan triwulan III 2022 sebesar Rp584,41 miliar atau tumbuh sebesar 20,14% (yoy). Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut disebabkan oleh kenaikan permintaan kredit dari sektor pertanian dan perikanan serta penyediaan akumasi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit UMKM tercatat masih tumbuh tinggi meskipun melambat sebesar 52,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 62,56% (yoy). Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akses keuangan bagi UMKM, telah dilaksanakan antara lain melalui pelatihan, kurasi produk, promosi produk untuk memperluas pasar, hingga *business matching* untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan *agregator* maupun lembaga jasa keuangan. Upaya mendorong akses keuangan juga dilakukan melalui penerapan digitalisasi untuk UMKM. Pada akhir tahun 2021 telah dilaksanakan pelatihan peningkatan akses pemasaran dan pelatihan manajemen pemasaran agar UMKM dapat naik kelas.

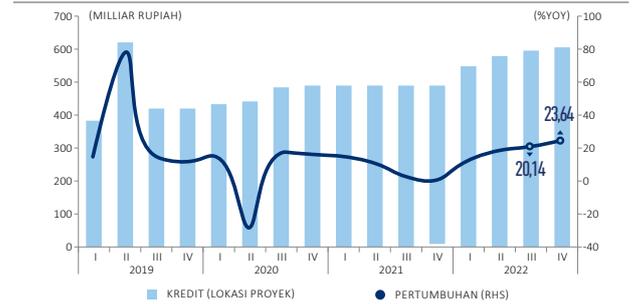
E. PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,09%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,23%. Penurunan jumlah pengangguran tersebut terjadi disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi terutama pada sektor konstruksi yang menyerap banyak tenaga kerja dan perdagangan.

Seiring dengan penurunan jumlah pengangguran, kualitas pembangunan SDM di Kabupaten Lingga mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,83 pada tahun 2021 menjadi 66,57 pada tahun 2022 dan termasuk dalam kategori "sedang". IPM Kabupaten Lingga tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

F. PROSPEK PEREKONOMIAN KABUPATEN LINGGA KE DEPAN

Potensi ekonomi Kabupaten Lingga yang memiliki kekayaan sumber daya alam masih dapat dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di samping



Sumber: Bank Indonesia, data kredit s.d. Desember 2022

Grafik B1.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan di Kabupaten Lingga

sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya

Prospek perekonomian Kabupaten Lingga utamanya bersumber dari sektor utama, seperti Perdagangan dan Perikanan. Sektor perdagangan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan mobilitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, sektor perikanan juga merupakan sektor utama diperkirakan terus berkembang sejalan dengan kenaikan kebutuhan masyarakat terhadap produk perikanan sejalan dengan peningkatan permintaan dari hotel dan restoran. Dengan kekayaan sumber daya alam perikanan yang melimpah, hilirisasi komoditas perikanan perlu terus didorong oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan peralatan bagi UMKM perikanan.

Ke depan, Kabupaten Lingga perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai Kabupaten perdagangan dan menjadi penopang daerah sekitarnya dengan memanfaatkan keunikan/kekayaan budaya sebagai daya tarik utama untuk pengembangan UMKM berbasis pada KPJU Unggulan antara lain produk perikanan seperti ikan teri, udang, ikan kerapu dan, serta warung makan. Selain itu, sebagai pusat pemerintahan, Kabupaten Lingga perlu melengkapinya dengan sarana infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, inflasi perlu tetap dikendalikan dengan menjalankan program implementasi GNPIP secara konsisten



Sumber: Bank Indonesia

Grafik B1.4 Pertumbuhan Kredit UMKM di Kabupaten Lingga

BAB II

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw IV
2022

100,07%
Rp 12,96T



Tw IV
2021

95,33%
Rp 12,10T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw IV
2022

93,27%
Rp 13,01T



Tw IV
2021

87,15%
Rp 11,89T

Realisasi Belanja APBN



Tw IV
2022

91,67%
Rp 6,64T



Tw IV
2021

92,60%
Rp 7,20T

Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw IV
2022

81,33%
Rp 1.212,11M



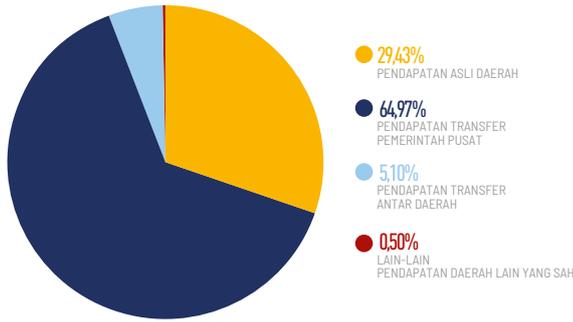
Tw IV
2021

83,39%
Rp 1.445,85M



Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu didorong oleh realisasi penerimaan pada pos pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat. Sementara peningkatan realisasi belanja pemerintah terjadi pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer.





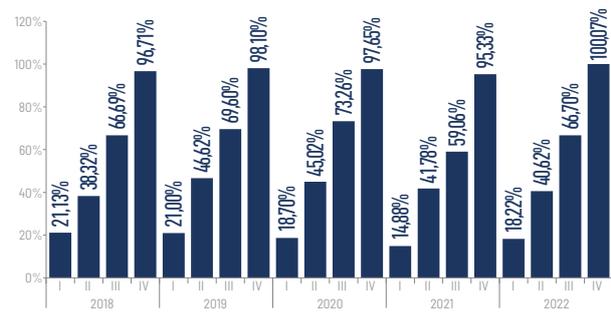
Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2022

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2022 tercatat sebesar 100,07%, sementara realisasi belanja mencapai 93,27% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 95,33%. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pos Pajak Daerah, dan transfer pemerintah pusat Dana Perimbangan, Dana Insentif Desa, serta Pendapatan Bagi Hasil. Sementara itu, realisasi belanja mengalami peningkatan dari sebesar 87,15% menjadi sebesar 93,27% utamanya belanja operasi khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Peningkatan juga terjadi pada pos belanja modal dan belanja transfer.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Kepri pada triwulan IV 2022 tercapai 100,07% dari total anggaran atau sebesar Rp12,92



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2022

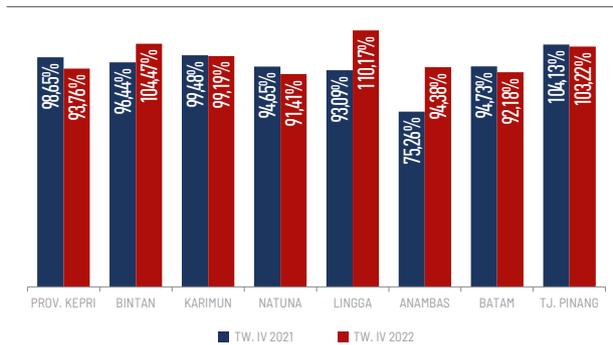
triliun. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 95,33% atau Rp12,10 triliun dari total anggaran. Peningkatan realisasi terjadi pada pos pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat.

Realisasi PAD pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp3,80 triliun atau 95,70% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,25 triliun atau 91,74% dari pagu anggaran. Peningkatan PAD terutama berasal dari pos pajak daerah khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang semakin terkendali yang disertai dengan pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, pembukaan kembali akses dari/ke Singapura dan Malaysia. Hal ini mendorong peningkatan aktivitas perekonomian sebagaimana terkonfirmasi dari peningkatan pertumbuhan lapangan

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2022

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI	
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	3.971,51	30,77%	3.800,82	95,70%
Pajak Daerah	3.195,71	24,76%	3.105,20	97,17%
Retribusi Daerah	188,11	1,46%	123,43	65,61%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	38,82	0,30%	37,06	95,46%
Lain-lain PAD yang Sah	548,87	4,25%	535,13	97,50%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.186,01	63,43%	8.391,89	102,51%
Dana Perimbangan	7.830,94	60,67%	8.026,45	102,50%
Dana Insentif Daerah (DID)	145,92	1,13%	157,36	107,84%
Dana Desa	209,14	1,62%	208,08	99,49%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	710,01	5,50%	659,07	92,83%
Pendapatan Bagi Hasil	683,52	5,30%	641,32	93,83%
Bantuan Keuangan	26,49	0,21%	17,75	67,01%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,85	0,30%	64,17	165,16%
Hibah	1,27	0,01%	30,31	2396,16%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	37,59	0,29%	33,86	90,08%
TOTAL PENDAPATAN	12.906,39	100,00%	12.915,95	100,07%

Sumber: BKAD Kabupaten Lingga (data diolah)



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

usaha terutama aktivitas pariwisata (penyediaan akomodasi, makan minum dan perdagangan) dan konstruksi. Kondisi tersebut telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) sehingga meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya pajak daerah.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan IV 2022 mencapai Rp 8,39 triliun atau sebesar 102,51% dari pagu anggaran. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2021

sebesar 8,01 triliun atau 97,41% dari pagu. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada pos dana perimbangan (khususnya dana bagi hasil/DBH) dan dana desa. Realisasi dana perimbangan sampai triwulan IV 2022 mencapai Rp 8,02 triliun atau 102,50% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 7,51 triliun atau 98,26%.

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi dicapai Pemerintah Kabupaten Lingga dengan jumlah pendapatan sebesar Rp915.46 miliar atau 110,17% dari total anggaran. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang masing-masing sebesar 104,47% dan 103,22% dari pagu anggaran tahun ini.

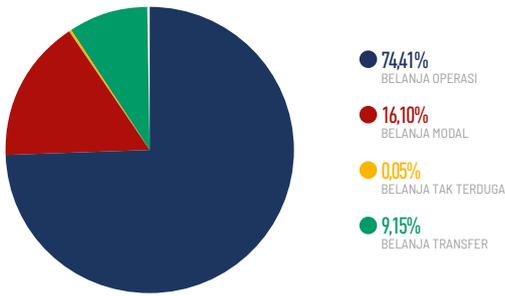
2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2022 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan dan perekonomian di Kepri yang dipengaruhi oleh pelonggaran mobilitas masyarakat seiring dengan kasus Covid-19 yang semakin terkendali. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2022

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN		REALISASI	
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)
Belanja Operasi	10.427,36	74,75%	9.719,13	93,21%
Belanja Pegawai	4.728,81	33,90%	4.485,71	94,86%
Belanja Barang dan Jasa	4.908,21	35,19%	4.511,53	91,92%
Belanja Bunga	2,50	0,02%	0,70	27,91%
Belanja Subsidi	2,12	0,02%	1,69	79,81%
Belanja Hibah	728,49	5,22%	678,84	93,19%
Belanja Bantuan Sosial	57,23	0,41%	40,66	71,04%
Belanja Modal	2.296,78	16,47%	2.095,01	91,22%
Belanja Modal Tanah	39,24	0,28%	27,35	69,70%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	539,41	3,87%	477,92	88,60%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	623,65	4,47%	583,57	93,57%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.057,57	7,58%	972,74	91,98%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36,91	0,26%	33,42	90,54%
Belanja Tidak Terduga	26,17	0,19%	6,06	23,17%
Belanja Transfer	1.198,71	8,59%	1.189,80	99,26%
Belanja Bagi Hasil	678,95	4,87%	676,69	99,67%
Belanja Bantuan Keuangan	519,77	3,73%	513,11	98,72%
TOTAL BELANJA	13.949,02	100,00%	13.010,00	93,27%
SURPLUS/DEFISIT	-1.042,63		-94,05	
Pembiayaan Neto	1.043,23		718,43	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.045,23		719,43	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,00		1,00	
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,60		624,38	

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)



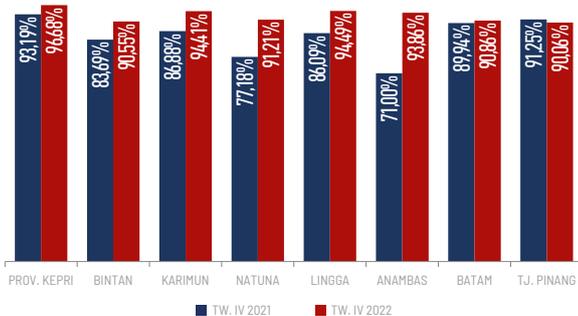
Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2022

IV 2022 telah mencapai 93,27% dari pagu anggaran atau sebesar Rp 13,01 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya yang hanya mencapai 87,15% atau sebesar Rp 11,88 triliun. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada pos belanja yakni belanja pegawai, belanja modal dan belanja transfer. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh belanja operasi dengan porsi 74,11%, diikuti belanja modal sebesar 16,10%, belanja transfer sebesar 9,15%, dan belanja tak terduga sebesar 0,05%.

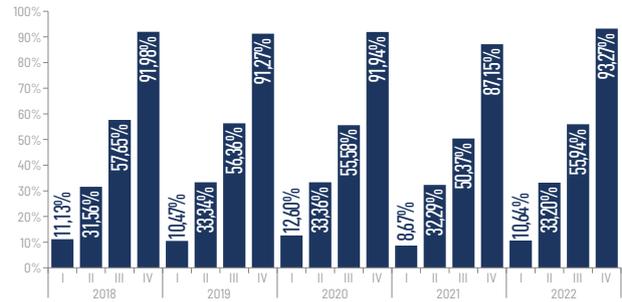
Realisasi belanja operasi tercapai sebesar 93,21% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp 9,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 88,86% dari pagu anggaran. Jika dirinci lebih lanjut, realisasi belanja barang dan jasa mencapai 91,92% dari pagu anggaran atau sebesar Rp4,51 triliun, lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 82,60%. Demikian halnya realisasi belanja pegawai sampai dengan triwulan IV 2022 tercapai 94,86% atau sebesar Rp4,48 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun lalu yakni sebesar 94,81%. Sementara itu, belanja hibah terealisasi 93,19% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 90,72%.

Peningkatan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh Pemda mendorong penyerapan pos belanja modal pada triwulan IV 2022 hingga Rp2,09 triliun atau sebesar 91,22% dari pagu anggaran,



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber : BPKAD Prov & Kab/Kota di Prov. Kepri

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2022

lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 78,57% dari pagu anggaran atau Rp1,69 triliun. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan jalan, irigasi dan jaringan di Kepri. Namun demikian, realisasi belanja tidak terduga relatif rendah yakni hanya sebesar 23,17%.

Sementara itu, realisasi belanja juga didorong oleh kenaikan realisasi belanja transfer bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta belanja bantuan keuangan kepada desa. Realisasi belanja transfer tercapai 99,26% dari pagu anggaran atau sebesar Rp1,18 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 90,53% atau sebesar Rp1,07 triliun. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya penerimaan pada pos pajak dan retribusi daerah yang di dalamnya terdapat komponen bagi hasil daerah di bawahnya seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak BBM.

Berdasarkan wilayah administrasi, Pemda dengan tingkat realisasi belanja tertinggi sampai dengan triwulan IV 2022 yakni Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 96,68% dari total anggaran atau sebesar Rp2,94 triliun, diikuti Kabupaten Lingga yang mencapai 94,49% atau sebesar Rp886,53 miliar, dan Kabupaten Karimun yang mencapai 94,41% atau sebesar Rp1,37 triliun.

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2022 mencapai 91,67% dari pagu atau sebesar Rp6,64 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 yang mencapai 92,60% dari pagu. Penurunan persentase realisasi terjadi pada pos belanja modal yang tercapai 77,00% pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 85,16%. Sementara persentase realisasi pegawai, barang dan lain-lain mengalami peningkatan serta belanja bantuan sosial terpantau optimal 100%.

Secara keseluruhan, pagu belanja APBN di Kepri pada 2022 tercatat mengalami penurunan dari sebesar Rp7,79 triliun pada tahun 2021

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

NO	Jenis Belanja	2021			2022		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pegawai	1.838,95	1.776,67	96,61%	1.878,10	1.850,54	98,53%
2	Barang	3.601,02	3.408,00	94,64%	3.353,35	3.190,82	95,15%
3	Modal	2.085,46	1.776,01	85,16%	1.763,28	1.357,66	77,00%
4	Bansos	1,82	1,82	100,00%	2,55	2,55	100,00%
5	Lain-Lain	250,39	239,26	95,55%	248,64	240,75	96,82%
TOTAL		7.777,64	7.201,76	92,60%	7.245,93	6.642,32	91,67%

Sumber: Kajian Fiskal Regional 2022, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Kepri

menjadi sebesar Rp7,24 pada tahun 2022. Penurunan pagu anggaran terjadi pada pos belanja barang, modal dan lain-lain. Pagu anggaran belanja turun di tahun ini karena masih fokus untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Realisasi belanja modal hanya dapat mencapai 77,00% dari pagu anggaran. Relatif lebih rendahnya realisasi belanja APBN disebabkan oleh belum diterimanya juknis untuk pelaksanaan beberapa kegiatan, belum tersedianya barang yang dibutuhkan pada *e-catalog*, dan kontrak yang terlambat ditandatangani. Selain itu, kondisi geografis dan gangguan kondisi cuaca turut menjadi faktor pendorong dalam tertundanya proses penyelesaian pekerjaan.

Belanja barang dan modal hingga triwulan IV 2022 terutama

dilaksanakan untuk proyek infrastruktur pemerintah pusat di wilayah Provinsi Kepri yang telah berjalan. Beberapa proyek infrastruktur yang telah berjalan di antaranya adalah Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik di Kab. Natuna, Peningkatan Jalan Kerandin – Belungkur di Kabupaten Lingga, Pembangunan Flyover Basuki Rahmat – Dompok (Sp. Ramayana) di Kota Tanjungpinang, dan Pemeliharaan berkala Jl. Toapaya KM. 46 di Kab. Bintan. Realisasi belanja infrastruktur sampai akhir triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp1,21 triliun atau 81,33% dari pagu anggaran.

Di sisi lain, realisasi belanja untuk proyek pengembangan konektivitas udara telah mencapai sebesar Rp107,78 miliar atau 90,21% dari total anggaran yang sebagian diantaranya untuk pekerjaan Lanjutan Pengembangan Bandara Tambelan (Dinding Penahan Gelombang,

Tabel 2.4 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	2021			2022		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	447,61	428,63	95,76%	119,48	107,78	90,21%
2	Konektivitas Laut	362,83	207,15	57,09%	558,08	393,55	70,52%
3	Konektivitas Darat	657,52	563,97	85,77%	535,18	434,71	81,23%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	265,92	246,10	92,55%	277,62	276,07	99,44%
Total		1.733,89	1.445,85	83,39%	1.490,35	1.212,11	81,33%

Sumber: Kajian Fiskal Regional 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Drainase Saluran Terbuka Dan Pemagaran Sisi Udara). Sementara itu belanja proyek untuk pembuatan bendungan dan SDA telah terealisasi sebesar Rp276,07 miliar atau 99,44% dari total anggaran yang salah satunya adalah Pembangunan Embung Air Baku Pulau Serasan di Kab. Natuna, Pembangunan Tanggul Sungai wilayah Bawah Batam di Kab. Karimun, dan Rehabilitasi Dermaga Apung Pelabuhan Benan di Kab. Lingga.

BAB III

Perkembangan Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau (yoy)



Tw IV 2022 **5,83%**



Tw III 2022 **6,79%**

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw IV 2022 **4,96%**



Tw III 2022 **5,95%**

Kota Batam (yoy)



Tw IV 2022 **5,95%**



Tw III 2022 **6,87%**

Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 5,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,79% (yoy). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan dan kebijakan penyesuaian alokasi subsidi BBM. Peningkatan inflasi pangan terutama didorong oleh kenaikan harga rokok kretek filter, kangkung, dan daging ayam ras. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh komoditi bensin dan transportasi khususnya tarif angkutan udara. Dengan demikian, inflasi pada triwulan IV 2022 melampaui target kisaran sasaran inflasi tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah sebesar 3% +/- 1% (yoy).



Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam

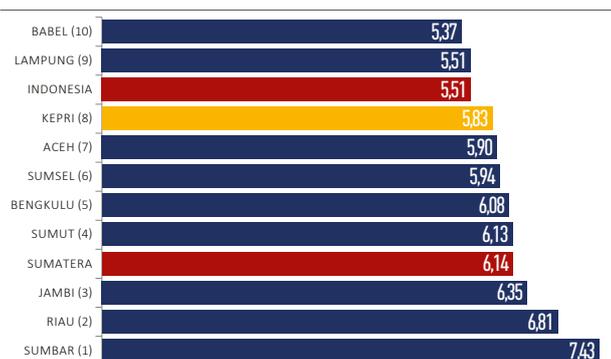
Kelompok	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	2,96	1,96	1,42	1,68	1,37	1,33	1,60	1,87	2,64	4,35	5,95	5,51
Inflasi Gabungan 2 Kota di Kepri	1,09	0,24	0,10	1,18	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83
Inflasi Tanjungpinang	1,40	-0,32	-0,03	1,66	1,44	1,22	1,31	0,86	2,15	5,27	6,12	4,96
Inflasi Batam	1,06	0,33	0,12	1,12	1,57	1,55	2,17	2,45	3,39	5,98	6,87	5,95

Sumber: BPS (data diolah)

Pada triwulan IV 2022, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri tercatat **5,83% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar **6,79% (yoy)**. Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Dari sisi domestik, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga energi. Di sisi eksternal, kenaikan suku bunga acuan di beberapa negara maju cukup berdampak pada konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku spekulatif dalam pemilihan barang konsumsi sehingga menekan laju inflasi.

Secara spasial, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri mengalami penurunan. Inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 6,87% (yoy) menjadi 5,95% (yoy) pada triwulan IV 2022. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan inflasi dari 6,12% (yoy) menjadi 4,96% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi nasional juga menurun dari 5,95% (yoy) menjadi sebesar 5,51% (yoy) pada triwulan IV 2022.

Pada bulan Desember 2022, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 1,11% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pada triwulan III 2022 yang sebesar 1,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi triwulan IV 2022 menurun dibandingkan triwulan III yaitu dari 6,79% (yoy) menjadi sebesar 5,83% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan Desember 2022 yakni angkutan udara, bayam, dan kangkung dengan andil secara berturut-turut 0,15%, 0,13%, dan 0,10%. Peningkatan harga komoditas angkutan udara terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan IV 2022 Regional Sumatera (yoy)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri Desember 2022 (% yoy)

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Angkutan Udara	Transportasi	0,15
2	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,13
3	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,10
4	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,10
5	Rokok Kretek Filter	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,08
6	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,08
7	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06
8	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,05
9	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
10	Ketimun	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,03

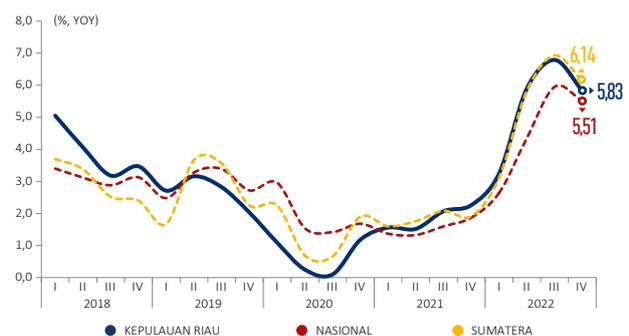
Sumber: BPS (data diolah)

sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar kota dan luar negeri.

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

3.1.1 Inflasi Tahunan

Inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat **5,83% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar **6,79% (yoy)**. Inflasi Kepri pada Desember 2022 bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi yang memberikan andil inflasi tahunan sebesar masing-masing sebesar 2,17% dan 2,05%. Peningkatan harga terutama terjadi pada bensin, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Harga bensin meningkat setelah resmi diumumkan oleh pemerintah pada September 2022 berdampak pada kenaikan kelompok transportasi terutama didorong oleh kenaikan tarif jasa angkutan udara dan bensin. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan harga bahan bahan avtur dunia yang didukung dengan penerapan aturan *fuel surcharge* sejak 18 April 2022 oleh Pemerintah, dan peningkatan *passenger service charge* (PSC) di beberapa bandara mulai 16 Juli 2022, di tengah normalisasi permintaan angkutan udara. Adapun kenaikan bensin terutama didorong oleh BBM bersubsidi yang mengalami penyesuaian harga oleh Pemerintah sejak 3 September 2022 seiring dengan peningkatan harga minyak dunia. Sementara harga rokok kretek filter meningkat sejalan dengan kenaikan cukai rokok tahun 2022 yang diterapkan produsen secara bertahap.



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2022

Tabel 3.3 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)

No	Kelompok	2021								2022							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi														
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,78	2,72	0,84	2,98	1,47	5,23	1,23	4,26	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,19	0,05	0,91	0,08	1,41	0,11	1,98	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,03	0,19	0,06	0,32	0,07	0,38	0,08	0,43	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,04	0,82	0,08	1,54	0,06	1,25	0,07	1,38	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94
5	Kesehatan	0,03	1,59	0,03	1,54	0,03	1,42	0,04	2,24	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31
6	Transportasi	0,13	1,12	-0,18	-1,43	0,08	0,70	0,15	1,20	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09	-1,49	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,91	0,03	1,51	0,02	1,06	0,03	1,39	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21
9	Pendidikan	0,19	3,14	0,19	3,14	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,26	3,30	0,24	3,00	0,24	3,03	0,37	4,71	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,15	2,36	0,17	2,56	-0,10	-1,42	0,08	1,23	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32
Umum		1,56		1,52		2,07		0,00		3,24		5,89		6,79		5,83	

Sumber: BPS (data diolah)

Inflasi pada kelompok transportasi yang mencapai 16,93% (yoy) dengan andil sebesar 2,05% merupakan inflasi tertinggi pada Desember 2022. Subkelompok yang mengalami inflasi tahunan tertinggi yaitu jasa angkutan penumpang sebesar 32,83% (yoy). Hal ini sejalan dengan inflasi bensin (1,01%), angkutan udara (0,08%), dan angkutan laut (0,06%). Selanjutnya, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 7,39% (yoy), memberikan andil sebesar 2,17% terutama pada makanan dan minuman yang tidak beralkohol seiring kenaikan permintaan masyarakat menjelang HBKN Nataru. Selanjutnya, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 6,32% (yoy) memberikan andil inflasi sebesar 0,41% terutama emas perhiasan, *shampo*, dan parfum. Adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 0,36%, terutama bersumber dari kenaikan tarif bahan bakar rumah tangga yang terdampak akibat penyesuaian harga BBM dan harga energi global.

Di sisi lain, terdapat 1 kelompok komoditas yang mengalami deflasi sebesar -0,30% (yoy) dan memberikan andil deflasi serta menahan kenaikan inflasi tahunan yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil sebesar -0,02%. Subkelompok yang mengalami deflasi secara tahunan yaitu subkelompok jasa keuangan (3,14%) dan subkelompok peralatan informasi dan komunikasi (2,96%). Deflasi terutama karena disebabkan oleh penurunan biaya administrasi transfer uang sejalan dengan implementasi dan perluasan penggunaan BI-FAST oleh perbankan yang memberikan biaya lebih rendah, serta harga telepon seluler yang menurun seiring dengan penurunan permintaan sejalan dengan aktivitas *work from distance* yang semakin longgar.

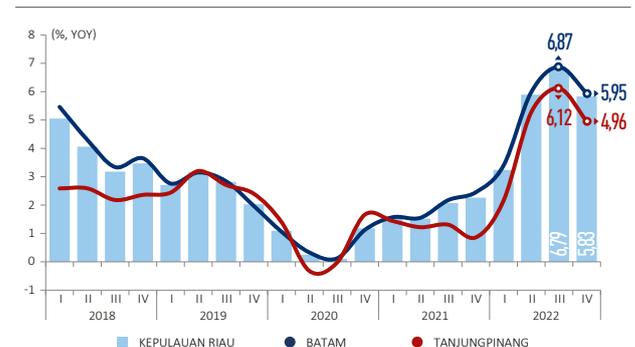
3.1.2 Inflasi Triwulanan

Inflasi gabungan 2 kota IHK di Kepri pada triwulan IV 2022 menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 1,17% (qtq) menjadi 0,83% (qtq) sejalan meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi yang sempat meningkat pada triwulan sebelumnya. Kelompok komoditas

yang mengalami inflasi triwulanan tertinggi pada triwulan IV 2022 yakni kelompok perawatan pribadi (2,07%), kelompok transportasi (1,68%), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,04%); masing-masing sebesar 0,13%, 0,22% dan 0,31%. Secara umum inflasi triwulanan didorong oleh peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya permintaan makanan dan minuman. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok perawatan pribadi didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, *shampo*, dan parfum, dengan andil inflasi tertinggi yaitu emas perhiasan sebesar 0,05%.

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA

Secara spasial, 2 kota IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam dan Tanjungpinang pada triwulan IV 2022 mencatatkan inflasi. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 5,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,87% (yoy). Sementara itu, inflasi Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan menjadi sebesar 4,96% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,12% (yoy). Inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri menunjukkan inflasi sebesar 5,83% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,79% (yoy).



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjungpinang (yoy)

Tabel 3.4 Inflasi Triwulanan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa

No	Kelompok	2021								2022							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi														
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,11	0,38	-0,14	-0,47	0,25	0,88	1,00	3,45	0,32	1,10	1,90	6,44	-0,38	-1,24	0,31	1,04
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,18	0,04	0,73	0,03	0,56	0,03	0,49	0,06	1,07	0,02	0,30	-0,03	-0,50	0,03	0,56
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,00	0,02	0,14	0,03	0,17	0,02	0,12	0,09	0,50	0,05	0,31	0,10	0,58	0,11	0,64
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,01	-0,15	0,04	0,82	0,01	0,14	0,03	0,56	0,15	3,12	0,06	1,17	0,02	0,43	0,01	0,16
5	Kesehatan	0,03	1,38	0,00	0,10	0,01	0,34	0,01	0,42	0,00	0,17	0,00	-0,16	0,00	0,13	0,00	0,17
6	Transportasi	-0,27	-2,17	0,06	0,46	-0,13	-1,07	0,48	4,08	0,00	-0,02	0,50	4,17	1,27	10,41	0,22	1,68
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	-0,09	-0,02	-0,28	0,01	0,10	-0,01	-0,11	0,00	0,00
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,01	0,49	0,02	0,88	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,13	0,04	1,75	0,01	0,27	0,00	0,05
9	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,76	0,00	0,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,21	2,70	0,02	0,23	0,01	0,08	0,13	1,64	0,14	1,78	0,13	1,62	0,02	0,27	0,01	0,11
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,10	-1,49	0,12	1,89	0,01	0,17	0,04	0,67	0,20	3,11	0,06	0,93	0,01	0,10	0,13	2,07
	Umum	0,00		0,19		0,32		1,74		0,95		2,77		1,17		0,83	

Sumber: BPS (data diolah)

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan IV 2022 mengalami inflasi sebesar 5,95 % (yoy) atau 1,14% (mtm). Inflasi di Kota Batam pada triwulan IV 2022 disebabkan oleh kelompok transportasi naik sebesar 17,31% (yoy), kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 7,61% (yoy), dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 6,44% (yoy). Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau didorong oleh peningkatan harga bayam, telur ayam ras, kangkung, rokok kretek filter, dan cabai merah. Selanjutnya, inflasi pada kelompok transportasi terutama angkutan udara didorong oleh peningkatan permintaan terhadap jasa transportasi udara menjelang HBKN Nataru sejalan dengan pelonggaran mobilitas masyarakat. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh gangguan cuaca akibat kondisi curah hujan yang cenderung tinggi pada bulan Oktober hingga puncak curah hujan pada Desember 2022 sehingga menyebabkan gangguan pada pola tanam. Di samping itu kebutuhan telur ayam ras meningkat menjelang HBKN Nataru. Sementara inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil sebesar 0,06%.

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan IV 2022 mengalami inflasi sebesar 4,96% (yoy) atau 0,85% (mtm). Inflasi di Kota Tanjungpinang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan sebagian besar kelompok pengeluaran terutama pada kelompok transportasi sebesar 14,01% (yoy), kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,78% (yoy), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,35% (yoy). Andil inflasi secara tahunan pada kelompok transportasi dan memberikan andil inflasi sebesar 1,65% yang didominasi oleh subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi, dan jasa angkutan penumpang. Andil inflasi secara tahunan, kelompok makanan minuman memberikan andil

inflasi terhadap IHK Kota Tanjungpinang sebesar 1,30% dengan subkelompok rokok dan tembakau merupakan yang tertinggi dengan andil 8,68%. Adapun andil inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, sabun mandi cair, shampo, pembalut wanita, popok bayi sekali pakai/diapers, deodorant, dan sabun wajah.

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil inflasi sebesar 0,70% didorong oleh peningkatan harga bayam, cabai merah, kangkung, cabai rawit, telur ayam ras, sawi hijau, daging ayam ras, minyak goreng, cabai hijau, ketimun, kacang panjang, sotong, tomat, dan terong. Selain itu, komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam sepanjang periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 yaitu bensin, angkutan udara, dan rokok kretek filter.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 diperkirakan berada di atas rentang target sasaran inflasi 2022 yakni $3 \pm 1\%$, namun cenderung bias ke bawah mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga yang menunjukkan penurunan. Tekanan inflasi diperkirakan masih akan terjadi pada triwulan I 2023 terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada triwulan I 2023, beberapa risiko peningkatan harga ke depan yang perlu diwaspadai antara lain: (i) kenaikan harga beberapa komoditas pangan global; (ii) kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk rokok mulai 1 Januari 2023; (iii) peningkatan mobilitas masyarakat.

Tabel 3.5 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	IV - 2021			I - 2022			II - 2022			III - 2022			IV - 2022		
	Kepri	Batam	Tj. Pinang												
Umum	2,26	2,45	0,86	3,24	3,39	2,15	5,89	5,98	5,27	6,79	6,87	6,12	5,83	5,95	4,96
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,23	1,37	0,22	1,45	1,57	0,58	3,54	3,60	3,10	2,88	2,92	2,58	2,17	2,24	1,65
Pakaian dan Alas Kaki	0,11	0,11	0,07	0,16	0,17	0,05	0,13	0,15	0,03	0,08	0,08	0,04	0,08	0,08	0,04
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,08	0,08	0,09	0,17	0,15	0,31	0,20	0,18	0,34	0,27	0,23	0,53	0,36	0,32	0,59
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,07	0,06	0,10	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,28	0,27	0,27	0,25	0,24	0,25	0,18
Kesehatan	0,04	0,04	0,05	0,02	0,01	0,09	0,02	0,01	0,09	0,01	0,00	0,07	0,01	0,00	0,05
Transportasi	0,15	0,18	-0,07	0,41	0,43	0,26	0,87	0,90	0,69	2,33	2,40	1,85	2,05	2,11	1,65
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06
Pendidikan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,17	0,17	0,13	0,17	0,17	0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,37	0,40	0,16	0,31	0,33	0,11	0,42	0,45	0,22	0,44	0,46	0,29	0,31	0,31	0,31
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,08	0,08	0,12	0,39	0,39	0,37	0,33	0,32	0,37	0,32	0,32	0,35	0,41	0,43	0,32

Sumber: BPS (data diolah)

Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan I 2023 diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan permintaan yang didorong oleh momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta diiringi oleh mobilitas masyarakat yang semakin membaik. Kenaikan harga beberapa komoditas pangan seiring kenaikan harga pangan global, biaya logistik dan transportasi yang mengalami kenaikan, kondisi cuaca akhir tahun khususnya angin musim utara yang berpotensi mengganggu produksi. Peningkatan harga sayur-sayuran dan aneka cabai didorong oleh penurunan pasokan akibat kondisi curah hujan tinggi pada awal tahun 2023 (Januari-Februari 2023). Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi melalui GNPIP diharapkan mampu menambah pasokan dan mengintervensi harga melalui kegiatan stabilisasi harga.

Tekanan inflasi pada barang tahan lama terindikasi berkurang dikarenakan dampak penyesuaian suku bunga. Tekanan inflasi kelompok transportasi diperkirakan menurun sejalan normalisasi tarif angkutan udara dan juga penurunan harga BBM non subsidi sejalan dengan normalisasi harga minyak global. Permintaan tiket angkutan udara yang tinggi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Harga dapat terkendali apabila dilakukan normalisasi permintaan angkutan udara seiring bertambahnya jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai. Kenaikan harga emas akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, potensi kenaikan barang kebutuhan tahan lama yang biasanya mengalami penyesuaian di awal tahun. Berdasarkan hasil Liaison rata-rata produsen sudah melakukan *price in* kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik yang mendorong Inflasi Kepri melebihi target sasaran inflasi nasional. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan IV 2022 yakni:

1. **Melaksanakan sinergi dan koordinasi program dengan Pemerintah Kabupaten Natuna**
 - a) **Pendalaman potensi produksi bahan pangan** yang dilakukan di Kabupaten Natuna terkait potensi lahan pertanian yang dapat menjadi salah satu klaster pangan yang dapat menjadi *buffer* pasokan cabai merah di Provinsi Kepri saat harga melonjak. Sinergi dilakukan dengan pembinaan yang diawali dengan pembentukan kelompok melalui fasilitasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga menjadi wadah penyaluran ilmu dan pengalaman kepada petani cabai merah.
 - b) **Monitoring implementasi GNPIP** pasca penyerahan 1.000 paket bibit cabai dan pupuk kepada kelompok wanita tani agar dapat menambah pasokan untuk normalisasi harga cabai di Natuna.
 - c) **Pendampingan penyusunan laporan TPID Kabupaten Natuna** yang terdiri dari laporan triwulanan dan pengisian *self assessment* dan *One Page Summary* (OPS).
 - d) **Mendorong pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian inflasi Kabupaten Natuna** secara berkala yang dipimpin oleh kepala daerah yang menghasilkan tindakan lanjut yang konkret dan terdokumentasi dalam risalah rapat.

2. **Stabilisasi harga pangan dilakukan melalui kegiatan sidak pasar** yang dilaksanakan pada 23 November 2022. Berdasarkan informasi dari beberapa pedagang, persediaan bahan pokok penting secara umum relatif lancar dan diperkirakan masih mencukupi hingga akhir tahun. Harga daging ayam ras, bawang merah, minyak goreng, daging sapi, dan gula pasir masih berada pada harga normal. Harga ikan tongkol lebih rendah dari biasanya karena pasokan banyak. Sementara harga komoditas sayuran seperti wortel, kol, cabai merah cukup tinggi karena keterbatasan pasokan dari Jawa dan Pontianak.
3. **Melakukan *capacity building* kepada pelaksana pelaporan TPID** Provinsi Kepri, dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada 5-6 Desember 2022. *Capacity building* bertujuan peningkatan *awareness* dalam pengisian *self asesement* dan penulisan *One Page Summary* (OPS) untuk pencapaian TPID Award pada periode ke depan.

Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan produktivitas petani/peternak/nelayan melalui program penguatan kelembagaan petani/peternak/nelayan, perluasan lahan pertanian, pengembangan sentra produksi pangan, menerapkan teknik budidaya yang teruji antara lain, Program Lipat Ganda (Proliga), menerapkan metode pertanian organik, menerapkan *integrated farming* yang menghubungkan peternakan dan pertanian, akselerasi *urban farming*/program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan penerapan *digital farming*. Selain itu, TPID juga terus mendorong diversifikasi penggunaan pupuk organik, serta memfasilitasi *business matching* antara produsen/petani/peternak/nelayan dengan agregator/pembeli dan lembaga pembiayaan.



BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Asset* (yoy)



Tw IV
2022

10,41%
Rp 83,14T



Tw III
2022

6,09%
Rp 78,31T

Kredit* (yoy)



Tw IV
2022

11,77%
Rp 44,88T



Tw III
2022

11,83%
Rp 42,98T

Kredit** (yoy)



Tw IV
2022

8,66%
Rp 64,86T



Tw III
2022

11,85%
Rp 63,13T

Dana* (yoy)



Tw IV
2022

10,05%
Rp 72,87T



Tw III
2022

3,15%
Rp 66,05T

LDR*



Tw IV
2022

61,58%



Tw III
2022

65,08%

NPL*



Tw IV
2022

1,91%



Tw III
2022

3,41%

UMKM



Tw IV
2022

12,30%
Rp 11,60T



Tw III
2022

15,42%
Rp 11,22T

* dari bank yang berlokasi di Kepri,

** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Secara umum, kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan IV 2022 masih terjaga sejalan dengan tren perbaikan kondisi perekonomian yang terus berlanjut. Perbaikan perekonomian Kepri tercermin dari laju penyaluran kredit dan DPK, disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, UMKM, maupun kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%).



Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

	"2020 (Rp Triliun)"				"2021 (Rp Triliun)"				2022 (Rp Triliun)				Pertumbuhan (%, YoY)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw III 2022	Tw IV 2022
Total Aset*	65,76	66,35	69,28	69,23	70,28	72,47	73,82	75,31	75,92	77,37	78,31	83,14	6,09%	10,41%
Total Dana*	57,81	58,42	60,94	61,00	61,88	63,16	64,03	66,21	64,53	67,61	66,05	72,87	3,15%	10,05%
Total Kredit*	38,59	37,28	37,56	37,62	37,63	37,97	38,44	40,15	39,94	41,52	42,98	44,88	11,83%	11,77%
Total Kredit**	52,34	51,66	51,11	51,23	53,33	58,01	56,44	59,69	59,35	61,92	63,13	64,86	11,85%	8,66%
NPL*	4,27%	4,16%	4,22%	4,07%	4,16%	3,71%	3,63%	2,98%	2,97%	2,90%	3,41%	1,91%	-	-
LDR*	66,75%	63,81%	61,63%	61,67%	60,81%	60,11%	60,03%	60,63%	61,89%	61,41%	65,08%	61,58%	-	-

Sumber: Bank Indonesia
***) dari bank yang berlokasi di Kepri.
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Sejalan pertumbuhan ekonomi yang membaik, kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2022 terus mengalami pertumbuhan, tercermin dari penyaluran kredit dan jumlah DPK yang masih tinggi. Penyaluran kredit oleh bank yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 11,77% (yoy), atau relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Kepri tumbuh sebesar 10,05% (yoy), lebih tinggi 6,91% poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan dana yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit berdampak pada penurunan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank yang berlokasi di Provinsi Kepri menjadi 61,58% dari triwulan sebelumnya sebesar 65,08%. Di tengah pertumbuhan kredit yang sudah mulai pulih, kualitas penyaluran kredit yang tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sedikit menurun dari periode sebelumnya dari 3,14% menjadi 1,91%, masih di bawah ambang batas 5%.

Kinerja positif juga terjadi pada penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun risiko kredit tetap terjaga. Penyaluran kredit kepada UMKM yang berlokasi di Kepri pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 12,30% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,42% (yoy). Namun demikian risiko kredit sebagaimana tercermin dari rasio NPL kredit UMKM pada triwulan IV 2022 tetap rendah sebesar 1,63%, dan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,38%. Perbaikan kinerja

penyaluran kredit pada sektor UMKM turut didorong oleh pembukaan sektor pariwisata.

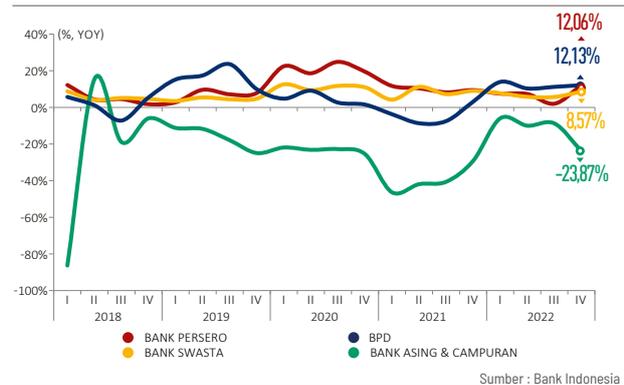
4.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Kepri pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 8,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,85% (yoy). Demikian halnya secara lokasi bank, kredit yang disalurkan oleh perbankan di Kepri tumbuh 11,77% (yoy) sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya (11,83% yoy). Penyaluran kredit lokasi proyek terutama tertahan oleh penyaluran kredit pada lapangan usaha (LU) Real Estate, Sewaan dan Jasa PT; serta LU Industri Pengolahan. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan kredit didorong oleh kredit investasi dan konsumsi.

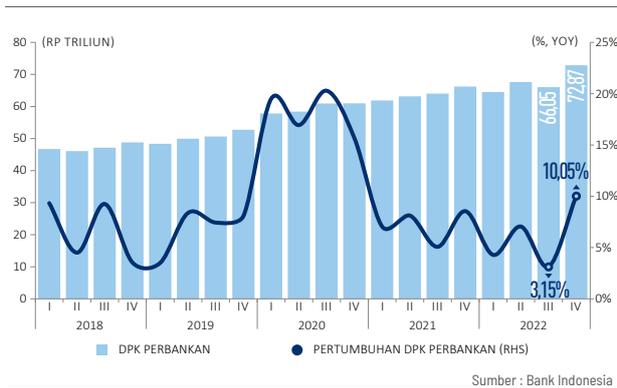
Sementara itu, aset perbankan tumbuh sebesar 10,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,09% (yoy). Demikian halnya jumlah DPK tumbuh sebesar 10,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,15% (yoy). Pertumbuhan tersebut bersumber dari tabungan yang tumbuh lebih tinggi dari 7,62% (yoy) menjadi 8,23% (yoy), giro tumbuh lebih tinggi dari 15,80% (yoy) menjadi 24,46% (yoy) serta deposito yang mengalami kontraksi namun membaik dari -21,67% menjadi -4,72% (yoy). Sementara itu, kemampuan pelaku usaha untuk membayar angsuran kredit relatif meningkat sebagaimana tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio NPL gross) yang menurun dari 3,41% menjadi 1,91%.



Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank



Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan

4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

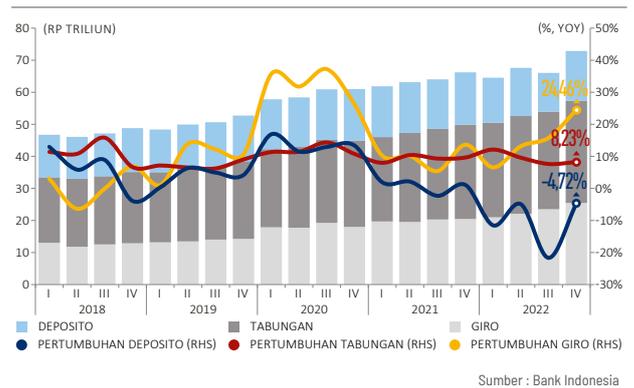
Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 berjumlah Rp83,14 triliun atau tumbuh 10,41% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 6,09% (yoy). Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok Bank Persero dan Bank Swasta yang tumbuh masing-masing sebesar 12,06% (yoy) dan 8,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 2,00% (yoy) dan 5,69% (yoy). Di sisi lain, kelompok Bank Asing dan Campuran mengalami kontraksi yang lebih dalam dari -8,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -23,87% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Bank Persero (46,99%), diikuti oleh kelompok Bank Swasta Nasional yakni sebesar 46,33%, BPD (6,65%) serta Bank Asing dan Campuran (0,03%).

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan IV 2022, jumlah DPK di Kepri berjumlah Rp72,87 triliun atau tumbuh 10,05% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,15% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada jenis giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 24,46% (yoy) dan 8,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 15,80% (yoy) dan 7,62% (yoy). Namun demikian struktur DPK pada triwulan IV 2022 masih didominasi tabungan dengan pangsa sebesar 43,71%, diikuti giro 34,95% dan deposito 21,34%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.



Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan

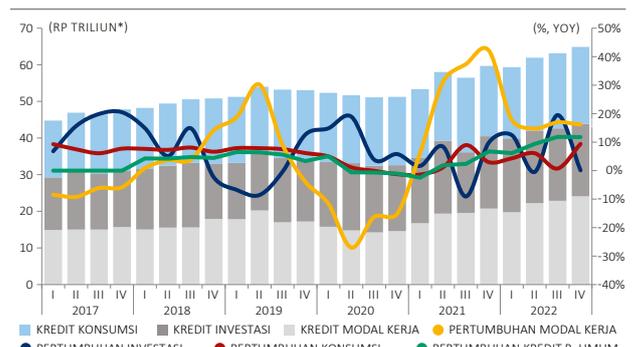


Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan

4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Kepri pada triwulan IV 2022 sebesar Rp64,86 triliun atau tumbuh 8,66% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,85% (yoy). Perlambatan terutama bersumber dari kredit investasi yang mengalami melambat dari 19,46% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 0,09% (yoy) pada triwulan IV 2022, disusul oleh penurunan pertumbuhan kredit modal kerja dari 16,93% pada triwulan III 2022 menjadi 16,18% (yoy) pada triwulan IV 2022. Perlambatan lebih lanjut tertahan oleh akselerasi pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 9,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,74% (yoy). Perlambatan kredit sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit serta kehati-hatian dari pelaku usaha dalam melakukan usaha. Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan IV 2022 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 37,15%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 32,37% dan kredit investasi 30,49%.

Pada triwulan IV 2022, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,71%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 8,62%. Peningkatan tersebut sejalan dengan pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga acuan. Peningkatan suku bunga terjadi pada kredit konsumsi dari sebesar 9,62% menjadi 9,77%. Selain itu, rata-rata tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja juga meningkat dari masing-masing 8,20% dan 8,09%, menjadi masing-masing sebesar 8,30% dan 8,10%. Peningkatan juga terjadi pada suku bunga simpanan (DPK) terutama

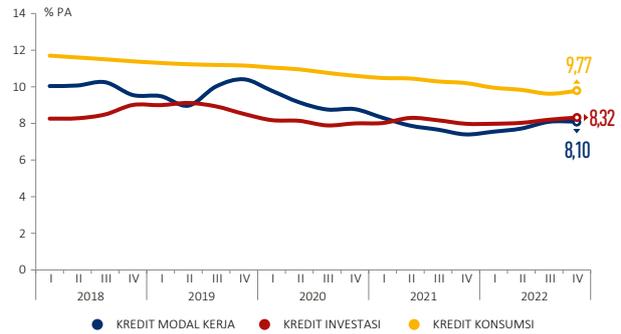


Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



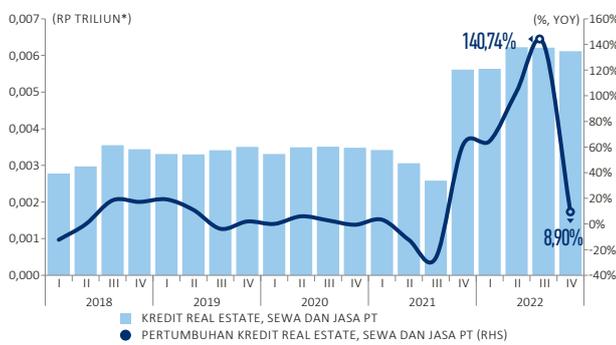
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



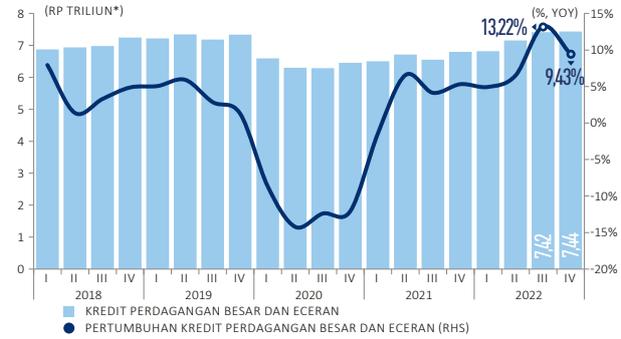
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9 Kredit Sektor Real Estate, Sewa dan Jasa PT



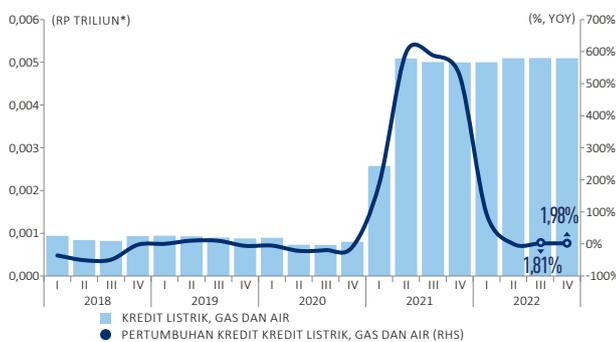
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10 Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

pada giro dan deposito. Rata-rata suku bunga giro dan deposito pada triwulan berjalan masing-masing tercatat sebesar 1,21% dan 2,79%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 1,19% dan 2,62%.

Secara sektoral, penyaluran kredit pada Lapangan Usaha (LU) Real Estate, Sewa dan Jasa PT, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Industri Pengolahan tumbuh melambat. Kredit pada ketiga sektor tersebut pada triwulan IV 2022 tumbuh melambat masing-masing sebesar 8,90% (yoy), 9,43% (yoy), dan 17,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2022.

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Kepri masih terkonsentrasi di wilayah Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan IV 2022 sebesar Rp50,60 triliun atau 78,01% dari total kredit di Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 9,81% dari total kredit atau sebesar Rp6,37 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,68% dari total kredit atau sebesar Rp3,03 triliun.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

KABUPATEN/KOTA	Triwulan IV 2022	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	50,60	78,01%
Tanjungpinang	6,37	9,81%
Karimun	3,03	4,68%
Lingga	0,60	0,92%
Natuna	1,35	2,08%
Bintan	2,62	4,04%
Kep. Anambas	0,29	0,45%
Kepulauan Riau	64,86	100,00%

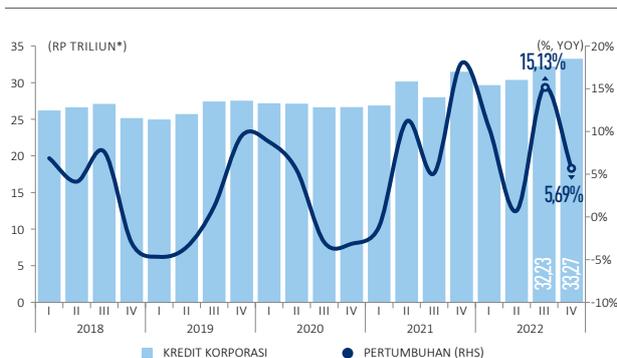
Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan IV 2022 mengalami pelonggaran menjadi sebesar 61,58%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 65,08%. Penurunan rasio tersebut didukung oleh pertumbuhan DPK yang cukup tinggi di tengah kondisi perekonomian yang terus mengalami pemulihan sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat sebesar 1,91% lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,41%.

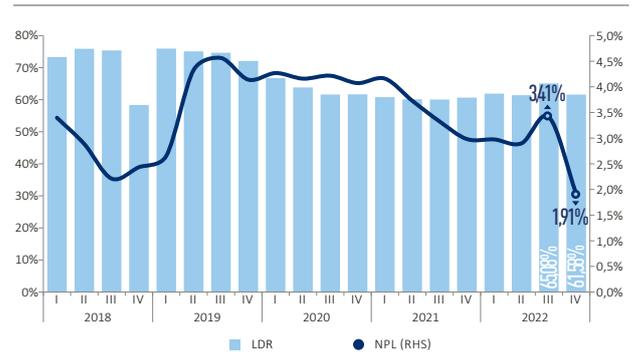
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Peningkatan kinerja sektor korporasi tersebut kemudian berpengaruh terhadap ketahanan sektor rumah tangga khususnya rumah tangga pekerja pada sektor industri. Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM mengalami perbaikan disertai dengan risiko kredit yang tetap terjaga sejalan dengan peningkatan kemampuan bayar pelaku usaha.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.14 Perkembangan Kredit Korporasi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.13 Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri

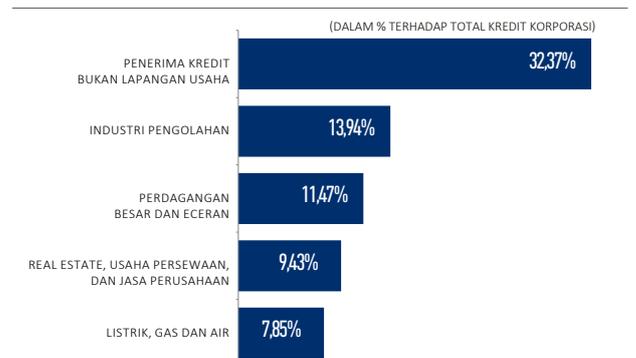
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami percepatan sejalan dengan perekonomian yang terus mengalami pemulihan. Pada triwulan IV 2022, penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp33,27 triliun atau tumbuh 5,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp32,23 triliun.

Kualitas penyaluran kredit korporasi tercermin dari *Non Performing Loan (NPL)* masih terjaga di bawah 5% yakni sebesar 4,26% meski meningkat dari triwulan sebelumnya 4,04%. Peningkatan NPL kredit korporasi terutama bersumber dari LU Konstruksi, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Industri Pengolahan yang memiliki NPL masing-masing sebesar 9,63%; 4,59% dan 7,24%.

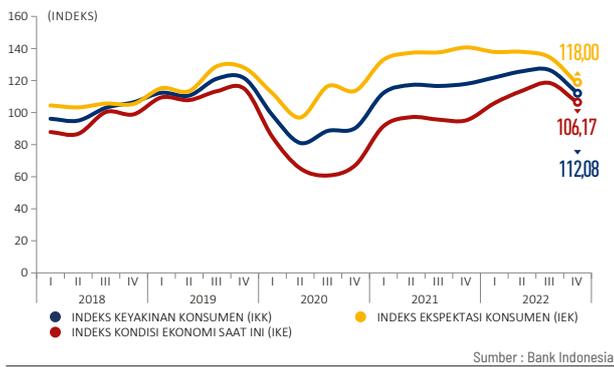
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga semakin kuat ditopang oleh meningkatnya kredit konsumsi dan tingkat penghasilan rumah tangga. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen yang mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan UMR pada tahun 2022. Peningkatan juga terjadi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang masih terjaga optimis (>100) dan meningkat dari triwulan sebelumnya.

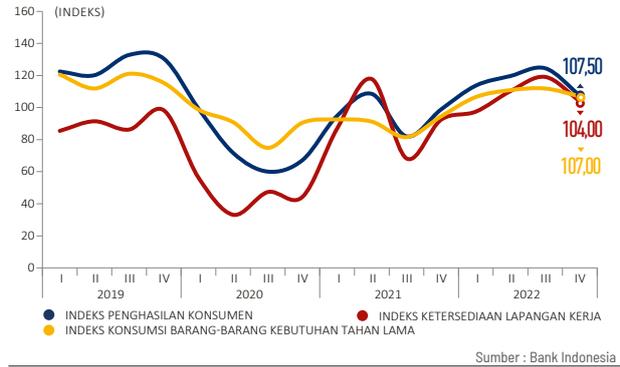


Sumber: Bank Indonesia

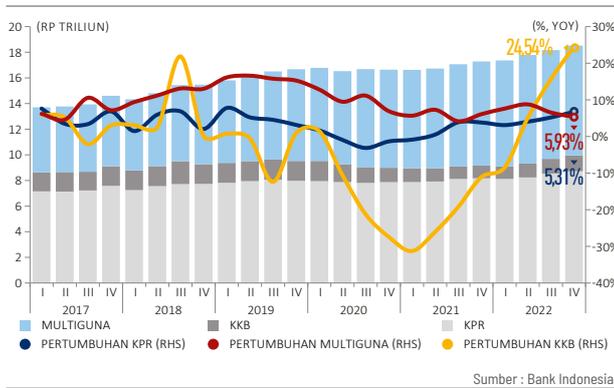
Grafik 4.15 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)



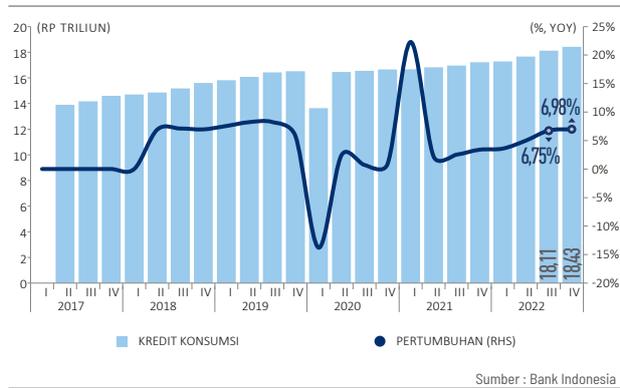
Grafik 4.16 Survei Konsumen



Grafik 4.17 Survei Konsumen



Grafik 4.18 Kredit Rumah Tangga



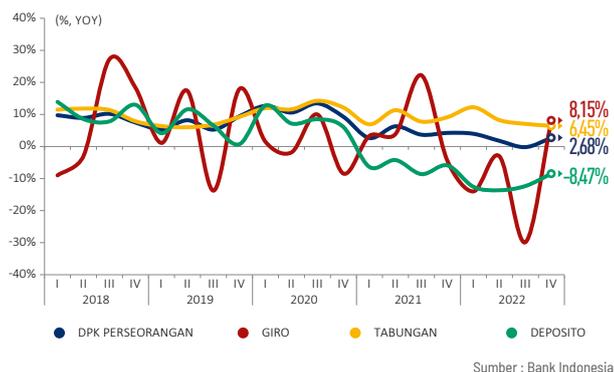
Grafik 4.19 Kredit Konsumsi

Sejalan dengan kenaikan Indeks Penghasilan Konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga mengalami peningkatan. Kredit Rumah Tangga (RT) tumbuh sebesar 9,37 % (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,08% (yoy). Percepatan pertumbuhan ini terjadi pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang pada triwulan IV 2022 masing-masing tumbuh 24,54% (yoy) dan 6,75% (yoy). Sementara kredit Multiguna tumbuh sebesar 6,31% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 2,86% (yoy). Pertumbuhan kredit rumah tangga juga turut disebabkan oleh penyaluran kredit Peralatan Rumah Tangga dan lainnya yang mengalami perbaikan cukup signifikan.

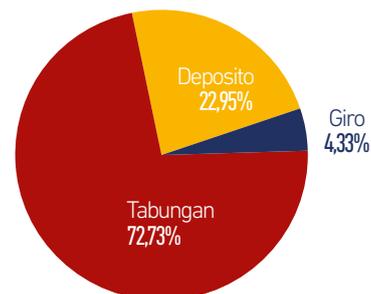
Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,68% (yoy), lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,19% (yoy). Akselerasi pertumbuhan DPK perseorangan terutama terjadi pada giro yang tumbuh sebesar 8,15% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 29,84% (yoy). Selain itu, deposito mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 12,33% (yoy) menjadi kontraksi sebesar 8,47% (yoy). Sementara itu, tabungan mengalami perlambatan dari sebesar 7,05% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 6,45% pada triwulan IV 2022.

Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 72,73%, diikuti deposito 22,95% dan giro 4,33%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.



Grafik 4.20 DPK Perseorangan



Grafik 4.21 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

KATEGORI	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit Rumah Tangga	1,90%	1,82%	2,10%	2,08%	2,03%	2,02%	2,03%	1,84%	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%
Kredit Pemilikan Rumah	3,18%	3,33%	3,12%	3,11%	3,07%	3,00%	2,92%	2,63%	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,92%	1,87%	2,20%	1,77%	1,42%	1,91%	1,68%	1,03%	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	1,64%	2,75%	3,65%	2,17%	2,56%	2,54%	2,06%	2,21%	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%
Kredit Multiguna	0,80%	0,90%	0,99%	0,95%	1,08%	1,09%	1,19%	1,17%	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1,50%	1,44%	1,84%	1,55%	1,78%	1,79%	1,91%	1,80%	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%

Sumber: Bank Indonesia

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,87% menjadi 1,61% pada triwulan IV 2022. NPL kredit rumah tangga masih terjaga di bawah 5%. Penurunan NPL terutama terjadi pada Kredit Pemilikan Rumah dari 2,57% menjadi 2,28%, NPL Kredit Kendaraan Bermotor dari 0,55% menjadi 0,45%, NPL Kredit Peralatan Rumah Tangga dari 1,12% menjadi 0,79%, dan NPL Multiguna dari 1,42% menjadi 1,26%.

4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu pilar pendukung ketahanan perekonomian Indonesia. Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan IV 2022 mengalami perlambatan namun risiko kredit tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2022 tumbuh positif sebesar 12,30% (yoy) namun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 15,42% (yoy). Namun demikian risiko kredit sedikit mengalami peningkatan tercermin dari peningkatan rasio NPL kredit UMKM yang meningkat dari sebesar 1,38% menjadi 1,63%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 17,88%, naik tipis dari triwulan sebelumnya sebesar 17,78%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut masih lebih rendah dari 20% sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi pada LU Perdagangan Besar & Eceran yakni sebesar 47,27%, diikuti LU Industri Pengolahan memiliki pangsa sebesar 8,80% dan LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 8,78%. Adapun pangsa penyaluran kredit UMKM pada LU lainnya masing-masing masih < 10%.

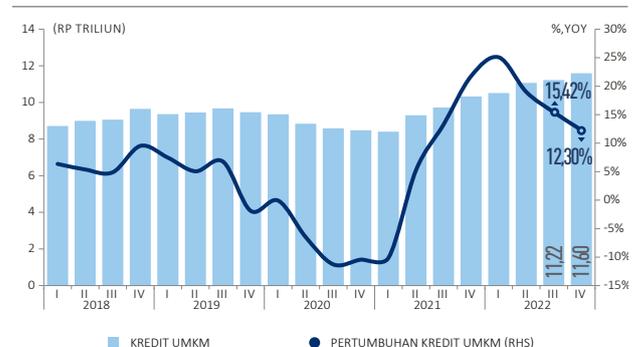
Perlambatan kredit UMKM pada triwulan IV 2022 bersumber dari Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi sebesar -2,45% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,88% (yoy). Selain itu, LU Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi juga tercatat tetap kontraksi sebesar -14,36% (yoy). Adapun LU Perdagangan Besar dan

Eceran yang merupakan sektor dengan pangsa dominan, mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar 24,49% (yoy) menjadi 21,75%.

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada tahun 2022, Pemerintah memutuskan menaikkan plafon KUR Nasional sebesar Rp373,17 triliun dengan subsidi bunga 3% hingga Juni 2022. Plafon kredit tersebut mengalami kenaikan sebesar 30,9% dari plafon tahun 2021 sebesar Rp285 triliun.

Dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makprudensial (RPIM). Pembiayaan Inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam rupiah dan valuta asing.

Secara khusus Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Bank Indonesia telah memberikan dukungan dengan penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara keberkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.22 Perkembangan Kredit UMKM



BOKS 2

SEKTOR UMKM DAN EKONOMI SYARIAH SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN NASIONAL

A. PENGEMBANGAN UMKM BANK INDONESIA

Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang besar dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%⁽¹⁾. Keberadaan UMKM sebagai kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini mendapatkan perhatian dari pemerintah termasuk Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Bank Indonesia menjalankan pengembangan UMKM dengan tujuan mendorong UMKM berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pentingnya perekonomian yang inklusif ini semakin diperkuat dengan arahan presiden yang menargetkan rasio pembiayaan kepada pelaku UMKM mencapai 30% pada tahun 2024.

Strategi pengembangan UMKM Bank Indonesia dijalankan melalui 3 (tiga) pilar, yaitu: **(i) Korporatisasi**, meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, perluasan kemitraan, dan inovasi produk/proses; **(ii) Kapasitas**, yaitu peningkatan keahlian, penguatan daya saing, dan perluasan akses pasar melalui berbagai pelatihan dan fasilitasi; serta **(iii) Pembiayaan**, meliputi peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan infrastruktur keuangan, dan penyaluran pembiayaan sesuai skala usaha. Ketiga pilar tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pengembangan kepada UMKM binaan maupun mitra.

Beberapa program pengembangan UMKM yang dijalan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPwBI Kepri), antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Klaster Ketahanan Pangan

Klaster pangan menjadi prioritas UMKM sasaran program dari Bank Indonesia sebagai pendukung pengendalian inflasi pangan di daerah. Keberadaan klaster pangan menjadi semakin signifikan setelah *launching* Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang salah satu fokusnya adalah peningkatan produksi pangan lokal. Pengembangan klaster pangan dilakukan di antaranya melalui pemanfaatan metode budidaya Produksi Lipat Ganda (Proliga) bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Prov. Kepulauan Riau di demplot lahan klaster binaan dengan **total luasan 3,25 Ha di Kota Batam dan Kab. Karimun dan berdampak pada peningkatan produktivitas mencapai 25%**. Di samping itu, telah diimplementasikan *digital*

farming di sisi hulu untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi biaya produksi melalui pengontrolan terukur terhadap iklim dan kondisi tanah dengan teknologi sensor tanah dan cuaca. Dampak dari implementasi *digital farming* tersebut adalah **peningkatan produktivitas sebesar 8% serta penurunan biaya total pengolahan dan pemeliharaan sebesar 10%**.

2. Digitalisasi UMKM

Transaksi digital terus mengalami peningkatan terutama pada masa pandemi ketika konsumen membutuhkan layanan yang cepat, praktis, dan aman. Hal ini menjadi peluang yang harus dapat dioptimalkan oleh UMKM. Melihat hal ini, KPwBI Kepri melaksanakan *onboarding* UMKM digital yang merupakan pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM untuk masuk dalam *platform* pemasaran digital. Pada tahun 2022, terdapat **38 UMKM peserta yang mencatatkan transaksi senilai Rp5,2 miliar selama 6 (enam) bulan masa pendampingan**.

3. Perluasan Akses Pasar dan Ekspor

Secara geografis, Kepulauan Riau memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. UMKM di Kepri berpeluang untuk memasarkan produknya hingga di pasar ekspor. Pada tahun 2022, UMKM binaan KPwBI Kepri mencatatkan **transaksi ekspor senilai Rp521,5 miliar ke Singapura, Malaysia, dan Tiongkok**. Selain itu, KPwBI Kepri juga melaksanakan kegiatan *showcasing* untuk menampilkan produk-produk unggulan UMKM. Salah satunya adalah ***showcasing* UMKM dalam event Gebyar Melayu Pesisir / Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang mencatatkan transaksi senilai sebesar Rp8,15 miliar dari 250 UMKM merchant QRIS**.

4. Pembiayaan UMKM

Dalam rangka mendukung arahan Presiden yang menargetkan rasio kredit kepada pelaku UMKM mencapai 30% pada tahun 2024, KPwBI melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Di antaranya melalui fasilitasi *business matching* pembiayaan antara UMKM dengan perbankan. Pada tahun 2022, tercatat **penyaluran pembiayaan melalui fasilitasi sebesar Rp1,35 miliar kepada UMKM binaan dan mitra KPwBI Kepulauan Riau**.

5. Pendampingan Kelompok Subsistence

KPwBI Kepri melakukan pendampingan kepada kelompok *subsistence* (pra-sejahtera) yang merupakan level paling dasar dari kategorisasi UMKM Bank Indonesia. Pendampingan tersebut difokuskan pada edukasi/literasi keuangan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan manajemen usaha. Pada tahun 2022, KPwBI Kepri mendampingi 4 (empat) kelompok *subsistence* yang menjalankan usaha di bidang pertanian, perikanan, dan batik.

B. PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Bank Indonesia memberikan perhatian dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Kekuatan dan peluang ekonomi syariah tersebut ditunjukkan dari hasil The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia⁽²⁾. GIEI tersebut mengukur perkembangan ekonomi syariah dari 5 (lima) sektor utama, yaitu: keuangan syariah, *halal food*, wisata ramah muslim, *modest fashion*, media/hiburan, dan farmasi/kosmetik halal). Strategi Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dilakukan melalui pemberdayaan pelaku usaha syariah di antaranya pondok pesantren dan pelaku UMKM syariah.

1. Program Kemandirian Ekonomi Pesantren

Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan keahlian; (2) sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pembentukan karakter dan kaderisasi ulama; serta (3) sebagai lembaga sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut dibutuhkan sumber daya yang tidak kecil baik sumber daya manusia maupun sumber daya material. Dalam memenuhi sumber daya yang dibutuhkan, pondok pesantren dituntut untuk dapat mandiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Sehingga, kemandirian ekonomi pesantren merupakan hal yang penting untuk dapat dikembangkan.

Bank Indonesia memberikan dukungan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren tersebut melalui berbagai program pendampingan dan dukungan sarana prasarana (sarpas). Sejak tahun 2017, KPwBI Kepri telah memberikan dukungan sarpras kepada 9 (sembilan) pesantren di Kota Batam dan Bintan. Dukungan tersebut diberikan dalam rangka mengakselerasi perkembangan unit bisnis yang telah dijalankan oleh pesantren. Di antaranya adalah usaha pengolahan kepala, pertanian hidroponik, budidaya ikan, rumah pemorongan hewan, jasa catering, konveksi, budidaya maggot, dan pengolahan air minum. Usaha yang dijalankan tersebut utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren serta dikembangkan lebih lanjut sebagai unit bisnis yang memberikan pemasukan tambahan bagi pesantren.

Kemandirian ekonomi pesantren semakin diperkuat setelah pembentukan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren)

pada tahun 2021 dengan anggota sejumlah 14 pesantren hingga saat ini. Hebitren berpotensi sebagai ekosistem bisnis antara pesantren. HEBITREN dapat menjadi kolaborator dan penghubung antara unit bisnis yang dijalankan oleh masing-masing pesantren. Di sisi lain, Hebitren dapat memberikan keuntungan bagi pesantren anggota dengan kemitraan yang dijalankan. Saat ini, Hebitren Kepri menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pedagang Beras Batam sehingga dapat memperoleh beras berkualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Melalui koperasi, Hebitren melakukan penjualan beras kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan dengan biaya yang lebih terjangkau.

2. Penguatan Halal *Value Chain* melalui Akselerasi Sertifikasi Halal

Indonesia menempati peringkat kedua ekonomi syariah dunia dalam kategori *halal food*. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan *halal value chain* dan semakin diperkuat dengan target wakil presiden untuk mencapai 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. Bank Indonesia sebagai bagian dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah turut berkontribusi dengan pencaangan Gerakan Nasional Akselerasi Sertifikasi Halal pada tahun lalu. KPwBI Kepri turut mendorong akselerasi sertifikasi halal tersebut terutama bagi UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diunggah ke dalam sistem. Oleh karena itu, KPwBI Kepri melaksanakan pelatihan bagi Pendamping Produk Halal (PPH) yang selanjutnya akan bertugas melakukan pendampingan dan verifikasi dalam proses pendaftaran sertifikat halal oleh UMKM.

Pada tahun 2022, Deputi Gubernur Bank Indonesia telah meresmikan Halal Center di Politeknik Negeri Batam yang merupakan dukungan dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Saat ini, Halal Center telah berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi UMKM yang sedang mengajukan sertifikasi halal. Bank Indonesia juga terus mendorong UMKM binaan dan mitra serta peserta kurasi dari kelompok makanan dan minuman untuk dapat memproses sertifikat halalnya untuk memberikan nilai lebih serta memberikan rasa aman bagi konsumen.

REFERENCE:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, *Siaran Pers*, "Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- 2) Dinar Standard, 2022, *State of Global Islamic Economy Report*, New York City, USA

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw IV
2022

Rp 0,68T



Tw III
2022

Rp 1,09T

Outflow Uang Kartal



Tw IV
2022

Rp 3,04T



Tw III
2022

Rp 1,67T

Net Flow Uang Kartal



Tw IV
2022

Rp 2,36T
Net Outflow



Tw III
2022

Rp 0,58T
Net Outflow

Transaksi RTGS



Tw IV
2022

Rp 43,59T
-7,00% (yoy)



Tw III
2022

Rp 43,88T
18,84% (y0y)

Transaksi SKNBI



Tw IV
2022

Rp 2,79T
7,32% (yoy)



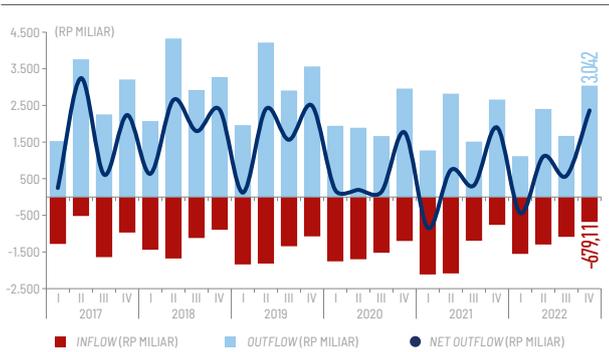
Tw III
2022

Rp 2,74T
13,89% (yoy)

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022. Selain itu, transaksi pembayaran non tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptansi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya QRIS.

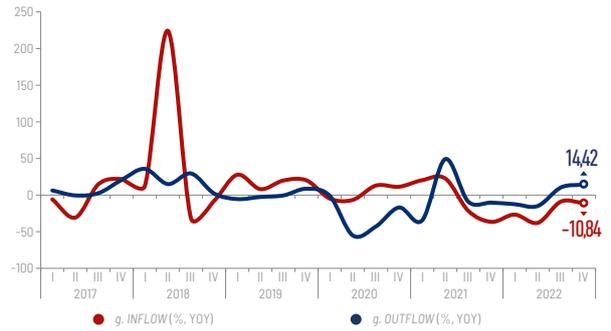
Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2022 mencatatkan net outflow sebesar Rp2,36 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat Rp579,9 miliar. Perkembangan tersebut sejalan dengan pola musiman kebutuhan uang tunai memasuki periode akhir tahun khususnya realisasi belanja Pemerintah dan kebutuhan transaksi masyarakat selama liburan akhir tahun. Aktivitas pembayaran non tunai juga tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.





Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (Inflow¹/Outflow²)

Pada triwulan IV 2022, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp2,36 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan *net outflow* pada triwulan sebelumnya yang mencapai Rp579,9 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah aliran kas keluar (*outflow*) dan Bank Indonesia se-Provinsi Kepulauan Riau melalui perbankan yang meningkat sejalan dengan siklus rutin peningkatan kebutuhan uang tunai di periode akhir tahun, khususnya untuk realisasi belanja Pemerintah serta kebutuhan transaksi masyarakat selama liburan akhir tahun atau Nataru.

Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan IV 2022 berjumlah Rp3,04 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 sebesar Rp1,67 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp679 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,09 triliun. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPwBI Provinsi Kepri) terus menyelenggarakan kegiatan kas titipan³ yang tersebar di 3 (tiga) tempat yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan

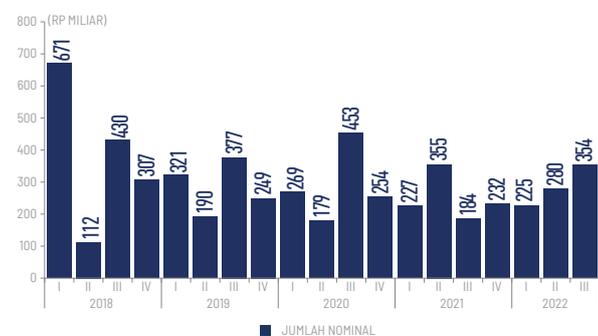
Kabupaten Karimun yang pada periode Oktober - Desember 2022 dilakukan pengiriman sebanyak 7 (tujuh) kali.

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Jumlah uang yang dimusnahkan pada triwulan IV 2022 tercatat sebanyak Rp192 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp354 miliar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut tidak terlepas dari penurunan arus *inflow* pasca HBKN. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia juga menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

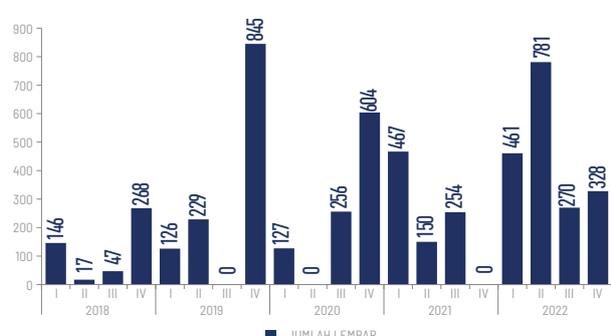
5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Selama triwulan IV 2022, KPwBI Provinsi Kepri telah melaksanakan 15 (lima belas) kali sosialisasi CBP kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan mulai dari



Sumber : Bank Indonesia

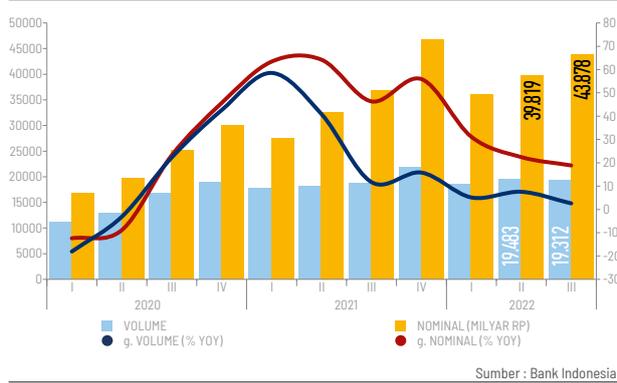
Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu

1 *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank
2 *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank
3 Kas Titipan merupakan salah satu upaya mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait pengedaran uang sekaligus memfasilitasi perbankan dalam hal penyetoran dan penarikan uang tunai dikarenakan keterbatasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Pelaksanaan Kas Titipan yaitu Bank Mandiri Tanjungpinang, Bank Riau Kepri Natuna dan BNI Tanjung Balai Karimun.



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

edukasi di sekolah dan universitas, sosialisasi kepada pelaku usaha dan UMKM, dan edukasi kepada instansi Pemerintah Daerah.

Melalui edukasi CBP maupun sosialisasi Uang TE 2022 tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2022 terdapat 328 laporan temuan uang palsu di wilayah Kepri meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 270 lembar uang palsu.

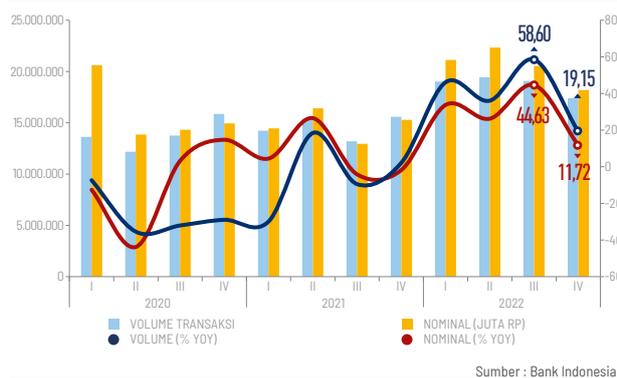
5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

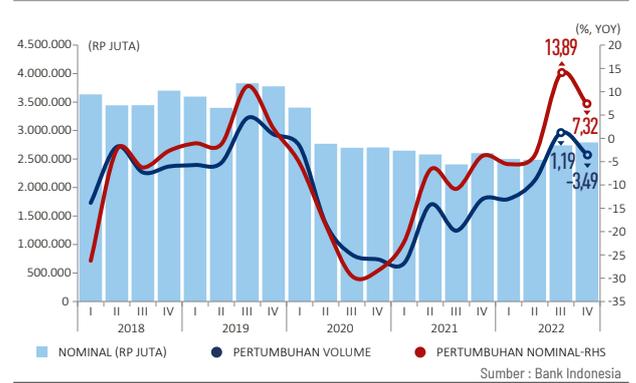
Nominal transaksi sistem *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) triwulan IV 2022 menurun dibandingkan triwulan III 2022. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat mencapai Rp43,58 triliun atau terkontraksi sebesar 7,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp43,87 triliun. Penurunan transaksi RTGS tersebut sejalan dengan hadirnya opsi BI FAST yang menawarkan biaya lebih murah dan layanan 24/7 untuk transaksi di antara Rp100 – 250 juta.

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, jumlah transaksi kliring selama triwulan IV 2022 mengalami penurunan dari 13,89% (yoy) atau Rp2,74 triliun menjadi



Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit

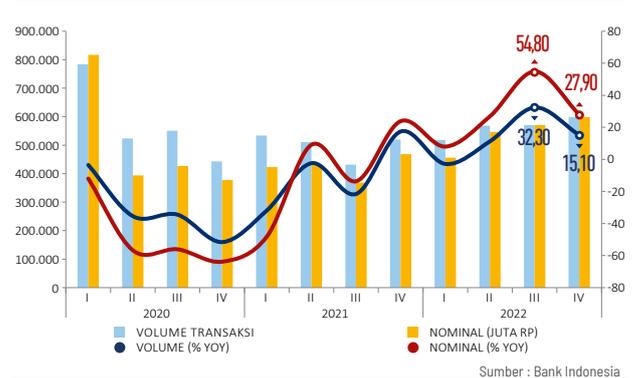


Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

sebesar 7,32% (yoy) atau Rp2,79 triliun. Sejalan dengan penurunan tersebut, jumlah warkat SKNBI yang dipertukarkan juga menurun dari 68.835 lembar menjadi 69.170 lembar. Hal ini salah satunya disebabkan oleh hadirnya layanan BI-Fast Bank Indonesia yang menawarkan biaya lebih murah dan layanan 24/7. BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan industri sistem pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat. BI FAST merupakan pembayaran ritel Nasional yang akan menggantikan SKNBI. BI FAST memiliki perbedaan dari segi: 1) nominal transaksi maksimal sebesar Rp250 juta per transaksi; 2) waktu layanan yang tersedia setiap saat; 3) kanal pembayaran tersedia lebih lengkap a.l. menggunakan *counter*, kanal *mobile/internet*, QR, ATM, EDC; dan 4) melayani transaksi transfer kredit, transfer debit, serta akan dikembangkan untuk melayani transaksi dengan instrument kartu ATM/debet, kartu kredit, dan uang elektronik. Secara perlahan, layanan transfer kredit dan transfer debit SKNBI akan dialihkan ke BI FAST, sementara itu ke depan SKNBI difokuskan untuk memproses transaksi cek BG (*paper based*).

5.2.3 Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Jumlah transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan IV 2022 mengalami penurunan baik dari segi nominal maupun jumlah transaksi seiring preferensi masyarakat yang menggunakan penggunaan tunai dan pembayaran non tunai melalui QRIS. Secara tahunan, nilai transaksi kartu debit tumbuh sebesar 19,15% (yoy), lebih rendah dari



Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

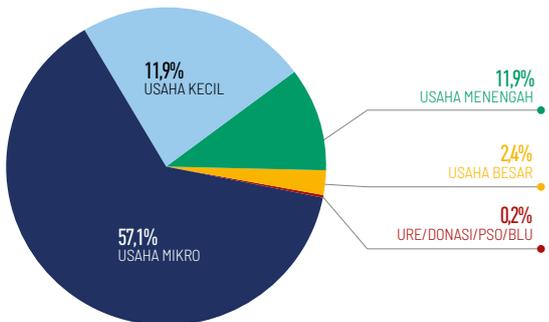


Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

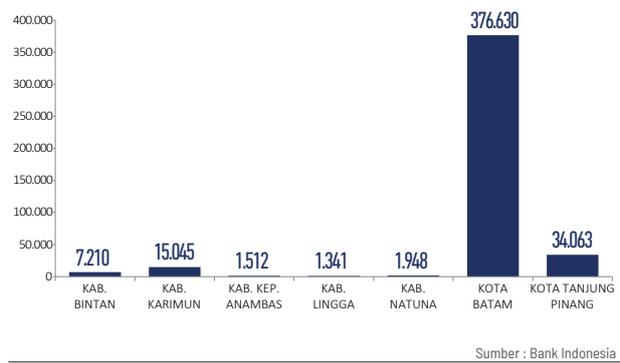
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 58,60%. Sementara itu, volume transaksi tumbuh sebesar 11,72% (yoy), juga menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 44,63% (yoy). Transaksi dengan kartu debit masih didominasi transaksi tarik tunai dengan pangsa sebesar 36,89%, diikuti setor tunai (19,20%) dan transfer antarbank (17,99%).

Di sisi lain, nilai transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 27,90% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 54,80% (yoy). Sementara itu, volume transaksi meningkat dari 570.227 transaksi menjadi 598.432 transaksi. Transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2022 didominasi oleh transaksi kartu kredit untuk belanja (melalui EDC) sebesar 96,70%, diikuti penggunaan untuk transaksi secara tunai sebesar 2,69% sejalan dengan meningkatnya preferensi penggunaan alat pembayaran digital.

Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya Uang Elektronik (UE) menggunakan metode *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan IV 2022 tercatat Rp764,34 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 sebesar Rp742,38 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya transaksi digital dengan membaiknya akseptasi masyarakat terhadap transaksi nontunai terutama QRIS melalui kampanye penggunaan QRIS yang masif.



Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha



Grafik 5.10 Perkembangan ORIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri

5.2.4 Perkembangan QRIS

Sampai dengan akhir triwulan IV 2022, jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Kepri telah mencapai 437.749 *merchant*, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 407.842 *merchant* yang tersebar di sekolah/universitas, pusat perbelanjaan/pasar, pusat kuliner, dan jasa transportasi umum. Jumlah *merchant* QRIS di Provinsi Kepri didominasi kategori Usaha Mikro sebesar 57,34% atau 250.992 *merchant*, diikuti oleh Usaha Kecil sebesar 28,29% atau 123.840 *merchant*, serta Usaha Menengah, Usaha Besar, dan URE/Donasi/Usaha yang masing-masing tercatat sebesar 11,75%, 2,43%, dan 0,17% di Provinsi Kepri. Volume transaksi QRIS di Provinsi Kepri terus mengalami pertumbuhan hingga Desember 2022 tercatat sebanyak 1.904.731 transaksi dengan nilai Rp259,95 miliar. Begitu pula dengan jumlah pengguna QRIS yang terus bertumbuh positif yang mana pada bulan Desember 2022 total pengguna QRIS di Provinsi Kepri menjadi 263.180 pengguna atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 229.686 pengguna.

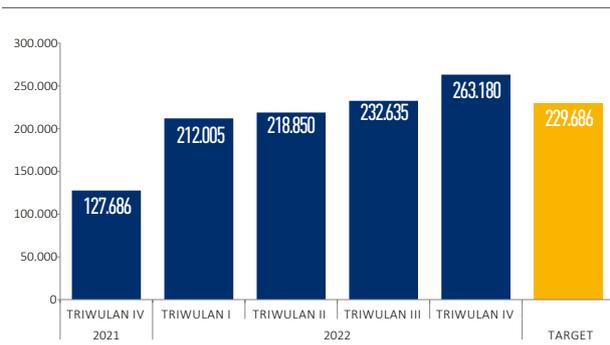
5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Upaya perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama triwulan IV 2022 antara lain:

- Rapat dengan Perbankan terkait Pasar SIAP QRIS
- Sosialisasi QRIS bagi Porter, Ojek, dan *Tenant* Pelabuhan



Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

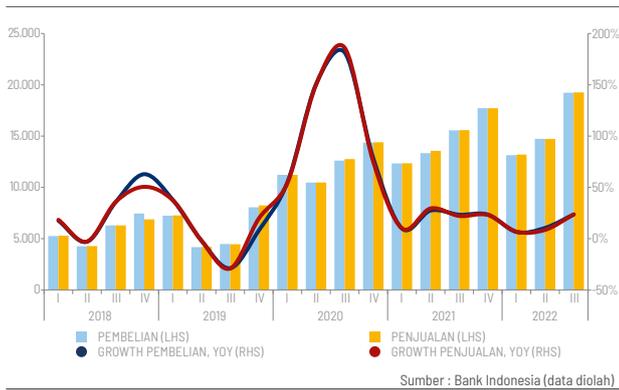
- c. Sosialisasi QRIS pada Acara Perlindungan Konsumen
- d. Rapat Implementasi QRIS pada Kawasan Pelabuhan
- e. Sosialisasi QRIS di Kabupaten Natuna

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Dalam rangka mencapai tata Kelola keuangan pemerintah yang efisien, efektif, dan transparan, Bank Indonesia terus berupaya aktif dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan pembayaran non tunai. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah. Melalui ETPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja, meningkatkan potensi penerimaan APBN dan APBD, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, menyediakan sarana pemantauan dan pelaporan kebijakan pemerintah, serta mendorong tata kelola keuangan publik yang lebih baik sehingga penyusunan dan penggunaan anggaran pemerintah akan lebih akurat.

Tabel 5.1 Penyaluran PKH Tahap 1-4 di Wilayah Provinsi Kepri

DATA PENYALURAN PKH TAHAP 1 - 2022								
TAHAP 1	Sum Of SP2D (Jml KPM)	Sum Of SP2D (Nominal)	Sum Of Penyaluran (Jml KPM)	Sum Of Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Sum Of Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
KEPULAUAN RIAU	45.980	Rp 34.158.525.000	45.975	Rp 34.156.900.000	99,99%	100,00%	45.702	99,41%
BINTAN	4.270	Rp 3.150.300.000	4.270	Rp 3.150.300.000	100,00%	100,00%	4.270	100,00%
KARIMUN	6.877	Rp 4.806.425.000	6.877	Rp 4.806.425.000	100,00%	100,00%	6.801	98,89%
KEPULAUAN ANAMBAS	1.138	Rp 809.875.000	1.138	Rp 809.875.000	100,00%	100,00%	1.138	100,00%
KOTA B A T A M	21.626	Rp 16.627.450.000	21.625	Rp 16.627.225.000	100,00%	100,00%	21.619	99,97%
KOTA TANJUNG PINANG	5.549	Rp 4.081.400.000	5.545	Rp 4.080.000.000	99,93%	99,97%	5.524	99,62%
LINGGA	4.199	Rp 2.920.850.000	4.199	Rp 2.920.850.000	100,00%	100,00%	4.199	100,00%
NATUNA	2.321	Rp 1.762.225.000	2.321	Rp 1.762.225.000	100,00%	100,00%	2.151	92,68%
DATA PENYALURAN PKH TAHAP 2 - 2022								
TAHAP 2	Sum Of SP2D (Jml KPM)	Sum Of SP2D (Nominal)	Sum Of Penyaluran (Jml KPM)	Sum Of Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Sum Of Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
KEPULAUAN RIAU	44.832	Rp 34.313.075.000	44.832	Rp 34.313.075.000	100,00%	100,00%	44.530	99,33%
BINTAN	4.099	Rp 3.058.775.000	4.099	Rp 3.058.775.000	100,00%	100,00%	4.099	100,00%
KARIMUN	6.771	Rp 4.803.400.000	6.771	Rp 4.803.400.000	100,00%	100,00%	6.683	98,70%
KEPULAUAN ANAMBAS	1.112	Rp 804.375.000	1.112	Rp 804.375.000	100,00%	100,00%	1.112	100,00%
KOTA BATAM	21.100	Rp 16.967.600.000	21.100	Rp 16.967.600.000	100,00%	100,00%	21.089	99,95%
KOTA TANJUNG PINANG	5.220	Rp 3.928.775.000	5.220	Rp 3.928.775.000	100,00%	100,00%	5.187	99,37%
LINGGA	4.244	Rp 3.003.675.000	4.244	Rp 3.003.675.000	100,00%	100,00%	4.244	100,00%
NATUNA	2.286	Rp 1.746.475.000	2.286	Rp 1.746.475.000	100,00%	100,00%	2.116	92,56%
DATA PENYALURAN PKH TAHAP 3 - 2022								
TAHAP 3	Sum Of SP2D (Jml KPM)	Sum Of SP2D (Nominal)	Sum Of Penyaluran (Jml KPM)	Sum Of Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Sum Of Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
KEPULAUAN RIAU	46.296	Rp 35.489.400.000	46.296	Rp 35.489.400.000	100,00%	100,00%	45.783	98,89%
BINTAN	3.991	Rp 3.024.450.000	3.991	Rp 3.024.450.000	100,00%	100,00%	3.989	99,95%
KARIMUN	7.045	Rp 5.027.800.000	7.045	Rp 5.027.800.000	100,00%	100,00%	6.814	96,72%
KEPULAUAN ANAMBAS	1.151	Rp 875.425.000	1.151	Rp 875.425.000	100,00%	100,00%	1.148	99,72%
KOTA BATAM	22.204	Rp 17.707.375.000	22.204	Rp 17.707.375.000	100,00%	100,00%	22.076	99,42%
KOTA TANJUNG PINANG	5.313	Rp 3.944.100.000	5.313	Rp 3.944.100.000	100,00%	100,00%	5.194	97,76%
LINGGA	4.358	Rp 3.141.500.000	4.358	Rp 3.141.500.000	100,00%	100,00%	4.348	99,77%
NATUNA	2.234	Rp 1.768.750.000	2.234	Rp 1.768.750.000	100,00%	100,00%	2.214	99,10%
DATA PENYALURAN PKH TAHAP 4 - 2022								
TAHAP 4	Sum Of SP2D (Jml KPM)	Sum Of SP2D (Nominal)	Sum Of Penyaluran (Jml KPM)	Sum Of Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Sum Of Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
KEPULAUAN RIAU	47.350	Rp 35.532.000.000	46.767	Rp 34.113.025.000	98,77%	98,79%	46.647	99,74%
BINTAN	4.057	Rp 3.013.175.000	4.003	Rp 2.971.900.000	98,67%	98,63%	4.003	100,00%
KARIMUN	7.366	Rp 5.367.950.000	7.274	Rp 5.310.550.000	98,75%	98,93%	7.270	99,95%
KEPULAUAN ANAMBAS	1.089	Rp 874.200.000	1.086	Rp 872.400.000	99,72%	99,79%	1.082	99,63%
KOTA BATAM	22.774	Rp 15.850.500.000	22.603	Rp 15.732.800.000	99,25%	99,26%	22.511	99,59%
KOTA TANJUNG PINANG	5.387	Rp 4.391.425.000	5.168	Rp 4.221.825.000	95,93%	96,14%	5.157	99,79%
LINGGA	4.401	Rp 3.468.925.000	4.380	Rp 3.454.450.000	99,52%	99,58%	4.371	99,79%
NATUNA	2.276	Rp 1.565.825.000	2.253	Rp 1.549.100.000	98,99%	98,93%	2.253	100,00%



Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi KUPVA

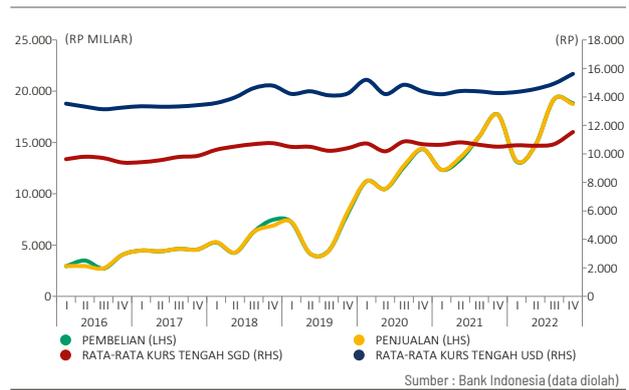
Dalam upaya untuk mendorong ETPD, Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Kepulauan Riau yang pada triwulan IV 2022 dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

- Sosialisasi Pengisian IETPD Semester II 2022
- High Level Meeting (HLM) TP2DD di Kab. Natuna
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kab. Natuna
- Rapat Elektronifikasi Transportasi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- FGD Penguatan Database dan Integrasi Sistem Perpajakan dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah
- Rapat Sosialisasi Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi dan Diseminasi di Provinsi Kepulauan Riau

5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

KPwBI Kepulauan Riau bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial Nontunai. Program bantuan sosial (Bansos) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Sampai dengan triwulan IV 2022, penyaluran bantuan PKH di Provinsi Kepri telah dilakukan dalam 4 tahap dimana penyaluran pada tahap IV (periode Oktober s.d Desember 2022) disalurkan kepada 46.767 KPM sebesar Rp34,11 miliar dengan realisasi penyerapan sebesar 98,77%.

Penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui program Sembako yang merupakan program bantuan sosial pangan dari Kementerian Sosial sebagai transformasi dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Berdasarkan data pada Desember 2022, jumlah penerima Program Sembako di Kepri tercatat sebanyak 56.314 KPM dengan total bantuan sebesar Rp11,26 miliar. Jumlah KPM penerima program Sembako di provinsi Kepri terus mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya disertai dengan tingkat penyerapan yang terus membaik.



Grafik 5.15 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

5.3 TRANSAKSI KUPVA⁴ DAN PTD⁵

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi KUPVA dan PTD di Provinsi Kepri, KPwBI Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 114 KUPVA BB dan 58 Layanan Remitansi yang berada di Provinsi Kepri.

5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA Bukan Bank

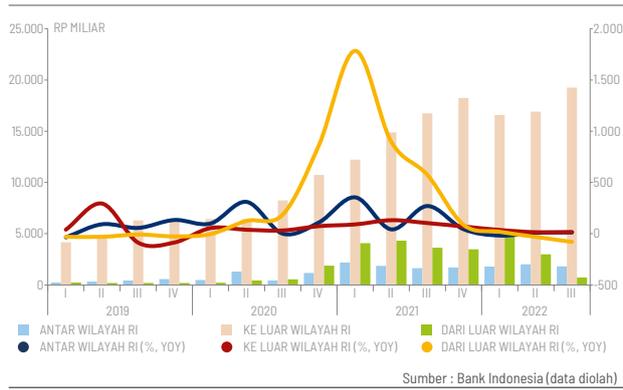
Transaksi jual beli valas melalui KUPVA BB selama triwulan IV 2022 mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan jumlah transaksi pembelian Uang Kertas Asing (UKA) tercatat sebesar Rp18,83 triliun atau tumbuh 6,23% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp19,23 triliun. Di sisi lain, total transaksi penjualan UKA pada triwulan IV 2022 berjumlah Rp18,75 triliun atau tumbuh 5,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp19,26 triliun. Adapun mata uang yang mendominasi transaksi penjualan valuta asing pada triwulan IV 2022 yakni Singapore Dollar, China Renminbi, dan US Dollar.

5.3.2 Perkembangan Transaksi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB)

Transaksi transfer dana melalui PTD BB di wilayah Provinsi Kepri tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,82% (yoy). Peningkatan transaksi terutama terjadi pada jenis transaksi antar wilayah RI di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat seiring pemulihan ekonomi. Jumlah Layanan Remittance pada triwulan IV 2022 berkurang sebanyak 1 (satu) perusahaan.

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PTD di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 80,19%, diikuti transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 10,45%, dan transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 9,36%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PTD di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana keluar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan

⁴ KUPVA: Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
⁵ PTD: Penyelenggara Transfer Dana



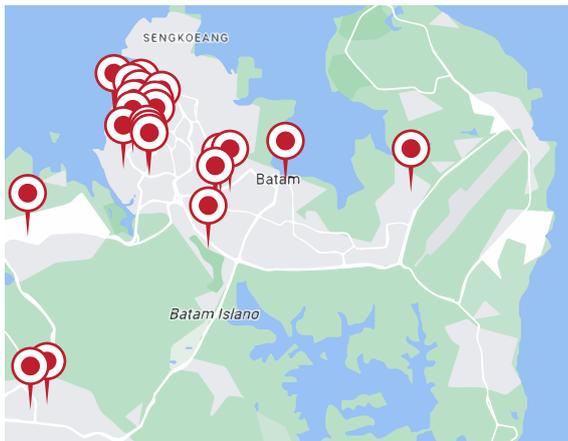
Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Pada PTD

pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Hingga triwulan IV 2022 jumlah Penyelenggara Transfer Dana di Kepri berjumlah 58 dengan sebaran 43 PTD di Kota Batam, 6 di Kota Tanjungpinang serta 9 di Kabupaten Karimun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang berjumlah 59 PTD.

BOKS 3

PERKEMBANGAN KUPVA BB DAN PJP LAYANAN REMITANSI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU¹

¹ KUPVA BB adalah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, sedangkan PJP adalah Penyediaan Jasa Pembayaran



Gambar B3.1 Sebaran KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri

A. KUPVA BB DAN PJP LAYANAN REMITANSI DI PROV. KEPRI

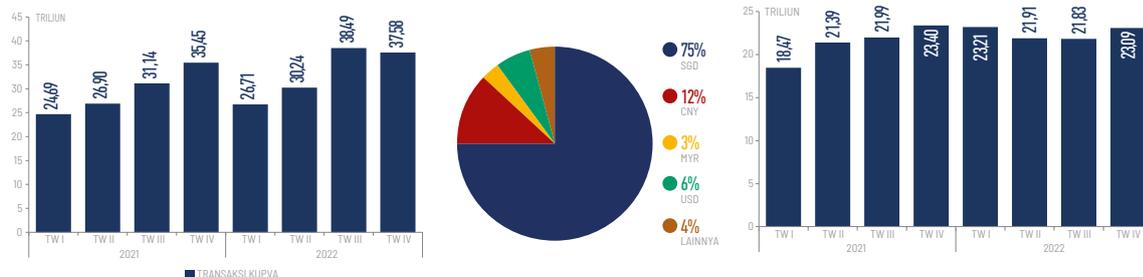
Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki KUPVA BB dan PJP LR terbesar ke-2 di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan jumlah 113 Kantor Pusat KUPVA BB, 66 Kantor Cabang KUPVA BB, dan 57 PJP Layanan Remitansi (LR). Dengan jumlah KUPVA BB dan PJP LR yang banyak tersebut diharapkan dapat semakin mendorong perekonomian Prov. Kepri karena peran KUPVA sebagai fasilitator dalam penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

B. PERKEMBANGAN TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LAYANAN REMITANSI

Transaksi jual beli UKA oleh KUPVA BB pada tahun 2022 meningkat sebesar 12,58% (yoy) dibandingkan tahun 2021 didorong oleh dibukanya kembali border mancanegara dengan negara-negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Transaksi KUPVA BB didominasi oleh mata uang SGD (75%), CNY (12%), USD (6%), dan MYR (3%). Sejalan dengan perkembangan transaksi KUPVA BB, dibukanya kembali *border* mancanegara dan pemulihan ekonomi nasional juga berdampak terhadap tumbuhnya nominal transaksi PJP untuk Layanan Remitansi sebesar 6,98% (yoy). Mayoritas transaksi PJP LR merupakan transaksi *outgoing* dengan pangsa sebesar 79% dari total transaksi sepanjang tahun 2022. Besarnya pangsa transaksi *outgoing*¹ tersebut dipengaruhi oleh karakteristik PJP LR Kepri yang secara umum digunakan sebagai Penyelenggara Penerus untuk mengirimkan dana ke luar negeri.

C. TANTANGAN PENGAWASAN DI PROV. KEPRI

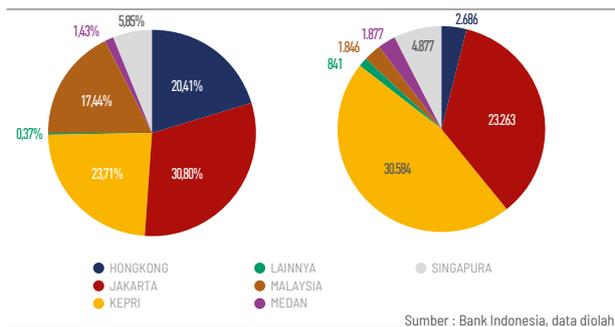
Terdapat beberapa tantangan yang mengemuka dalam Pengawasan kegiatan KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri sehingga diperlukan Pengawasan yang lebih mendalam. Beberapa tantangan tersebut di antaranya adalah wilayah Prov. Kepri yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga memiliki risiko yang tinggi terhadap penyalahgunaan transaksi Sistem Pembayaran, yang mana berdasarkan hasil kajian BI pada *Sectoral Risk Assessment (SRA)* tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada transaksi KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri masuk dalam kategori “Tinggi” dan “Menengah”, sementara risiko



Grafik B3.1 Pertumbuhan Transaksi KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri

Sumber : Bank Indonesia, data diolah

¹ Transaksi *outgoing* adalah transaksi valuta asing dari Indonesia ke luar negeri.



Grafik B3.2 Pertumbuhan Transaksi KUPVA BB dan PJP LR di Prov. Kepri

Mempertimbangkan besarnya transaksi yang dilakukan antara KUPVA BB Kepri dengan KUPVA BB DKI Jakarta dan perusahaan di luar negeri, serta adanya aliran dana valas yang dilakukan dengan mekanisme tersebut di atas, maka KPwBI Kepri berupaya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan KPwBI Prov. DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya (bea cukai) untuk memastikan bentuk dan legalitas transaksi antar kota dan antar negara tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) PJP LR di Prov. Kepri masuk dalam kategori **“Tinggi”**. Selain itu, pemahaman Penyelenggara KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi di Kepulauan Riau terkait ketentuan Operasional Penyelenggaraan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang baru belum sepenuhnya optimal. Dan terakhir, kondisi geografis Kepri sebagai wilayah Kepulauan menjadi tantangan yang tersendiri bagi Pengawas, dikarenakan terbatasnya akses transportasi. Beberapa daerah hanya dapat dijangkau melalui laut ataupun udara, dan dibutuhkan waktu perjalanan yang relatif panjang untuk melakukan pemeriksaan secara *on-site, mystery shopping* ataupun *market intelligence*.

D. NETWORK TOPOLOGY ANALISIS DATA TRANSAKSI DAN DATA NASABAH KUPVA BB

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan analisa data transaksi terhadap 16 KUPVA BB dan 19 PJP LR yang mencakup masing-masing sebesar 85% dan 89% transaksi di Kepulauan Riau di tahun 2020-2021. Dari hasil analisis terhadap seluruh transaksi 16 KUPVA BB di Provinsi Kepri dimaksud, diketahui bahwa lokasi nasabah yang melakukan transaksi jual-beli terbesar di wilayah Kepri sebagian besar berada di DKI Jakarta yaitu sebesar Rp35.609 triliun (30,8%). Selanjutnya, berdasarkan frekuensi transaksi jual-beli, nasabah yang berlokasi di Kepri paling banyak melakukan transaksi yaitu mencapai 30.584 transaksi dan disusul oleh nasabah yang berlokasi di DKI Jakarta dengan jumlah frekuensi sebanyak 23.263 kali selama tahun 2020-2021.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan sepanjang tahun 2020-2021, KUPVA BB di Kepri secara umum masih melakukan transaksi jual-beli valuta asing dengan perusahaan luar negeri (Hongkong, Singapura, Malaysia) ketika kebijakan keluar-masuk perbatasan sedang ditutup akibat pandemi Covid-19, meski berdasarkan ketentuan seluruh transaksi Uang Kertas Asing harus dilakukan secara fisik². Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi transaksi jual-beli valuta asing dimaksud merupakan transaksi di atas kertas saja atau kegiatan transaksi dilakukan melalui mekanisme transfer antar rekening valuta asing.

² Mengacu pada PBI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Pasal 2 ayat (3) huruf a diatur bahwa penyerahan Uang Kertas Asing wajib dilakukan secara fisik

BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Agustus
2022 **1.259.712**
 Jiwa

Agustus
2021 **1.207.014**
 Jiwa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Agustus
2022 **68,94%**

Agustus
2021 **68,27%**

Tingkat Pengangguran Terbuka



Agustus
2022 **8,23%**

Agustus
2021 **9,91%**

Nilai Tukar Petani



Tw IV
2022 **104,36**

Tw III
2022 **108,33**

Tingkat Kemiskinan



September
2022 **6,03%**

Maret
2022 **6,24%**

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun
2022 **76,46**

Tahun
2021 **75,79**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.



Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode				Perubahan 1 Tahun	
	Ags'19	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.068.974	1.133.776	1.207.014	1.259.712	52.698	4,37%
Bekerja	988.817	1.016.600	1.087.419	1.155.997	68.578	6,31%
Pengangguran	80.157	117.176	119.595	103.715	(15.880)	-13,28%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50%	10,34%	9,91%	8,23%		-1,68%
- Perdesaan	4,51%	5,41%	4,43%	5,88%		1,45%
- Perkotaan	7,79%	10,89%	10,45%	8,52%		-1,93%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,69%	66,28%	68,27%	68,94%		

Sumber: BPS (data diolah)

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹ di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat mengalami perbaikan dari posisi Agustus 2021 sebesar 9,91% menjadi 8,23% pada Agustus 2022. Perbaikan tersebut terutama terjadi di daerah perkotaan yang mengalami penurunan TPT dari 10,45% pada Agustus tahun lalu menjadi 8,52% pada Agustus 2022. Hal tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas usaha dan kegiatan pariwisata di perkotaan didorong mobilitas yang terus membaik. Sementara TPT di wilayah perdesaan mengalami peningkatan. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 68,27% menjadi 68,94% didorong oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT hampir seluruh level pendidikan mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan universitas, diploma, SMA, SMP dan SD ke bawah. Sementara kelompok pendidikan SMK mengalami peningkatan 1,38 persen poin. TPT tertinggi terjadi pada kelompok lulusan SMK sebesar 11,34%, diikuti SMA sebesar 11,03% dan SMP sebesar 10,38%. Sementara TPT terendah terjadi pada kelompok lulusan universitas (2,5%) serta kelompok berpendidikan SD ke bawah (3,31%). TPT yang cukup rendah dan menurun pada universitas dan diploma dipengaruhi oleh kebutuhan dunia kerja yang tinggi untuk level pendidikan/keahlian yang lebih tinggi.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 25,01% dari jumlah tenaga kerja pada Agustus 2022. Kondisi tersebut sejalan porsi

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran				
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%

Sumber: BPS (diolah)

Lapangan Usaha (LU) tersebut yang juga merupakan terbesar dalam perekonomian Provinsi Kepri yaitu sebesar 41% dari total Produk Domestik Regional Bruto. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil/Sepeda Motor (17,67%), LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (9,00%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,54%), dan diikuti LU Konstruksi (6,64%) yang juga merupakan LU utama di Provinsi Kepri.

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling banyak di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 60,45%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 19,80%. Pangsa kelompok buruh/karyawan mengalami penurunan sebesar 4,34 persen poin pada bulan Agustus 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan pangsa jumlah pekerja juga terjadi pada kelompok pekerja yang berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sementara itu, peningkatan pangsa jumlah tenaga kerja terjadi pada kelompok pekerja keluarga/tak dibayar, pekerja bebas

Tabel 6.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Aug'22
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,01%	25,01%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	19,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,67%	17,67%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	6,02%	6,02%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	6,64%	6,64%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	9,00%	9,00%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	7,54%	7,54%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,05%	6,05%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	1,48%	1,48%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	5,08%	5,08%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,83%	1,83%

Sumber: BPS (data diolah)

¹ Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	-0,13
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	-0,04
3	Berusaha dibantu buruh tetap	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	0,23
4	Buruh/karyawan	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	-1,34
5	Pekerja Bebas	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	0,29
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	1,01
TOTAL		100	100	100	100	100	

Sumber: BPS (diolah)

dan berusaha dibantu buruh tetap. Kondisi ini terindikasi disebabkan oleh adanya peralihan dari pekerja pada sektor formal ke informal.

Perbaikan ketenagakerjaan juga tercermin dari peningkatan porsi tenaga kerja yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu sebesar 3,11 persen poin. Di sisi lain, jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur mengalami penurunan sejalan dengan peralihan pekerja paruh waktu ke pekerja waktu penuh. Kondisi tersebut mengindikasikan para pemberi kerja mulai menambah jam kerja karyawan untuk mendukung peningkatan produksi untuk mengimbangi pemulihan permintaan.

6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2022, dilihat dari rata-rata NTP bulan Oktober hingga Desember 2022, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata NTP pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 104,14, lebih rendah dari 106,20 pada triwulan yang sama tahun 2021. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Indeks yang Dibayar (Ib) petani yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks yang Diterima (It) petani. Kenaikan It yang lebih lambat ditengarai akibat harga komoditas yang dihasilkan petani khususnya tanaman pangan yang mulai mengalami normalisasi pada triwulan IV 2022, setelah meningkat pada awal dan pertengahan tahun 2022 sebagai dampak dari kenaikan harga pangan global. Di sisi lain, peningkatan Ib yang lebih tinggi berkaitan dengan kenaikan harga bahan kebutuhan konsumsi dan produksi petani sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan September 2022 dan kenaikan harga energi global.

Penurunan NTP Gabungan terutama terjadi pada sub kelompok Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan

Tabel 6.5 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Jumlah Jam Kerja Per Minggu

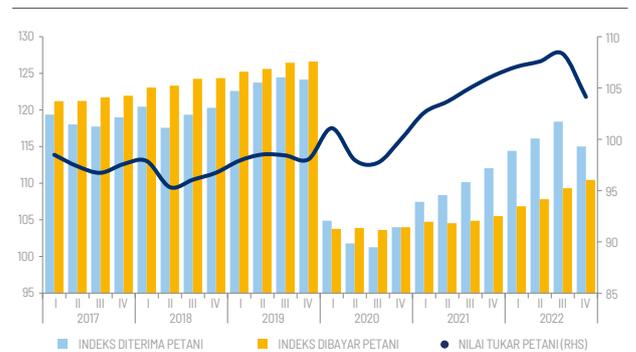
No	Jumlah Jam Kerja Per Minggu	2020	2021	2022	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	
1	Pekerja Penuh (≥ 35 jam)	79,86	76,21	79,32	3,11
2	Setengah Penganggur	5,75	6,17	4,95	-1,22
3	Pekerja Paruh waktu	14,39	17,62	15,73	-1,89
Total		100	100	100	

Sumber: BPS (diolah)

yang pada triwulan IV tahun 2022 masing-masing menurun sebesar 4,57%, 11,39%, dan 0,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, terjadi peningkatan NTP pada sub kelompok Hortikultura dari 105,17 pada triwulan IV tahun 2021 menjadi 110,67 pada periode yang sama tahun 2022. Demikian halnya NTP sub sektor perikanan meningkat dari 110,31 menjadi 111,12.

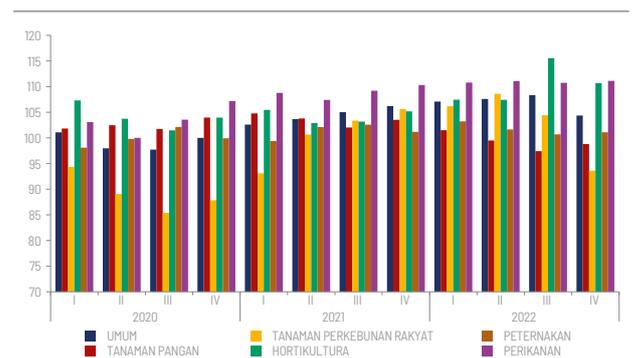
6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2022 tercatat sebanyak 148.890 orang, menurun dibandingkan periode September 2021 sebesar 137.750 orang. Penurunan tersebut terjadi di tengah garis kemiskinan yang mengalami penurunan dari Rp653.853/bulan/kapita pada September 2021 menjadi Rp653.000/bulan/kapita pada September 2022. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 0,95%, lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2021 sebesar 1,05%. Penurunan indeks



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018=100											
	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Tanaman Pangan												
a. Indeks yang Diterima (It)	106,06	106,81	105,74	108,48	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	110,08
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,15	104,23	103,92	104,35	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,42
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	101,84	102,47	101,74	103,96	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	98,80
2. Hortikultura												
a. Indeks yang Diterima (It)	111,57	108,01	105,29	108,26	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	122,61
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	103,98	104,12	103,77	104,14	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,79
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	107,30	103,73	101,47	103,95	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	110,67
3. Tanaman Perkebunan Rakyat												
a. Indeks yang Diterima (It)	98,17	92,77	88,74	91,71	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	104,22
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,08	104,15	103,91	104,41	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,35
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	94,32	89,08	85,40	87,83	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	93,60
4. Peternakan												
a. Indeks yang Diterima (It)	101,51	103,27	105,42	103,45	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,90
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	103,48	103,49	103,22	103,53	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,68
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	98,09	99,79	102,13	99,92	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	101,11
5. Perikanan												
a. Indeks yang Diterima (It)	106,55	103,56	107,00	111,02	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	122,45
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	103,35	103,55	103,33	103,58	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	110,19
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	103,09	100,01	103,55	107,18	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	111,12
Umum												
a. Indeks yang Diterima (It)	104,89	101,79	101,26	103,99	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,51
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	103,77	103,89	103,62	103,99	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,68
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	101,08	97,98	97,72	100,00	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,36

Sumber: BPS (data diolah)

kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2022 tidak mengalami perubahan dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,22%.

6.2.3 Gini Ratio (GR)

Gini Ratio² Provinsi Kepri pada September 2022 tercatat sebesar 0,325, menurun dibandingkan September 2021 sebesar 0,339.

Penurunan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri sedikit menyempit pada periode September 2021 - September 2022. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih

tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,328, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,264. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri berada di urutan ke-4 paling tinggi se-Sumatera, meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,381). Namun demikian, gini ratio Provinsi Kepri di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ke-4) dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari nasional (0,402).

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

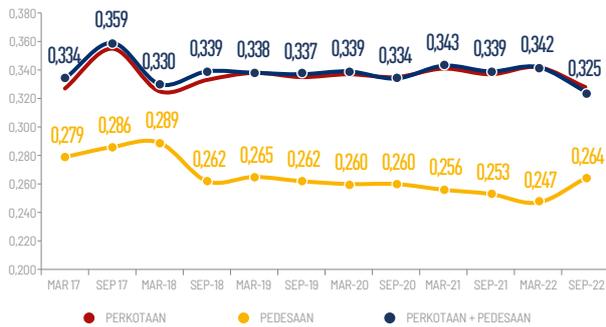
IPM Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat sebesar 76,46 meningkat 0,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya 75,79.

Tabel 6.7 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2017		2018		2019		2020		2021		2022
	Mar	Sept	Mar								
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	0,97	1,18	1,00	0,59	0,69	0,90	1,11	1,21	1,07	0,95	1,05
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,23	0,31	0,24	0,11	0,13	0,18	0,29	0,42	0,28	0,218	0,252
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%

Sumber: BPS (data diolah)

2 Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.



Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri

Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Secara nasional, IPM Provinsi Kepri menduduki urutan ke-4 tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu di kawasan Sumatera, IPM Provinsi Kepri menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain. IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM $70 < IPM < 80$).

Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat 70,50 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,12 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 12,99 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,37 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.469 ribu, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.122 ribu.

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

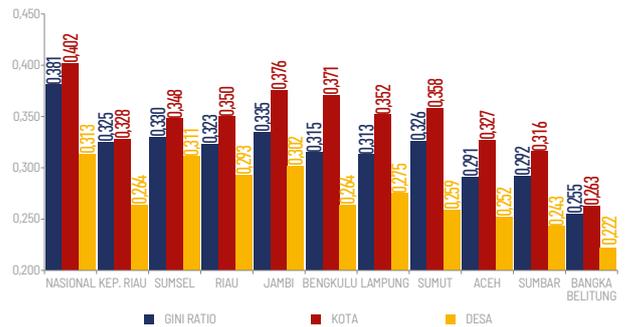
Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12	70,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: BPS (data diolah)

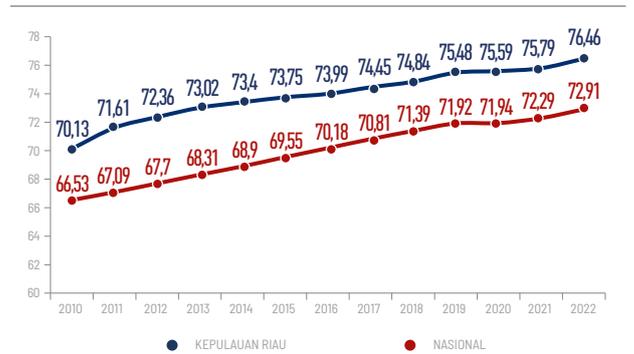
Tabel 6.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karimun	66,40	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65
Bintan	69,87	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99
Natuna	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	57,36	58,51	59,32	60,13	60,75	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kepulauan Anambas	63,03	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61
Batam	76,98	77,82	78,39	78,65	79,13	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Tanjungpinang	73,76	74,86	75,91	76,70	77,29	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

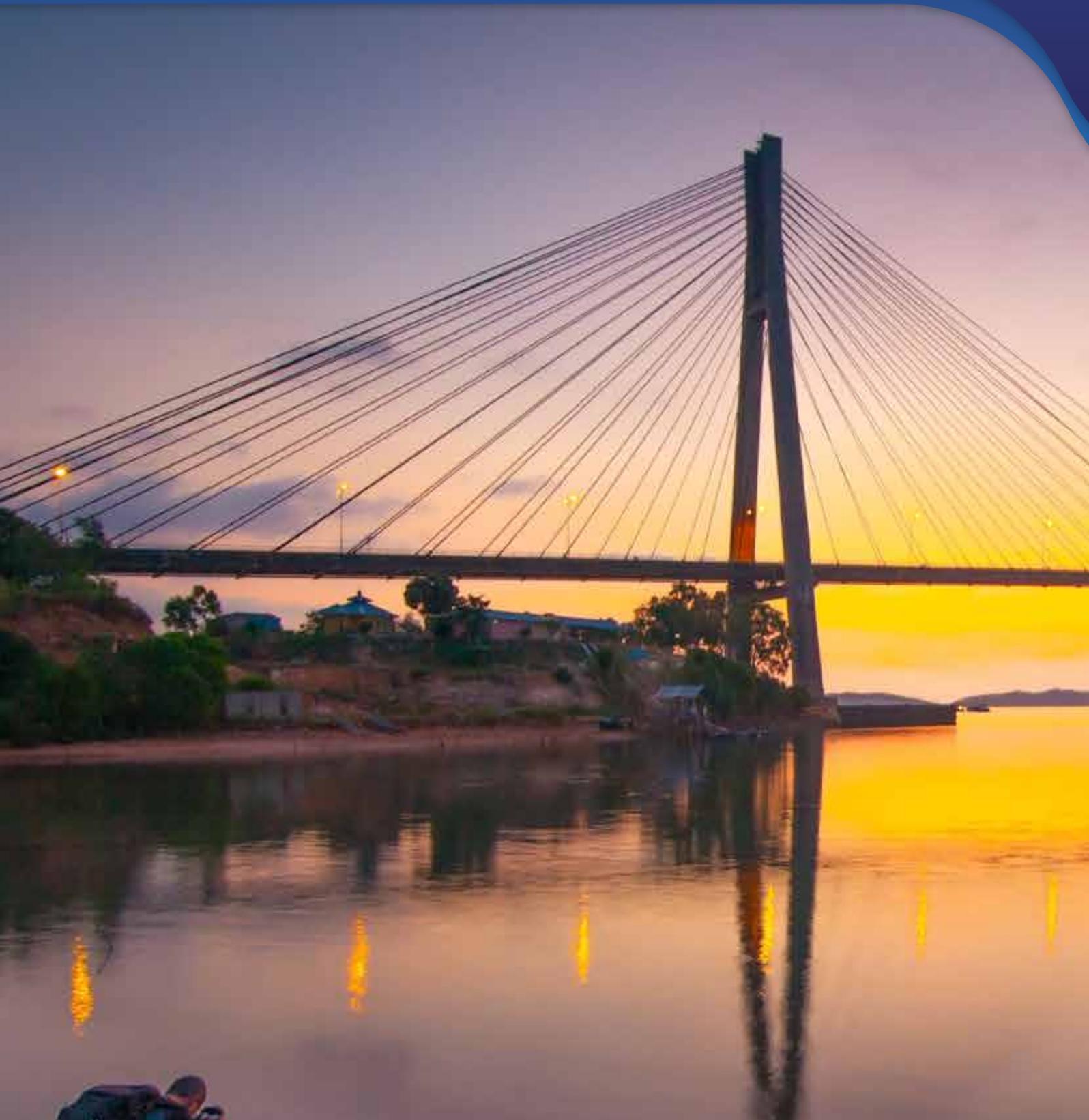


Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan skor 81,67. Sementara itu 4 (empat) kota/kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga masuk dalam kategori IPM sedang (nilai IPM $60 < IPM < 70$). Seluruh daerah mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII

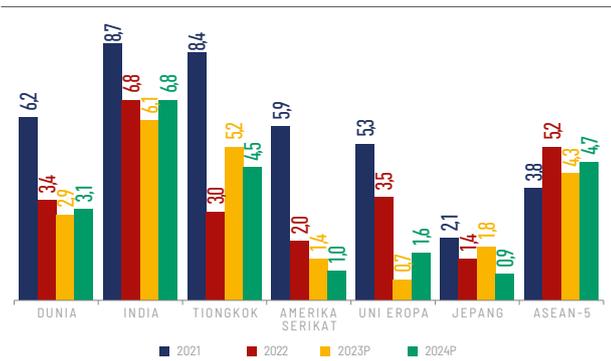
Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat namun lebih baik dari estimasi sebelumnya sejalan dengan penghapusan kebijakan Zero Covid di Tiongkok dan perbaikan gangguan rantai pasokan. Kondisi perbaikan rantai pasokan global yang membaik tersebut turut mendorong tekanan inflasi juga turut menurun. Perekonomian global yang terus membaik, turut mendorong perekonomian domestik untuk tumbuh tetap kuat dan berpotensi lebih tinggi didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan ekspor. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan perkembangan inflasi di daerah.

Tekanan inflasi global yang berkurang menyebabkan tekanan inflasi domestik diperkirakan berkurang sehingga inflasi domestik dan Provinsi Kepri diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy). Penurunan tekanan inflasi disebabkan oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global yang berdampak tekanan inflasi Kepri yang menurun. Upaya pengendalian inflasi di daerah terus diupayakan melalui sinergi dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) salah satunya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).





Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)

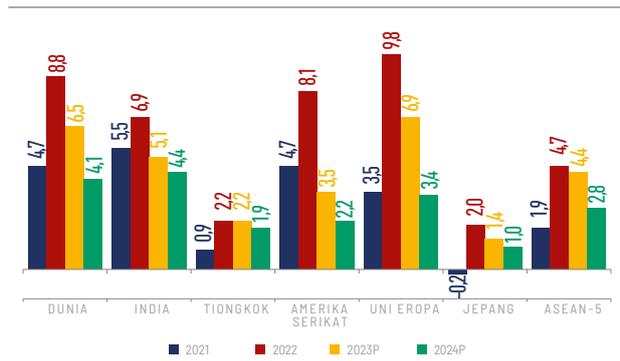
7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi global masih diperkirakan tumbuh melambat di tengah sejumlah ketidakpastian yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan masih melambat di tengah risiko resesi yang tinggi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Perlambatan ekonomi global tersebut juga disebabkan oleh berlanjutnya fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi akibat ketegangan politik yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju.

Pertumbuhan ekonomi global berpotensi membaik sejalan dengan penghapusan kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok yang berkontribusi pada perbaikan prospek global. Risiko perlambatan ekonomi global diperkirakan akan mulai mereda pada tahun 2024 sejalan perbaikan dari rantai pasok global yang membaik. *Outlook* terbaru *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2023 menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 2,9% (yoy), melambat dari estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,4% (yoy). Namun, prakiraan pertumbuhan tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya pada Oktober 2022 yaitu sebesar 2,6% (yoy).

Tekanan inflasi global masih tinggi, meskipun mulai berkurang, dipengaruhi oleh berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa. Inflasi yang masih tinggi tersebut telah mendorong kebijakan moneter global yang lebih ketat. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, diperkirakan akan terus menaikkan *Fed Funds Rate* hingga awal 2023 dengan siklus pengetatan moneter yang panjang. Perkembangan tersebut akan mendorong mata uang dolar AS tetap kuat sehingga menyebabkan risiko tekanan inflasi dari komoditas impor tetap tinggi sebagaimana prakiraan IMF bahwa inflasi global akan tetap tinggi sebesar 6,5% (yoy) dan inflasi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) yang juga masih tinggi sebesar 4,4% (yoy).

Tren perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih tetap baik, di tengah peningkatan risiko pelemahan ekonomi dunia dan tekanan

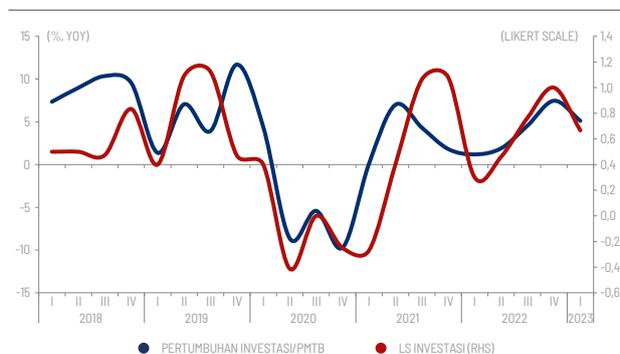


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)

inflasi yang meningkat. Bank Indonesia masih optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tetap kuat meskipun sedikit melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global di kisaran 4,5% s/d 5,3% dengan kecenderungan bias ke atas. Kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari prakiraan semula didorong oleh pengaruh positif perbaikan ekonomi Tiongkok. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh tinggi dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang meningkat dan kenaikan mobilitas masyarakat pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Investasi membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2023 juga diperkirakan tetap tinggi meskipun mengalami sedikit perlambatan. Perkiraan tersebut didasari pertimbangan masih tingginya risiko perlambatan ekonomi global yang dapat menahan kinerja industri pengolahan terutama mulai semester II 2023. Namun demikian masih terdapat ruang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki dan memitigasi risiko yang dihadapi. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2023 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,2% - 5,0% (yoy).**



Sumber : IMF World Economic Outlook, Januari 2023

Grafik 7.3 Likert Scale Perkiraan Investasi



Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Penanganan COVID-19	Perkiraan penurunan kasus dan progres vaksinasi booster mendekati target untuk menciptakan kekebalan komunal.	▲
Proyeksi Perekonomian Global	IMF melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 2,9% pada Januari 2022, meningkat dari periode Oktober 2022 yang tumbuh 2,6%.	▲
Pariwisata	Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sejalan dengan pembukaan berbagai event dan atraksi pariwisata.	▲
Kebijakan moneter ketat	Risiko penurunan pengeluaran masyarakat dan investasi dari pelaku usaha sejalan dengan tinggi <i>opportunity cost</i> dari pengeluaran dan investasi.	▼
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik konflik Rusia-Ukraina dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia	▼
Inflasi	Meningkatnya tekanan inflasi memengaruhi kinerja konsumsi rumah tangga	▼

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tetap tinggi, meskipun sedikit melambat, dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, ketegangan politik yang diperkirakan masih berlangsung dan risiko resesi di negara maju yang masih tinggi. Ketidakpastian tersebut akan memberikan dampak pada komponen sisi permintaan yakni kinerja konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Akan tetapi, penghapusan kebijakan *zero COVID-19* di Tiongkok, yang merupakan salah satu mitra dagang utama Kepri, akan mendorong prospek ekonomi Kepri yang lebih baik. Perlambatan konsumsi rumah tangga diperkirakan bersumber dari penurunan ekspektasi masyarakat seiring perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 serta risiko kenaikan kasus COVID-19 serta kemunculan varian baru yang berdampak pada mobilitas masyarakat. Sedangkan, kinerja ekspor diperkirakan melambat seiring adanya tekanan pada sisi permintaan akibat penurunan optimisme pelaku usaha dan gangguan rantai pasok global.

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan kinerja perekonomian pada tahun ini diperkirakan bersumber dari lapangan usaha yaitu LU perdagangan besar dan eceran. Perlambatan LU perdagangan diperkirakan bersumber dari normalisasi permintaan masyarakat seiring dengan berakhirnya beberapa program subsidi seperti Program Insentif PPNBM yang diproyeksi berdampak kepada penjualan kendaraan dan Bantuan Subsidi berupa BLT/BPNT. Realisasi pertumbuhan di tahun 2022 yang lebih baik dari prediksi sebelumnya memberikan *base year*

effect terhadap pertumbuhan pada tahun 2023. Selain itu, pembukaan sektor *Meeting, Incentive dan Conference*, pelaksanaan *sport events* dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepulauan Riau, akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta memberikan *spillover effect* yang positif pada sektor lainnya.

7.2 PROSPEK INFLASI

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Kepri tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih rendah dari inflasi tahun 2022 dan berada di kisaran atas sasaran inflasi 3 ±1% (yoy). Peningkatan inflasi pada tahun ini dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat, penyesuaian subsidi BBM, gangguan rantai suplai, nilai tukar dolar AS yang menguat sehingga mendorong kenaikan harga komoditas secara global. Selain itu, mobilitas masyarakat yang membaik turut mendorong peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat di Kepri. Sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakan harga menunjukkan bahwa tekanan inflasi dapat lebih rendah. Potensi gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan termasuk komoditas hasil laut juga turut menekan inflasi lebih tinggi. Kebijakan penyesuaian harga jual dari perusahaan *Fast Moving Consumer Goods* sebagai dampak penyesuaian inflasi pada tahun sebelumnya mendorong tekanan inflasi yang cukup tinggi. Akan tetapi, kebijakan pengetatan moneter diprakirakan akan meredam tekanan

Tabel 7.2 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2023

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalinya kasus penyebaran COVID-19. Potensi gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan di wilayah Kepri dan di luar Kepri. Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang masih berlanjut. Kenaikan cukai rokok yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Risiko geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM, avtur, dan bahan bakar RT. Kenaikan tarif listrik non subsidi mulai bulan April 2023. Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli. Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
<i>Downside Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan infrastruktur yang memperlancar logistik bahan pangan. Pelaksanaan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang lebih masif mendorong ketersediaan bahan pangan dan normalisasi harga pangan. Penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi dari maskapai angkutan udara. Berdasarkan hasil <i>Liaison</i>, rata-rata produsen sudah melakukan price in kenaikan harga pada awal tahun dan tidak akan menaikkan harga jual sampai akhir tahun.

inflasi yang terlalu tinggi. Selain itu, risiko inflasi dari kenaikan harga energi diperkirakan masih terbatas sejalan dengan harga energi yang relatif lebih stabil pada tahun ini. Selain itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbang menahan tekanan inflasi menjadi lebih tinggi.

Tekanan inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi nasional $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga komoditas global seperti gandum dan pupuk.
2. Potensi risiko kenaikan tarif angkutan udara seiring normalisasi mobilitas masyarakat didorong relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan yang mendorong kelompok penyediaan akomodasi dan makan minum serta kelompok transportasi.
3. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif seperti tunjangan hari raya, tunjangan gaji pegawai, dan gaji ke-13 akan kembali normal sehingga dapat mendorong daya beli masyarakat secara keseluruhan dan akan mendorong peningkatan permintaan.
4. Peningkatan cukai rokok pada tahun 2023 sebesar 10%.

Upaya pengendalian inflasi selama tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Memasuki bulan triwulan I 2023, tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi terutama memasuki periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sehingga diperlukan beberapa upaya pengendalian inflasi antara lain sebagai berikut:

- a. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 program unggulan GNPIP yakni: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui HLM TPID.
- b. Meningkatkan produksi pangan di Kepri dengan mengoptimalkan *urban farming*, penggunaan teknik budidaya yang lebih baik seperti Program lipat ganda (Proliga), *digital farming* maupun *integrated farming* untuk mencapai hasil produksi yang optimal dengan biaya

yang lebih efisien. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penggunaan Dana Desa untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategi.

- c. Memperkuat dan memperluas KAD di dalam maupun dengan daerah di luar Kepri yang telah terjalin dengan mendorong terlaksananya transaksi perdagangan melalui BUMD, koperasi maupun swasta. Pelaksanaan KAD tersebut perlu didukung dengan ketersediaan data neraca pangan yang akurat, logistik yang efisien, gudang penyimpanan yang memadai, dan pusat distribusi berupa pasar sentral/pasar induk untuk memudahkan pengawasan stok dan lalu lintas barang.
- d. Memperkuat sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyaluran program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Sinergi pengendalian inflasi juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
- e. Terus melanjutkan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari pengalihan subsidi BBM secara tepat waktu dan sasaran sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap inflasi.
- f. Mendorong penggunaan *Smart Green House* untuk mengatasi masalah siklus tanam agar memperoleh produktivitas tanaman yang berkesinambungan sepanjang tahun sehingga jumlah pasokan tetap stabil.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengendalikan laju inflasi, antara lain:

1. Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dengan mengendalikan tingkat inflasi tetap rendah dan stabil.
2. Mendorong implementasi program GNPIP yang dirumuskan oleh TPID dalam rangka pengendalian inflasi terutama komoditas pangan.
3. Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran yang efisien serta tepat sasaran.
4. Meningkatkan daya saing investasi dengan pemberian insentif yang menarik, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan bagi investor.
5. Mendorong hilirisasi komoditas komoditas Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang maritim.
6. Memperkuat *linking and matching* kebutuhan pekerja di dunia

usaha dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pelatihan dan sertifikasi profesi.

7. Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan memperkuat interkoneksi antar daerah baik melalui jalur darat maupun jalur laut sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.
8. Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.
9. Mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keunggulan *Free Trade Zone* (FTZ) melalui sejumlah paket insentif investasi sebagai daya tarik investasi.
10. Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan aspek 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku dan Promosi).

Lampiran

**Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau**

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
MAKRO								
Laju Inflasi (yoy)*	1,56	1,52	2,07	2,26	3,24	5,89	6,79	5,83
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	109,67	109,15	110,11	113,91	115,17	122,6	121,07	122,34
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	103,73	104,49	105,07	105,59	106,72	107,0	106,50	107,10
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	100,55	100,69	100,86	100,98	101,49	101,8	102,39	103,04
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	103,19	104,04	104,19	104,77	108,04	109,3	109,77	109,94
IHK KESEHATAN	102,22	102,32	102,66	103,09	103,27	103,1	103,23	103,41
IHK TRANSPORTASI	98,42	98,88	97,82	101,81	101,79	106,0	117,08	119,05
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,38	99,39	99,42	99,33	99,05	99,1	99,03	99,03
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	104,26	105,17	105,20	105,19	105,33	107,2	107,46	107,52
IHK PENDIDIKAN	112,16	112,16	114,18	114,18	114,18	114,2	117,34	117,34
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	104,11	104,34	104,43	106,14	108,03	109,8	110,07	110,18
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	110,10	112,19	112,37	113,13	116,65	117,7	117,85	120,28
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	-1,19	6,90	2,97	5,27	2,83	5,01	6,03	6,40
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	0,67	12,85	10,19	10,94	9,900	12,88	13,34	3,45
Impor Non Migas (Juta USD**)	1,73	12,52	9,36	9,09	9,610	12,47	14,33	4,41
PERBANKAN								
Giro (Rp miliar)	19.688	19.526	20.291	20.462	20.975	22.098	23.498	25.467
Tabungan (Rp miliar)	26.346	27.823	28.294	29.429	29.538	30.479	30.451	31.850
Deposito (Rp miliar)	15.849	15.817	15.444	16.324	14.022	15.037	12.097	15.554
Total DPK (Rp miliar)	61.883	63.166	64.029	66.214	64.535	67.613	66.046	72.871
Total Asset (Rp miliar)	70.281	72.473	73.816	75.306	77.159	77.367	78.314	83.142
Total Kredit (Rp miliar)	53.331	58.013	56.444	59.691	63.402	61,9	63.127	64.861
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,97%	8,85%	10,29%	8,49%	8,48%	8,50%	8,62	8,82
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	3,41%	3,18%	3,02%	2,71%	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%
LDR (%)	86,18%	91,84%	88,15%	90,15%	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%
NPL (%)	4,16%	3,71%	3,63%	3,26%	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%
SISTEM PEMBAYARAN								
Inflow (miliar Rp)	2.114	2.086	1.084	760	1.540	1.297	1.088	680
Outflow (miliar Rp)	1.267	2.823	1.512	2.658	1.114	2.401	1.668	3.133
Volume Kliring (lembar)	66.718	77.113	68.023	71.673	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.390.038	3.489.100	2.406.142	2.602.398	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536

Sumber: Bank Indonesia

Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100

***) Data Sangat Sementara

***) Data Perbankan dari Bank Umum

**Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Gabungan 2 Kota (Kota Batam Dan Kota Tanjungpinang)
Mulai Januari 2020, menggunakan Tahun Dasar 2018**

No	KELOMPOK	Desember 2021		Maret 2022		Juni 2022		September 2022		Desember 2022	
		Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm
UMUM		107,05	0,56	108,07	0,68	111,1	0,84	112,36	1,06	113,29	1,11
I. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		113,91	0,55	115,17	1,12	122,59	2,18	121,07	0,29	122,34	2,95
a.	MAKANAN	112,95	0,60	113,88	1,18	122,14	2,59	119,17	0,08	119,71	3,40
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	103,70	0,18	103,81	0,05	107,45	0,83	108,64	0,08	110,72	0,29
c.	MINUMAN BERALKOHOL	99,23	0,50	99,31	0,54	99,64	0,16	99,75	0,21	100,23	0,07
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	128,47	0,47	132,89	1,43	137,32	0,44	144,14	1,63	149,95	1,96
II. PAKAIAN DAN ALAS KAKI		105,59	0,58	106,72	0,42	107,03	(0,00)	106,50	(0,26)	107,10	(0,11)
a.	PAKAIAN	106,13	0,61	106,77	0,33	107,58	0,14	106,83	(0,32)	107,35	(0,13)
B.	ALAS KAKI	103,50	0,45	106,53	0,76	104,92	(0,56)	105,24	0,00	106,13	0,00
III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA		100,98	0,03	101,49	0,21	101,81	0,04	102,39	0,10	103,04	0,02
a.	SEWA RUMAH	101,15	0,00	101,19	0,00	101,51	(0,00)	102,07	0,00	103,64	0,00
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	102,26	0,18	102,95	0,20	103,53	0,27	104,31	0,64	104,33	0,03
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	100,51	0,00	101,73	0,58	102,06	0,00	102,83	0,00	102,89	0,06
IV. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA		104,77	0,31	108,04	0,84	109,30	0,48	109,77	0,31	109,94	0,00
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	102,06	0,04	102,15	0,09	103,28	0,29	103,64	(0,12)	103,69	0,05
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	98,70	0,00	100,87	0,91	102,10	(0,00)	103,50	(0,75)	103,30	0,18
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	106,72	0,01	106,72	0,04	107,10	(0,00)	107,18	0,00	106,99	(0,19)
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	100,89	0,27	101,88	0,35	103,02	(0,00)	97,22	0,00	97,22	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	101,86	0,02	101,94	0,08	106,57	(0,00)	105,93	(0,25)	105,60	(0,31)
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	106,72	0,54	112,74	1,40	114,06	0,85	116,07	0,72	116,52	0,05
V. KESEHATAN		103,09	0,11	103,27	0,10	103,10	0,00	103,23	0,02	103,41	0,03
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	104,20	0,27	104,50	0,23	104,12	0,00	104,43	0,05	104,84	0,08
b.	JASA RAWAT JALAN	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	125,43	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,01	126,40	0,00
VI. TRANSPORTASI		101,81	1,71	101,79	1,02	106,04	0,93	117,08	6,98	119,05	1,25
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	105,39	0,04	105,93	0,00	106,91	0,00	107,39	0,14	107,88	(0,00)
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	100,86	0,02	101,87	0,22	101,53	(0,00)	116,60	14,11	117,43	0,22
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	100,28	7,91	97,28	4,21	115,58	3,79	127,08	(1,08)	133,20	4,53
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	124,52	0,00	124,52	0,00	124,39	0,00	124,39	0,00	124,39	0,00
VII. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN		99,33	(0,07)	99,05	(0,00)	99,15	0,09	99,03	0,14	99,03	(0,00)
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	99,67	0,02	96,80	(0,01)	97,23	0,43	96,73	0,63	96,72	(0,01)
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	99,25	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00	100,08	0,00
c.	ASURANSI	100,00	0,00	100,00	(0,00)	100,00	(0,00)	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	JASA KEUANGAN	98,85	(1,15)	95,75	(0,00)	95,75	(0,00)	95,75	0,00	95,75	0,00
VIII REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA		105,19	0,18	105,33	(0,00)	107,2	0,09	107,46	0,00	107,52	0,02
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	102,72	0,00	102,72	(0,00)	102,7	(0,00)	102,72	0,00	102,72	0,00
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,17	0,00	100,17	0,00	100,2	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	105,45	0,00	105,45	(0,00)	116,2	0,00	111,83	0,00	111,83	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	108,97	0,38	109,27	(0,01)	111,2	0,18	112,65	0,01	112,76	0,04
IX PENDIDIKAN		114,18	0,00	114,18	(0,00)	114,2	(0,00)	117,34	1,46	117,34	0,00
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	114,90	0,00	114,90	0,00	114,9	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	112,28	0,00	112,28	0,00	112,3	0,00	113,45	0,00	113,45	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	117,10	0,00	117,10	(0,00)	117,1	(0,00)	123,33	5,32	123,33	0,00
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	110,00	0,00	110,00	(0,00)	110,0	(0,00)	110,84	0,00	110,84	0,00
X PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN		106,14	1,48	108,03	0,11	109,8	0,23	110,07	0,09	110,18	0,00
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	106,14	1,48	108,03	0,11	109,8	0,23	110,07	0,09	110,18	0,00
XI PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA		113,13	0,41	116,65	1,75	117,7	0,10	117,85	(0,34)	120,28	1,07
a.	PERAWATAN PRIBADI	108,21	0,37	111,11	1,12	113,0	0,66	114,98	0,23	116,29	0,41
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	124,11	0,52	128,81	2,98	128,4	(0,82)	124,79	(1,38)	129,68	2,33
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0	0,00	103,63	0,00	103,63	0,00
d.	JASA LAINNYA	100,11	0,00	108,19	(0,00)	108,2	(0,00)	108,19	0,00	108,19	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Batam	1,06%	0,06%	-0,12%	1,05%	0,15%	0,45%	0,19%	0,58%	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%
2. Tanjungpinang	1,40%	0,09%	-0,32%	0,98%	-0,36%	0,36%	0,33%	0,42%	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%
3. Kepulauan Riau	1,1%	2,4%	-0,15%	1,04%	0,09%	0,43%	0,31%	0,56%	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%
4. Nasional	2,96%	0,18%	-0,05%	0,45%	0,13%	0,08%	-0,04%	0,57%	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2021		2022											
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	75.231,73	75.306,02	76.032,24	76.595,47	77.158,71	76.048,30	77.104,29	77.366,71	77.610,92	77.600,78	78.313,65	80.292,60	81.337,76	83.141,73
DANA PIHAK KETIGA	64.913,01	66.214,18	61.430,05	66.059,12	64.534,98	64.594,32	65.717,27	67.613,00	67.947,63	67.948,82	66.046,02	70.288,44	69.136,93	72.871,01
a. Giro	20.143,28	20.461,59	20.003,62	21.066,51	20.974,87	19.980,87	21.864,57	22.097,66	22.238,86	22.347,39	23.497,77	25.327,70	25.053,26	25.467,00
b. Tabungan	28.639,26	29.428,54	27.504,62	29.322,42	29.538,48	30.554,22	30.119,00	30.478,64	30.468,63	30.368,61	30.450,83	30.693,82	31.109,90	31.849,85
c. Deposito	16.130,48	16.324,04	13.921,80	15.670,18	14.021,62	14.059,24	13.733,71	15.036,70	15.240,14	15.232,83	12.097,42	14.266,92	12.973,77	15.554,16
KREDIT														
a. Jenis Penggunaan	59.451,55	59.690,56	59.123,58	59.439,22	59.354,29	60.142,80	60.665,10	61.920,11	61.983,70	61.627,65	63.126,58	63.875,60	63.562,24	64.861,08
Modal Kerja	20.464,93	20.739,46	20.144,24	20.055,79	19.733,53	20.486,66	21.102,89	22.230,32	22.592,67	22.272,97	22.877,87	22.201,61	22.028,46	24.094,36
Investasi	19.942,53	19.756,58	19.615,21	20.118,94	20.180,73	20.087,05	20.019,41	19.815,14	19.264,19	19.100,09	19.775,60	21.035,12	20.702,06	19.773,73
Konsumsi	19.044,08	19.194,53	19.364,12	19.264,50	19.440,03	19.569,10	19.542,80	19.874,65	20.126,84	20.254,59	20.473,10	20.638,87	20.831,72	20.992,98
b. Jenis Kredit	59.451,55	59.690,56	59.123,58	59.439,22	59.354,29	60.142,80	60.665,10	61.920,11	61.983,70	61.627,65	63.126,58	63.875,60	63.562,24	64.861,08
UMKM	9.820,17	10.326,41	10.102,97	10.220,77	10.513,30	10.877,37	10.901,17	11.067,21	11.067,79	11.088,69	11.222,37	11.250,91	11.293,59	11.596,14
Non UMKM	49.631,38	49.364,15	49.020,61	49.218,45	48.840,98	49.265,44	49.763,93	50.852,90	50.915,90	50.538,96	51.904,21	52.624,69	52.268,65	53.264,93
c. Kolektibilitas	59.451,55	59.690,56	59.123,58	59.439,22	59.354,29	60.142,80	60.665,10	61.920,11	61.983,70	61.627,65	63.126,58	63.562,24	64.861,08	64.861,08
Lancar	53.895,45	54.532,13	52.883,35	52.409,25	53.092,92	53.642,45	54.889,91	56.697,05	56.604,40	56.462,54	57.733,30	58.669,54	60.275,27	59.636,94
D.P.Khusus	3.524,43	3.213,33	4.248,46	4.989,30	4.320,96	4.545,01	3.933,33	3.447,04	3.449,97	3.347,96	3.450,16	3.525,41	3.238,37	3.612,49
Kurang Lancar	101,37	100,42	229,78	227,94	137,06	125,78	150,49	119,52	263,43	216,04	382,10	187,27	216,85	255,81
Diragukan	538,91	485,51	409,85	450,67	454,05	466,40	491,34	439,06	461,45	487,95	442,87	591,27	434,17	437,96
Macet	1.391,40	1.359,17	1.352,14	1.362,06	1.349,29	1.363,16	1.200,03	1.217,43	1.204,45	1.113,16	1.118,15	588,74	696,40	712,83
RATIO														
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	91,59%	90,15%	96,25%	89,98%	91,97%	93,11%	92,31%	91,58%	91,22%	90,70%	95,58%	90,43%	93,82%	88,73%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,42%	3,26%	3,09%	2,92%	2,75%	3,25%	3,04%	2,87%	3,11%	2,95%	3,08%	2,15%	2,08%	2,18%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2022													
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	17.924,89	17.759,93	19.239,28	19.805,09	19.418,71	18.177,73	18.610,94	18.749,80	18.827,19	18.617,59	18.489,44	19.317,96	19.196,48	19.125,82
DANA PIHAK KETIGA	15.952,30	15.857,31	13.877,57	16.349,67	14.840,15	14.784,02	15.214,03	16.483,20	16.716,18	16.564,98	14.753,33	16.980,78	14.947,33	16.589,18
a. Giro	5.417,57	5.040,78	4.968,85	5.667,95	5.376,53	4.913,17	5.585,88	5.590,55	5.304,06	5.092,15	5.556,84	6.586,00	6.453,30	6.072,65
b. Tabungan	6.691,12	7.038,06	6.175,24	6.759,82	6.818,10	7.206,03	6.957,28	7.063,35	7.218,28	7.085,91	7.070,94	7.052,95	7.177,73	7.389,74
c. Deposito	3.843,61	3.778,48	2.733,48	3.921,91	2.645,53	2.664,81	2.670,87	3.829,30	4.193,84	4.386,92	2.125,54	3.341,83	1.316,29	3.126,79
KREDIT														
a. Jenis Penggunaan	12.816,76	12.759,39	12.810,32	12.870,80	13.011,54	13.205,38	13.011,20	13.149,99	13.280,47	13.212,31	13.596,99	13.677,20	14.042,93	14.264,89
Modal Kerja	3.423,63	3.524,07	3.476,54	3.410,79	3.474,01	3.611,55	3.601,84	3.689,57	3.828,44	3.840,08	3.865,25	3.888,73	3.883,86	3.853,34
Investasi	2.776,42	2.556,80	2.547,20	2.654,32	2.658,03	2.661,16	2.479,42	2.436,57	2.317,87	2.204,34	2.469,20	2.471,85	2.783,15	2.963,37
Konsumsi	6.616,71	6.678,52	6.786,58	6.805,70	6.879,50	6.932,67	6.929,94	7.023,85	7.134,16	7.167,89	7.262,55	7.316,62	7.375,92	7.448,18
b. Jenis Kredit	12.816,76	12.759,39	12.810,32	12.870,80	13.011,54	13.205,38	13.011,20	13.149,99	13.280,47	13.212,31	13.596,99	13.677,20	14.042,93	14.264,89
UMKM	3.124	3.342	3.319	3.375	3.463	3.590	3.590	3.674	3.730	3.722	3.766	3.780	3.815	3.825
Non UMKM	9.693	9.417	9.491	9.496	9.548	9.615	9.421	9.476	9.550	9.490	9.831	9.897	10.228	10.440
c. Kolektibilitas	12.816,76	12.759,39	12.810,32	12.870,80	13.011,54	13.205,38	13.011,20	13.149,99	13.280,47	13.212,31	13.596,99	13.363,84	15.341,77	14.059,84
Lancar	11.270,25	11.400,25	11.330,22	10.987,89	11.357,09	11.420,02	11.490,89	11.695,02	11.716,71	11.777,31	12.125,58	12.459,34	14.207,94	12.386,13
D.P.Khusus	686,98	539,25	619,42	1.011,47	803,97	927,41	810,23	781,17	786,78	762,87	767,77	783,92	480,57	967,53
Kurang Lancar	20,66	15,20	57,29	26,14	34,28	29,38	32,74	26,56	108,96	107,55	133,68	82,63	132,17	131,79
Diragukan	388,62	360,07	356,83	400,87	375,76	381,04	421,53	383,37	403,86	380,90	383,73	399,72	226,73	386,17
Macet	450,26	444,82	446,57	444,44	440,44	447,54	255,82	263,88	264,16	183,68	186,23	(361,78)	294,37	188,22
RATIO														
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	80,34%	80,46%	92,31%	78,72%	87,68%	89,32%	85,52%	79,78%	79,45%	79,76%	92,16%	80,55%	93,95%	85,99%
b. Non Performing Loans (NPL)	6,71%	6,43%	6,72%	6,77%	6,54%	6,50%	5,46%	5,12%	5,85%	5,09%	5,17%	0,90%	4,26%	5,02%

Sumber: Bank Indonesia

Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

**) Meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Lampiran

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum)
Kota Batam

KETERANGAN	2021		2022											
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ASET	57.306,84	57.590,10	56.792,96	56.790,38	57.740,00	57.870,57	58.493,36	58.616,91	58.783,73	58.983,18	59.824,21	60.974,64	62.141,27	64.015,91
DANA PIHAK KETIGA	48.960,71	50.356,86	47.552,48	49.709,44	49.694,82	49.810,31	50.503,25	51.129,81	51.231,46	51.383,84	51.292,69	53.307,65	54.189,61	56.281,84
a. Giro	14.725,71	15.420,81	15.034,77	15.398,56	15.598,35	15.067,69	16.278,69	16.507,10	16.934,81	17.255,24	17.940,93	18.741,70	18.599,96	19.394,35
b. Tabungan	21.948,14	22.390,48	21.329,39	22.562,61	22.720,38	23.348,19	23.161,72	23.415,29	23.250,35	23.282,69	23.379,89	23.640,87	23.932,17	24.460,11
c. Deposito	12.286,87	12.545,56	11.188,32	11.748,27	11.376,10	11.394,43	11.062,84	11.207,41	11.046,30	10.845,91	9.971,88	10.925,09	11.657,47	12.427,37
KREDIT														
a. Jenis Penggunaan	46.634,78	46.931,17	46.313,26	46.568,42	46.342,75	46.937,42	47.653,90	48.770,11	48.703,23	48.415,34	49.529,59	50.198,40	49.519,30	50.596,19
Modal Kerja	17.041,30	17.215,39	16.667,70	16.645,00	16.259,52	16.875,11	17.501,05	18.540,75	18.764,22	18.432,89	19.012,63	18.312,88	18.144,60	20.241,02
Investasi	17.166,11	17.199,78	17.068,01	17.464,62	17.522,70	17.425,89	17.539,99	17.378,57	16.946,32	16.895,75	17.306,40	18.563,27	17.918,91	16.810,36
Konsumsi	12.427,37	12.516,00	12.577,54	12.458,80	12.560,53	12.636,42	12.612,86	12.850,80	12.992,68	13.086,70	13.210,56	13.322,25	13.455,79	13.544,80
b. Jenis Kredit	46.634,78	46.931,17	46.313,26	46.568,42	46.342,75	46.937,42	47.653,90	48.770,11	48.703,23	48.415,34	49.529,59	50.198,40	49.519,30	50.596,19
UMKM	6.696,54	6.984,52	6.783,94	6.845,57	7.049,84	7.287,04	7.310,71	7.392,98	7.337,57	7.366,66	7.456,35	7.470,72	7.478,67	7.770,80
Non UMKM	39.938,25	39.946,65	39.529,31	39.722,85	39.292,91	39.650,38	40.343,19	41.377,13	41.365,66	41.048,68	42.073,24	42.727,68	42.040,63	42.825,38
c. Kolektibilitas	46.634,78	46.931,17	46.313,26	46.568,42	46.342,75	46.937,42	47.653,90	48.770,11	48.703,23	48.415,34	49.529,59	50.198,40	49.519,30	50.596,19
Lancar	42.625,20	43.131,88	41.553,13	41.421,36	41.735,83	42.222,43	43.399,02	45.002,03	44.887,69	44.685,23	45.607,72	46.210,20	46.067,34	47.250,81
D.P.Khusus	2.837,46	2.674,08	3.629,04	3.977,83	3.516,99	3.617,60	3.123,10	2.665,87	2.663,19	2.585,09	2.682,40	2.741,49	2.757,81	2.644,96
Kurang Lancar	80,70	85,22	172,49	201,81	102,78	96,41	117,75	92,97	154,46	108,49	248,42	104,64	84,68	124,02
Diragukan	150,28	125,44	53,01	49,80	78,29	85,36	69,82	55,69	57,59	107,05	59,13	191,55	207,45	51,79
Macet	941,14	914,55	905,57	917,62	908,86	915,62	944,21	953,56	940,29	929,48	931,92	950,52	402,03	524,61
RATIO														
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	95,25%	93,20%	97,39%	93,68%	93,25%	94,23%	94,36%	95,38%	0,95	0,94	0,97	94,17%	91,38%	89,90%
b. Non Performing Loans (NPL)	2,51%	2,40%	2,44%	2,51%	2,35%	2,34%	2,37%	2,26%	0,02	0,02	0,03	2,48%	1,40%	1,38%

Sumber: Bank Indonesia

Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2021								2022							
	I		II		III		IV		I		II		III		IV	
	Total	Rata-rata Perhari														
A. WARKAT KLIRING																
1. WARKAT (Lbr)	66.718	1.076	77.113	1.244	68.023	1.097	71.673	1.156	69.279	1.117	70.929	1.144	68.779	1.109	48.087	776
2. NOMINAL (Jt.Rp)	3.390.038	54.678,033	3.489.100	56.275,807	2.406.142	38.808,742	2.802.398	41.974,161	3.540.018	57.097,067	3.547.218	57.213,187	3.600.741	58.076,461	2.410.536	38.880

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (volatile food), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persisten).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersial yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/ subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum.
yoy (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

